



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2005-2025

Diperbanyak oleh:
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
2010**



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2005–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;

b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah sesuai dengan Visi, misi dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005–2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Sasaran, Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2005–

2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

(2) Rincian dari Sasaran, Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 tetap diakui sebagai dokumen perencanaan daerah.
- (2) Tahap I RPJP Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 mengakomodir perencanaan daerah yang sudah ada dan berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 7 April 2010

WAKIL BUPATI PURWOREJO,



MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 7 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2005 – 2025

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya berkesinambungan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pembangunan diperlukan perencanaan pembangunan yang merupakan pedoman dan penentu arah pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan pedoman dan arah pembangunan daerah dalam bentuk visi dan misi untuk jangka waktu 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dijabarkan lebih lanjut dan terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan jangka menengah yang disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, memuat prioritas pembangunan daerah dan rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dalam upaya memberikan pedoman dan untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo, serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025, adalah:

1. untuk mendukung koordinasi antar pelaku dalam pembangunan Daerah;
2. untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Daerah;
3. untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan Daerah;
4. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam Pembangunan Daerah;
5. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor : 3 Tahun 2010
Tanggal : .

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2005-2025**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Singkatan.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Tujuan	I-1
C. Dasar Hukum.....	I-2
D. Hubungan RPJPD Kabupaten Purworejo Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-3
E. Sistematika.....	I-3
BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH.....	II-1
A. Kondisi Geografis Topografi.....	II-1
B. Demografi	II-1
C. Kondisi Ekonomi Daerah	II-2
D. Capaian Hasil Pembangunan	II-3
E. Kondisi Sosial Budaya	II-4
F. Kondisi Perekonomian.....	II-21
G. Tata Ruang.....	II-32
H. Sarana dan Prasarana.....	II-36
I. Politik dan Tata Pemerintahan	II-44
BAB III ISU-ISU PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG	III-1
BAB IV VISI DAN MISI KABUPATEN PURWOREJO.....	IV-1
A. Visi	IV-1
B. Misi.....	IV-2
BAB V SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2005 – 2025	V-1
A. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purworejo.....	V-1
B. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purworejo	V-1
C. Tahapan Dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah.....	V-3
BAB VI PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR SINGKATAN

1	AFTA	=	Asian Free Trade Area
2	AHH	=	Angka Harapan Hidup
3	AIDS	=	Acquired Immuno Deficiency Syndrome
4	APAK	=	Angka Partisipasi Angkatan Kerja
5	APK	=	Angka Partisipasi Kasar
6	APM	=	Angka Partisipasi Murni
7	AT	=	Angka Transisi
8	Balita	=	Bawah Lima Tahun
9	BB	=	Berat Badan
10	BBI	=	Balai Benih Ikan
11	BBM	=	Bahan Bakar Minyak
12	BCG	=	Bacillus Calmette Guerin
13	BGM	=	Bawah Garis Merah
14	BKB	=	Bina Keluarga Balita
15	BKKBN	=	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
16	BKL	=	Bina Keluarga Lansia
17	BKR	=	Bina Keluarga Remaja
18	BOT	=	<i>Build, Own and Transfer</i>
19	BPS	=	Badan Pusat Statistik
20	BTN	=	Bank Tabungan Negara
21	BUMD	=	Badan Usaha Milik Daerah
22	BUMN	=	Badan Usaha Milik Negara
23	CEDAW	=	Convention for Eliminations and Determination Against Women
24	DAK	=	Dana Alokasi Khusus
25	DAS	=	Daerah Aliran Sungai
26	DBD	=	Demam Berdarah Dengue
27	DIII	=	Diploma Tiga
28	DIV	=	Diploma Empat
29	DIY	=	Daerah Istimewa Yogyakarta
30	DO	=	Drop Out
31	DPD	=	Dewan Perwakilan Daerah
32	DPL	=	diatas permukaan laut
33	DPR	=	Dewan Perwakilan Rakyat
34	DPRD	=	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
35	DPT	=	Difteri Pertusis Tetanus
36	Ha	=	Hektometer
37	HGB	=	Hak Guna Bangunan
38	HGU	=	Hak Guna Usaha
39	HIV	=	human immunodeficiency virus
40	HL	=	Hutan Lindung
41	HM	=	Hak Milik
42	HP	=	dan Hak Pakai
43	HP	=	Hutan Produksi
44	HPT	=	Hutan Produksi Terbatas
45	IDG	=	Indeks Pemberdayaan Gender
46	IKM	=	Industri Kecil Menengah

47	ILPPD	=	Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
48	IMTAQ	=	Keimanan Ketaqwaan
49	IPG	=	Indeks Pembangunan Gender
50	IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
51	IPTEK	=	ilmu pengetahuan dan teknologi
52	IUD	=	<i>Intra</i> Uterine Device
53	KB	=	Keluarga Berencana
54	KDRT	=	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
55	KK	=	Kepala Keluarga
56	Km	=	kilometer
57	KPPOD	=	Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah
58	KPPT	=	Pelayanan Perijinan Terpadu
59	KPR/BTN	=	Kredit Perumahan Rakyat
60	KS	=	Keluarga Sejantera
61	KTP	=	Kartu Tanda Penduduk
62	KUD	=	Koperasi Unit Desa
63	Kwh	=	<i>Kilo Watt Hours</i>
64	LKPJ	=	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
65	LPG	=	<i>Liquid Petroleum Gas</i>
66	LPPD	=	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
67	LSM	=	Lembaga Swadaya Masyarakat
68	M	=	meter
69	MCK	=	Mandi Cuci Kakus
70	MDGs	=	Millenium Development Gols
71	MOP	=	Medis Operasi Pria
72	MOW	=	Medis Operasi Wanita
73	MUSRENBANG	=	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
74	NAFTA	=	North American Free Trade Area
75	Nakes	=	Tenaga Kesehatan
76	NAPZA	=	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
77	Orkesmas	=	Organisasi Kemasyarakatan
78	PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
79	PAUD	=	Pendidikan Anak Usia Dini
80	PDRB	=	Produk Domestik Bruto
81	Pemilu	=	Pemilihan Umum
82	Permen	=	Peraturan Menteri
83	Permendagri	=	Peraturan Menteri Dalam Negeri
84	Permenkes	=	Peraturan Menteri Kesehatan
85	Persero	=	Perusahaan Perorangan
86	PHBS	=	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
87	Pilgub	=	Pemilihan Gubernur
88	PMKS	=	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
89	PNPM	=	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
90	PNS	=	Pegawai Negeri Sipil
91	PPNS	=	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
92	PT	=	Perguruan Tinggi
93	Puskesmas	=	Pusat Kesehatan Desa
94	Puskesmasling	=	Pusat Kesehatan Keliling
95	Puskesmas	=	Pusat Kesehatan Masyarakat

96	RAD	=	Rencana Aksi Daerah
97	RKPD	=	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
98	RPJMD	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
99	RPJPD	=	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
100	RS	=	Rumah Sakit
101	RSU	=	Rumah Sakit Umum
102	RSUD	=	Rumah Sakit Umum Daerah
103	RT	=	Rukun Tetangga
104	RTH	=	Ruang Terbuka Hijau
105	RTM	=	Rumah Tangga Miskin
106	RTRW	=	Rencana Tata Ruang Wilayah
107	RW	=	Rukun Wilayah
108	SD	=	Sekolah Dasar
109	SDM	=	Sumber Daya Manusia
110	SIPD	=	Surat Ijin Pertambangan Daerah
111	Siskamling	=	Sistem Keamanan Lingkungan
112	SKM	=	Sarjana Kesehatan Masyarakat
113	SKPD	=	Satuan Kerja Perangkat Daerah
114	SLTA	=	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
115	SLTP	=	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
116	SPM	=	Standar Pelayanan Minimal
117	SUSENAS	=	Survei Sosial Ekonomi Nasional
118	SWP	=	Satuan Wilayah Pengembangan
119	TB	=	<i>Tuberculosis</i>
120	TKI	=	Tenaga Kerja Indonesia
121	UASBN	=	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
122	UCI	=	<i>Universal Child Immunization</i>
123	UHH	=	Usia Harapan Hidup
124	UKM	=	Usaha Kecil dan Menengah
125	UPT	=	Unit Pelaksana Teknis
126	VA	=	Volt Ampere
127	WTO	=	World Trade Organization
128	WTO	=	World Trade Organization

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah ini, pemerintah (pusat) telah menetapkan seperangkat peraturan perundangan, diantara yang sangat penting adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP-D) untuk jangka waktu 1 tahun. Ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah ini kemudian diperinci dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang **Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyusun RPJPD tahun 2005 - 2025. RPJPD ini akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan segenap stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun ke depan. Meskipun RPJPD Purworejo ini disusun dan ditetapkan pada tahun 2009, namun kurun waktu (time frame) nya ditetapkan tahun 2005-2025, hal ini dilakukan untuk memenuhi konsistensi bahwa RPJP-D Kabupaten Purworejo merupakan sub sistem RPJP-D Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 dan juga merupakan sub sistem RPJP Nasional 2005-2025. Hal ini sesuai yang dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dimana dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (duapuluh) tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya, dalam satu kesatuan pola sikap serta pola tindak.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Arah dan Program Kepala Daerah Kabupaten Purworejo.

C. Dasar Hukum

1. UU Republik Indonesia No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
9. Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
21. Perda Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo;
22. Perda Kabupaten Purworejo No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo

D. Hubungan RPJPD Kabupaten Purworejo Dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

RPJPD Purworejo merupakan satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 disusun mengacu pada RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 dengan memperhatikan RPJPD Nasional Tahun 2005 - 2025. RPJPD Kabupaten Purworejo, menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo.

Agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo Tahun 2005–2025 tidak bertentangan dengan pemanfaatan ruang, maka dalam menyusun RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 hendaknya memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo 2004 – 2014.

Dokumen RPJPD Kabupaten Purworejo 2005-2025 ini akan menjadi acuan bagi pasangan bupati/ wakil bupati terpilih dalam menyusun RPJMD dalam masa jabatannya.

E. Sistematika

RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005–2025 disusun dengan sistematika, terdiri dari enam (6) bab, sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| BAB I | : | Pendahuluan
Terdiri dari latar belakang, tujuan, dasar hukum, hubungan RPJPD Kabupaten Purworejo dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika RPJPD. |
| BAB II | : | Gambaran Kondisi Umum Daerah
berisi tentang gambaran kondisi daerah yaitu kondisi geografis; sosial budaya; ekonomi; tata ruang, sarana dan prasana; politik dan tata pemerintahan serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup. |
| BAB III | : | Isu-Isu Pembangunan Jangka Panjang
berisi tentang isi-isu strategis pembangunan jangka panjang dalam pembangunandi Kabupaten Purworejo |
| BAB IV | : | Visi dan Misi Kabupaten Purworejo
terdiri dari Visi dan Misi Kabupaten Purworejo dan Penjelasannya. |
| BAB V | : | Sasaran, Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025
berisi tentang arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun kedepan serta pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang selama 20 (dua puluh tahun) yang terbagi menjadi empat tahapan yaitu tahap pembangunan Lima Tahun Pertama, tahap Pembangunan Lima Tahun Kedua, tahap Pembangunan Lima Tahun Ketiga dan Tahap Pembangunan Lima Tahun Keempat. |
| BAB VI | : | Penutup
Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan yaitu gambaran tentang kedudukan RPJP-D dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan peran RPJP-D serta syarat keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang. |

BAB II

GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

A. Kondisi Geografi dan Topografi

Kabupaten Purworejo secara geografis terletak antara 7°32' – 7°54' LS dan 109°47'28 – 110°08'20" BT. Kabupaten Purworejo berjarak 120 Km dari Ibu Kota Jawa Tengah (Semarang), dan 520 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta). Luas wilayah daratan sebesar 1.034,81 km², sedangkan untuk luas wilayah laut sebesar 84 km². Batas wilayah Kabupaten Purworejo meliputi sebelah utara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang; sebelah timur Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); sebelah barat Kabupaten Kebumen dan sebelah selatan Samudera Indonesia.

Secara administratif Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 Kecamatan, 469 Desa dan 25 Kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Bruno, yaitu sebesar 108,43 km² dan tersempit adalah Kecamatan Kutoarjo dengan luas wilayah 37,59 km².

Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo secara umum terbagi menjadi dua yaitu bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1.050 meter di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 m dpl.

Kabupaten Purworejo memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang datang setiap enam bulan silih berganti. Suhu rata-rata 20 C – 32 C. sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 70 – 90% dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 9.291 mm dan bulan Januari sebesar 7.849 mm.

Kabupaten Purworejo memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Di Kabupaten ini terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini, diantaranya Kali Bogowonto, Kali Kodil, Kali Jati, Kali Gebang, Kali Bedono, dengan anak-anak sungainya. Sungai-sungai tersebut termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu – Luk Ulo, yang bermuara di Samudera Indonesia dan hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian tengah dan utara Kabupaten Purworejo.

B. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2005 sebesar 774.285 jiwa, terdiri dari 381.217 jiwa penduduk laki-laki dan 393.068 jiwa penduduk perempuan. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 1999 yaitu sebesar 760.283 jiwa yang terdiri dari 380.491 jiwa penduduk laki-laki dan 392.344 jiwa penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo tahun 1999-2005 fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,19%, tingkat pertumbuhan ini termasuk kategori rendah. Jumlah penduduk tahun 2025 diprediksi sebanyak 991.145 jiwa.

Selama kurun waktu 1999 – 2005, sex ratio atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan tidak mengalami perubahan yang berarti yaitu berkisar 96, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sedangkan angka kepadatan penduduk selama tahun 1999 - 2005 rata-rata sebesar 745 jiwa/km², termasuk tingkat

kepadatan cukup, meskipun jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah lebih rendah. Kepadatan penduduk Jawa Tengah sebesar 994,97 jiwa per km persegi.

Dilihat dari persebarannya, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Purworejo sebesar 89.898 jiwa dan yang terendah berada di Kecamatan Kaligesing sebesar 35.895 jiwa. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Kutoarjo dengan kepadatan penduduk sebesar 1.708/km² dan terendah adalah Kecamatan Bruno dengan kepadatan penduduk sebesar 407/km².

C. Kondisi Ekonomi Daerah

1. Struktur Ekonomi

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari kecenderungan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dominasi sektor-sektor pembentuk PDRB tersebut. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah. Besarnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2000 sebesar Rp 1.888.369,46 juta, menjadi sebesar Rp. 2.321.543,36 juta, atau bertambah sebesar Rp. 433.173.90 juta pada tahun 2005 atau meningkat sebesar 22,93% selama lima tahun. Dengan kata lain rata-rata pertumbuhan sebesar 4,58% per tahun.

Besarnya PDRB Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2000 sebesar Rp. 1.888.369,46 juta, menjadi sebesar Rp 3.443.170,90 juta pada tahun 2005 atau bertambah sebesar Rp 1.554.801,44 juta selama lima tahun, atau meningkat sebesar 82,33%. Dengan kata lain maka rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 16,46%, PDRB termasuk tinggi.

Dilihat dari Sumbangan sektor- sektor PDRB Kabupaten Purworejo dari tahun 2000–2005 diketahui bahwa sektor pertanian (dalam arti luas), memberi kontribusi sebesar 36,40%- 37,06%. Sumbangan sektor perekonomian terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 16,61% - 16,84%. Sedangkan sumbangan masing-masing PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2000 – 2005 diketahui sektor pertanian sebesar 33,22% - 34,63%. Sumbangan terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 16,04% - 16,55%.

Sampai dengan tahun 2025 PDRB Kabupaten Purworejo baik atas dasar harga konstan maupun berlaku, diprediksi masih didominasi oleh sektor pertanian, walaupun kontribusinya menurun. Kontribusi sektor pertanian (dalam arti luas) diprediksikan menjadi berkisar antara 28% – 30%. Sementara itu sektor lain diprediksikan meningkat kontribusinya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri. Perkembangan sektor industri lebih diarahkan pada peningkatan industri pengolahan hasil pertanian dan pendukungnya yang banyak menyerap tenaga kerja.

2. PDRB Per Kapita

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Besarnya PDRB per kapita penduduk (atas dasar harga konstan tahun 2000) untuk tahun 2000 sebesar Rp 2.679.693,74 menjadi Rp 4.812.345,86 pada tahun 2005, atau meningkat rata-rata sebesar 15,94% dibandingkan tahun 2003. Dengan kata lain diketahui rata-rata peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Purworejo sebesar 5,31%, menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Jika dibandingkan rata-rata PDRB per kapita Jawa Tengah (atas dasar harga konstan tahun 2000) tahun 2005 sebesar Rp

4.488.098,62. diketahui bahwa besarnya PDRB per kapita Kabupaten Purworejo (Rp 4.812.345,86) lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Tengah (Rp 4.488.098,62). Dengan kata lain, diketahui tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Purworejo sedikit lebih baik daripada rata-rata Jawa Tengah.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diketahui dari pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2001–2005 bersifat fluktuatif, meskipun ada kecenderungan meningkat secara positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo pada tahun 2001 sebesar 3,55%, meningkat pada tahun 2005 menjadi sebesar 4,85%. Besarnya pertumbuhan selama lima tahun menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu antara 3,55% - 4,88%. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2002 – 2005 antara 3,55% – 5,35%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo hampir sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo sampai dengan tahun 2025, diprediksikan fluktuatif, mengikuti pasang surutnya perekonomian nasional, regional, maupun global.

D. Capaian Hasil Pembangunan

Capaian hasil-hasil pembangunan Kabupaten Purworejo sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 dapat digambarkan dalam beberapa indikator agregat, meliputi IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Gini, dan Indeks Williamson, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo pada tahun 2004 sebesar 68,7, jika dibandingkan tahun 2005 mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 69,1. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 68,9 pada tahun 2004 dan 69,8 pada tahun 2005.

Jika dilihat dari masing-masing komponen pembentukan IPM pada tahun 2005 adalah sebagai berikut : AHH sebesar 68,9 tahun ; rata-rata lama sekolah 7,0 tahun; angka melek huruf sebesar 86,9 % dan rata-rata pengeluaran per kapita (per bulan) sebesar Rp. 623.000,00.

Keberhasilan pembangunan ditinjau dari pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah diketahui dari Indeks Gini dan Indeks Williamson. Besarnya Indeks Gini Kabupaten Purworejo pada tahun 2006 sebesar 0,26 lebih baik dari pada rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,27 pada tahun yang sama. Data tersebut menggambarkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Purworejo relatif baik. Indeks Gini berkisar antara 0 – 1, dimana semakin mendekati angka nol semakin baik (merata) dan besar semakin menggambarkan semakin tingginya kesenjangan antar kelompok pendapatan dalam masyarakat. Dengan demikian perbedaan antar kelompok pendapatan dalam masyarakat di Kabupaten Purworejo relatif kecil.

Angka Indeks Williamson Kabupaten Purworejo pada tahun 2005 menunjukkan angka 0,409. Data tersebut menggambarkan bahwa kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Purworejo cukup lebar. Kesenjangan antar wilayah kecamatan tersebut mengindikasikan bahwa beberapa wilayah kecamatan relatif cepat berkembang dan lainnya kurang berkembang. Keragaman karakteristik wilayah di Kabupaten

Purworejo menyebabkan terjadinya konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu sehingga memunculkan ketimpangan antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2001–2005 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo pada tahun 2001 diketahui dari pertumbuhan PDRB (ADHK tahun 2000) sebesar 3,55%, meningkat pada tahun 2005 menjadi sebesar 4,85%. Besarnya pertumbuhan PDRB (ADHB) dari tahun 2001 – 2005 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu sebesar 12,72% pada tahun 2001 meningkat menjadi sebesar 16,65% pada tahun 2005.

Data penduduk miskin di Kabupaten Purworejo, dari tahun 2002-2005 menunjukkan penurunan, diketahui dari jumlah penduduk miskin (2002) sebanyak 175.500 orang atau 22,81% pada tahun 2002 menurun menjadi 162.300 orang atau 20,90% pada tahun 2006 terjadi penurunan 1,91% selama empat tahun. Dengan indikator yang berbeda diketahui jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan. Hal ini diketahui dari data Susenas BPS tahun 2005 tentang jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Purworejo sebanyak 157.100 RTM atau (22,77%), tahun 2006 meningkat menjadi 162.300 RTM (22,85%), menurun menjadi 146.000 RTM (20,49%) tahun 2007. Jumlah RTM terbanyak berada di Kecamatan Bruno sebanyak 6.036 RTM dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Bagelen sebanyak 2.989 RTM. Berbagai program baik secara nasional maupun daerah telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di perdesaan, misalnya PNPM Mandiri (Perkotaan dan Perdesaan), Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan, UED-SP dan Alokasi Dana Pembangunan Desa.

E. Kondisi Sosial Budaya

1. Pendidikan

Gambaran keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat dari kondisi tiga pilar utama pembangunan pendidikan yaitu (1) pemerataan dan perluasan akses memperoleh pendidikan, (2) mutu relevansi dan daya saing serta (3) tata kelola dan pencitraan publik lembaga pengelola pendidikan. **Pemerataan dan perluasan akses memperoleh kesempatan pendidikan** diukur melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Transisi (AT). APK PAUD di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat. Tahun 2004 sebesar 30,12 % pada tahun 2005 meningkat menjadi 30,56% atau mengalami pertumbuhan 0,44%.

Sedangkan untuk APK jenjang pendidikan SLTP pada tahun 1999 APK sebesar 92,56%, tahun 2000 meningkat menjadi 95,98%. Tahun 2001 APK SLTP meningkat lagi menjadi 98,75% dan terus meningkat menjadi 99,75% pada tahun 2002. Tahun 2003 APK SLTP di Kabupaten Purworejo meningkat lagi menjadi 99,89% dan terus meningkat menjadi 103,45% tahun 2004, pada tahun 2005 turun menjadi sebesar 102,12%. APK SLTA di Kabupaten Purworejo masih dibawah angka 100%. APK SLTA mengalami pertumbuhan yang fluktuatif Tahun 2004 APK SLTA sebesar 58,65% menurun menjadi 57,79% pada tahun 2005.

Angka APM SD tahun 1999-2005 Menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Tahun 1999 APM SD sebesar 75,45%, meningkat pada tahun 2000 menjadi 78,79%. Tahun 2001 APM meningkat menjadi 80,45%, namun menurun pada tahun 2002 menjadi 79,76%. Tahun 2003 APM SD menurun kembali menjadi 78,67%. Tahun 2004 APM meningkat menjadi 81,23%, tahun 2005 meningkat lagi menjadi 82,21%.

Perkembangan pendidikan PAUD cukup baik, dilihat dari sarana dan prasarana layak

yang ada pada PAUD. Tahun 2003-2004 sarana PAUD layak sebesar 54% dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 56%. Rasio pendidik dengan murid PAUD tahun 2004 adalah 1:10 dan pada tahun 2005 rasio turun menjadi 1:21.

Rasio siswa SLTA dan SMK tahun 2001 - 2003 adalah 39: 61, tahun 2004 rasio siswa meningkat menjadi 41:59 dan tahun 2005 rasio meningkat menjadi 43: 57. Untuk angka naik kelas jenjang pendidikan dasar dan SLTP, hampir mencapai 100% meskipun pertumbuhannya masih fluktuatif. Tahun 2003 angka naik kelas sebesar 90,86 %, tahun 2004 meningkat menjadi 96,67% dan tahun 2005 angka naik kelas menjadi 98,23%.

Angka putus sekolah SD dan SLTP tahun 2004 sebesar 0,52% dan tahun 2005 turun menjadi sebesar 0,51%. Angka Putus Sekolah SMA/SMK tahun 2004 sebesar 0,68%, tahun 2005 meningkat menjadi 0,71%, yang berarti telah terjadi penurunan.

Mutu dan Relevansi pendidikan. Angka lulus SD di Kabupaten Purworejo tahun 2004 sebesar 99.06%, meningkat tahun 2005 menjadi 99,45%. Sedangkan Angka lulus SLTP tahun 2004 sebesar 78,87% meningkat menjadi 78,95% tahun 2005. Untuk pendidikan non formal cukup fluktuatif Angka Lulus Kesetaraan Paket A tahun 2004 sebesar 70% dan pada tahun 2005 meningkat menjadi sebesar 80%. Untuk paket B angka lulus tahun 2004 sebesar 72% dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 81%. Untuk paket C tahun 2004 angka kelulusan sebesar 80% dan pada tahun 2005 naik menjadi 90%.

Pertumbuhan nilai rata-rata UASBN SD tahun 2005 adalah 6,5. Untuk pertumbuhan nilai rata-rata UN SLTP tahun 2004 sebesar 6 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6,3. Sedangkan untuk tingkat SLTA pertumbuhan nilai rata-rata tahun 2004-2005 adalah 6.

Peningkatan kualitas pendidikan juga didukung oleh kondisi sarana pendidikan salah satunya adalah kondisi ruang kelas. Di Kabupaten Purworejo ruang kelas SD yang telah memenuhi standar pada tahun 2003 hanya sebesar 40,78%, tahun 2004 meningkat menjadi 42,12% dan tahun 2005 meningkat menjadi 43,50%. Sedangkan untuk ruang kelas SLTP yang telah memenuhi standar tahun 2004 sebesar 75,80% dan tahun 2005 meningkat menjadi 77,11%.

Tata Kelola dan Pencitraan Publik. Sampai dengan tahun 2004 seluruh sekolah telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pada tahun 2005 sekolah-sekolah yang telah menyelenggarakan MBS tersebut dikuatkan, sehingga kinerjanya meningkat. Jenjang pendidikan yang telah dikuatkan pada tahun 2005 adalah 72% SD, 87% SMP dan 82% SMA/SMK. Pada tahun 2005 seluruh sekolah dari jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA sudah terakreditasi. Pada tahun 2005, 21 SD, 7 SMP maupun 9 SMA, dalam proses mengajukan akreditasi ulang.

Prediksi

Pada tahun 2025 jumlah penduduk usia sekolah mulai dari usia sekolah PAUD (3 – 6 tahun) 44.234 jiwa, sedangkan untuk usia SD (7 – 12 tahun) sebesar 79.457 jiwa, dan penduduk usia SMP (13 – 15 tahun) sebanyak 46.219 jiwa dan penduduk usia SMA (16 – 18 tahun) sebanyak 45.692 jiwa.

Pada tahun 2010 - 2025 diprediksi bahwa APK PAUD akan mengalami peningkatan dan pada tahun 2025 menjadi sebesar 64,61%. Pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu pada tahun 2010 APK PAUD diprediksikan 37,45% Asumsinya adalah tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk menyekolahkan anak sedini mungkin. Selain itu jumlah lembaga PAUD sudah semakin banyak dan baik. Sedangkan APM SD Diperkirakan akan mengalami peningkatan dan pada tahun 2025 akan mencapai 99,85%.

APK SMP diprediksikan akan fluktuatif dengan angka berkisar 98 -105%. Tahun 2025 APK SMP diperkirakan mencapai 100,42%. Sedangkan APK SMA terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2025 APK SMA mencapai 72,69%.

Perkembangan pendidikan PAUD layak pada tahun 2025 sebesar 80%, secara bertahap target tersebut dicapai pada tahun 2010 65%, pada tahun 2015 sebesar 70%, pada tahun 2020 sebesar 75%. Rasio pendidik dengan murid PAUD tahun 2025 dipertahan 1:20 diupayakan dengan melalui penambahan jumlah guru dan prasarana PAUD serta penambahan lembaga baru.

Rasio siswa SLTA dan SMK tahun 2025 sudah mencapai 30 : 70. pencapaian secara bertahap pada tahun 2010 40:60, pada tahun 2015 38:64, pada tahun 2020 perbandingan mencapai 34:68 dan pada tahun 2025 mencapai 30:70.

Untuk angka naik kelas jenjang pendidikan dasar dan SLTP, pada tahun 2025 mencapai 100%. Secara bertahap pencapaian adalah sebagai berikut pada tahun 2015 sebesar 99,1% dan 2020 sebesar 99,8%.

Angka putus sekolah SD dan SLTP tahun 2025 sebesar 0,22%, capaian tahun 2025 di capai secara bertahap pada tahun 2010 sebesar 0,41%, tahun 2015 sebesar 0,35% dan pada tahun 2020 sebesar 0,29. Sedangkan Angka Putus Sekolah SMA/SMK pada tahun 2025 diprediksikan sebesar sebesar 0,31%, tahun 2010 diprediksikan 0,49%, tahun 2015 sebesar 0,44% dan pada tahun 2020 sebesar 0,36%.

Angka lulus SD pada tahun 2025 diprediksikan sebesar 99,99%, pada tahun 2010 sebesar 99,53% dan pada tahun 2015 sebesar 99,63%, dan pada tahun 2020 sebesar 99,73%. Sedangkan Angka lulus SLTP pada tahun 2025 99%, yang dicapai secara bertahap pada tahun 2010 sebesar 83,5%, pada tahun 2015 sebesar 87,5% dan pada tahun 2020 sebesar 93,5%. Untuk pendidikan non formal Angka Lulus Kesetaraan Paket A pada tahun 2025 diprediksikan sebesar 90%, target tersebut dicapai secara bertahap yaitu tahun 2010 sebesar 75%, pada tahun 2015 sebesar 80% dan pada tahun 2020 sebesar 85%. Untuk paket B Angka Lulus tahun 2025 diprediksikan sebesar 90%, dicapai secara bertahap pada tahun 2010 sebesar 79%, tahun 2015 sebesar 83% dan pada tahun 2020 sebesar 87%. Untuk paket C tahun 2025 angka kelulusan diprediksikan sebesar 99%, dicapai secara bertahap yaitu pada tahun 2010 sebesar 85%, tahun 2015 sebesar 90%, dan tahun 2020 94%.

Nilai rata-rata UASBN tahun 2025 diprediksikan sebesar 7,5 target tersebut dicapai secara bertahap yaitu pada tahun 2010 sebesar 6,9, tahun 2015 sebesar 7,1 dan tahun 2020 sebesar 7,3. Nilai rata-rata UN SLTP tahun 2025 diprediksikan sebesar 7,5. target tersebut dicapai secara bertahap yaitu pada tahun 2010 sebesar 6,9, pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 7,1 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 7,3. Sedangkan untuk tingkat SLTA nilai rata-rata tahun 2025 diprediksikan sebesar 7.

Di Kabupaten Purworejo ruang kelas SD yang telah memenuhi standar pada tahun 2025 diprediksikan sebesar 90%. Sedangkan ruang kelas SMP dan SMA yang telah memenuhi standar diprediksikan sebesar 100%. Target tahun 2025 tersebut dicapai secara bertahap yaitu pada tahun 2010 untuk ruang kelas SD sesuai standar sebesar 71%, pada tahun 2015 sebesar 78% dan pada tahun 2020 sebesar 83%. Sedangkan ruang kelas SMP dan SMA pada tahun 2010 sebesar 90%, pada tahun 2015 sebesar 94% dan pada tahun 2020 sebesar 96%.

2. Kesehatan

Perwujudan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator

antara lain angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, angka kesakitan, dan status gizi balita. Derajat kesehatan yang tinggi dapat tercapai apabila tersedia pelayanan kesehatan yang memadai.

Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Purworejo tahun 2000 – 2005 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2000 jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 18 orang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2001 menjadi 11 orang. Pada tahun 2002 mengalami kenaikan kembali menjadi 15 orang dan meningkat cukup tinggi terjadi pada tahun 2003, yaitu sebanyak 22 orang (setara dengan 217 per 100.000 kelahiran hidup). Jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2005 adalah 11 orang (108,8 per 100.000 kelahiran hidup). Sementara itu, jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga tahun 2005 mencapai 89,22%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil di seluruh wilayah termasuk perdesaan.

Jumlah kematian bayi dari tahun 2000 – 2005 mengalami penurunan. Pada tahun 2000 jumlah kematian bayi sebanyak 147 bayi (13,95 per 1.000 kelahiran hidup) menurun pada tahun 2005 menjadi 129 bayi (12,76 per 1.000 kelahiran). Menurunnya jumlah kematian bayi menunjukkan peningkatan pelayanan kesehatan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Angka Kematian Bayi ini lebih rendah (lebih bagus) dari pada kondisi AKB Provinsi Jawa Tengah sebesar 23,71 per 1.000 kelahiran hidup.

Status gizi balita pada tahun 2003 – 2005 di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan. Persentase gizi buruk pada tahun 2003 sebesar 2,83% mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 1,21%. Sedangkan persentase balita dengan BGM (Bawah Garis Merah) pada tahun 2000 – 2005 mengalami kenaikan. Pada tahun 2000 persentase BGM sebesar 0,88% meningkat pada tahun 2005 menjadi 1,07%.

Pelayanan imunisasi di Kabupaten Purworejo mulai tahun 2003-2005 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2003 Desa UCI sebesar 81,38% meningkat pada tahun 2005 menjadi 86%.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah endemis malaria di Jawa Tengah. Jumlah kasus malaria pada tahun 1999 – 2001 cenderung mengalami peningkatan, namun mulai tahun 2003 – 2005 mengalami penurunan. Pada tahun 1999 jumlah kasus malaria sebanyak 59.766 penderita mengalami peningkatan pada tahun 2001 menjadi 83.523 penderita dan mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 22.886 penderita.

Selain endemis malaria, Kabupaten Purworejo juga memiliki kasus DBD yang cukup tinggi dan menunjukkan peningkatan dari tahun 2003 – 2005. Pada tahun 2003 jumlah penderita DBD sebesar 1 orang, meningkat cukup tajam pada tahun 2005 yang mencapai 11 orang.

Kasus TB Paru masih tinggi di Kabupaten Purworejo dan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 jumlah penderita positif TB Paru sebesar 221 orang meningkat pada tahun 2005 menjadi 243 orang. Pada tahun 2005 persentase kesembuhan TB Paru hanya mencapai 34%. Rendahnya tingkat kesembuhan ini antara lain dikarenakan tidak teraturnya pasien dalam minum obat selama masa pengobatan enam bulan.

Jumlah penderita HIV AIDS di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2003 belum ditemukan kasus HIV AIDS baru pada tahun 2005 kasus ini ditemukan dengan jumlah kasus 9 orang. Kasus HIV AIDS merupakan

fenomena gunung es, walaupun dipermukaan tidak kelihatan atau ditemukan hanya sedikit namun tetap harus diwaspadai karena yang tidak terlihat atau tidak terdeteksi bisa jadi lebih banyak.

Peningkatan status kesehatan di Kabupaten Purworejo sangat tergantung pada peningkatan pelayanan kesehatan ke desa-desa. Jumlah Puskesmas pada tahun 2005 sebanyak 25 unit, dengan rincian Puskesmas Rawat Jalan sebanyak 17 unit, Puskesmas Rawat Inap sebanyak 8 unit dan PKD (Poliklinik Kesehatan Desa) sebanyak 159 unit, hal ini menunjukkan masih ada desa/kelurahan yang belum memiliki PKD. Sedangkan Pelayanan kesehatan rujukan dilayani oleh rumah sakit. Pada tahun 2005 jumlah rumah sakit sebanyak 6 unit, dengan rincian 3 unit RSUD dan 3 unit RSUD.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Purworejo apabila dibandingkan dengan rasio penduduk masih sangat kurang. Berikut ini data rasio tenaga kesehatan setiap 100.000 penduduk menurut Kepmenkes No 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 :

- 1) Rasio dokter spesialis adalah 8,07:100.000, kondisi ini memiliki kategori baik sekali karena kondisi ideal berdasarkan ketentuan rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk adalah 6 orang dokter spesialis.
- 2) Rasio dokter umum adalah 4,87:100.000, kondisi ini belum sesuai dengan kondisi ideal sebagaimana ditetapkan dalam Indonesia Sehat 2010 atau masih jauh dari kondisi ideal rasio dokter umum terhadap penduduk yaitu 40 orang dokter umum per 100.000 penduduk.
- 3) Rasio dokter gigi adalah 5:100.000, kondisi ini belum memenuhi syarat atau memiliki kategori kurang, hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan standar rasio dokter gigi adalah 11 orang per 100.000 penduduk.
- 4) Rasio perawat adalah 50,36 :100.000, kondisi ini belum memenuhi ketentuan atau memiliki kategori kurang, karena berdasarkan standar rasio tenaga kesehatan adalah 117,5 per 100.000 penduduk.
- 5) Rasio bidan adalah 41,90 : 100.000, kondisi ini belum sesuai dengan ketentuan atau memiliki kategori kurang, karena dalam standar rasio bidan terhadap penduduk adalah 100 orang per 100.000 penduduk.
- 6) Rasio tenaga kesehatan masyarakat adalah 3,94:100.000, kondisi ini masih jauh dari standar, karena sesuai dengan standar rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk adalah 40 orang per 100.000 penduduk.
- 7) Rasio tenaga apoteker adalah 1,08 : 100.000, kondisi termasuk kategori kurang atau bahkan jauh di bawah standar yaitu 10 orang per 100.000 penduduk.
- 8) Rasio ahli gizi adalah 3,2:100.000, kondisi termasuk kategori kurang karena berdasarkan ketentuan standar rasio ahli gizi terhadap penduduk adalah 20 orang per 100.000 penduduk.
- 9) Rasio ahli sanitasi lingkungan adalah 3,84:100.000, kondisi termasuk kategori kurang karena berdasarkan ketentuan standar rasio ahli sanitasi terhadap penduduk adalah 40 orang per 100.000 penduduk.

Prediksi

Pembangunan kesehatan 20 tahun ke depan hendaknya mendapat perhatian yang cukup serius, hal ini dikarenakan pada pertengahan pembangunan jangka panjang beberapa komitmen global akan dilakukan evaluasi capaiannya diantaranya adalah komitmen dalam Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*). Selain

itu pencapaian visi Indonesia Sehat 2010 harus tercapai semua indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu maka prediksi ke depan dalam pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan bayi

Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan bayi ini ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2025 hendaknya mampu mencapai posisi 115 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi mencapai 11,5 per 1.000 kelahiran hidup. Dalam rangka menunjang capaian tersebut diatas perlu ditingkatkan pelayanan kepada kesehatan ibu dan bayi. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten pada tahun 2025 harus mencapai 95%. Cakupan ibu hamil yang melaksanakan pemeriksaan K4 100%. Cakupan desa UCI juga harus mencapai 100%.

2. Menurunnya prevalensi gizi buruk pada balita

Pada tahun 2025 prevalensi gizi buruk pada balita turun menjadi < 1%.

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan

Pada tahun 2025 jumlah tenaga kesehatan diprediksikan mampu melayani kesehatan ke seluruh penjuru Kabupaten Purworejo. Selain itu juga sarana dan prasarana kesehatan meningkat kualitasnya. Seluruh puskesmas telah mendapat sertifikasi. Pada tahun 2025 seluruh desa siaga aktif melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit.

4. Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular.

Sesuai dengan komitmen *Millenium Development Goals* pada tahun 2015 prevalensi DBD, malaria, HIV/AIDS dan TB paru menurun setengahnya. Sehingga diprediksikan pada tahun 2025 prevalensi DBD diperkirakan hanya < 1 per 10.000 penduduk. Sedangkan prevalensi Malaria adalah 5 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2025 penemuan kasus TB Paru adalah 95%, dan kesembuhan TB Paru mencapai 90%.

5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada masyarakat meningkat persentasenya.

Pada tahun 2025 perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat diharapkan mengalami perubahan yang cukup baik. Cakupan jamban tercapai 85%, cakupan air bersih 90%, cakupan rumah tangga sehat sebesar 85%, dan cakupan rumah sehat sebesar 85%.

3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Keluarga Berencana

Pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 2005 jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo mencapai 769.056 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata per tahun dari tahun 2000 – 2005 sebesar 0,19%. Sampai dengan tahun 2005 pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo mampu dikendalikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk per tahun yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,84%.

Keberhasilan pelaksanaan program KB di Kabupaten Purworejo, dapat dilihat dari meningkatnya jumlah peserta KB baru dari tahun 2000 – 2005. Pada tahun 2000 jumlah peserta KB baru sebanyak 11.657 peserta meningkat pada tahun 2005 menjadi 11.939 peserta, meskipun jumlah peserta KB baru meningkat namun kondisi ini belum memenuhi target BKKBN yaitu bahwa setiap Kabupaten/Kota di Indonesia mampu merekrut peserta KB Baru sebesar 13.000 peserta setiap tahunnya.

Peserta KB baru banyak memilih alat kontrasepsi hormonal. Pada tahun 2005

jumlah peserta KB Baru yang menggunakan alat kontrasepsi suntik sebesar 6.459 peserta (55,40%), pil sebesar 1.778 peserta (15,60%) dan implant sebesar 1.867 peserta (28,90%).

Jumlah peserta KB aktif tahun 2000 – 2005 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2000 jumlah peserta KB Aktif sebesar 82.244 peserta meningkat pada tahun 2005 menjadi 92.852 peserta. Peserta KB aktif sebagian besar juga menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Pengguna alat kontrasepsi suntik memiliki persentase terbesar (43,58%) dibandingkan jenis lainnya.

Sedangkan jumlah peserta KB mandiri sedikit mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 jumlah peserta KB Mandiri sebesar 5.329 peserta meningkat pada tahun 2005 menjadi 6.328 peserta. Peserta KB Mandiri juga lebih senang memilih alat kontrasepsi hormonal terutama suntik (53,2%).

Partisipasi laki-laki dalam menggunakan alat kontrasepsi mulai terlihat. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kenaikan akseptor MOP dan Kondom baik pada peserta KB Baru, Aktif maupun Mandiri. Peserta KB Baru yang menggunakan MOP pada tahun 2000 sebanyak 35 peserta meningkat pada tahun 2005 menjadi 71 peserta. Pada peserta KB aktif jumlah pengguna MOP pada tahun 2000 sebanyak 1.698 peserta meningkat pada tahun 2005 menjadi 1.713 peserta. Hal ini disebabkan oleh banyaknya program pemerintah dalam peningkatan partisipasi laki-laki. Salah satu program yang ada adalah pembentukan Paguyuban Prio Utomo.

Peningkatan partisipasi peserta KB tidak lepas dari peran kader dan petugas KB. Di Kabupaten Purworejo jumlah kader kesehatan pada tahun 2005 sebanyak 494 orang, dan jumlah petugas KB sebanyak 156 orang. Sedangkan jumlah poliklinik pelayanan KB sebanyak 38 unit.

b. Keluarga Sejahtera

Keluarga miskin menurut BKKBN dibedakan menjadi 2 kategori yaitu keluarga sejahtera I dan keluarga pra sejahtera. Berdasarkan data yang ada jumlah keluarga miskin (pra sejahtera dan sejahtera I) dari tahun 2000 sampai 2004 mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 jumlah keluarga pra sejahtera sebesar 63.222 KK meningkat pada tahun 2005 menjadi sebesar 64.622 KK. Sedangkan jumlah keluarga sejahtera I pada tahun 2000 sebesar 39.333 KK meningkat pada tahun 2005 menjadi 42.651 KK.

Peningkatan kesejahteraan keluarga dibutuhkan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi tersebut adalah melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia. Jumlah kelompok BKB mengalami penurunan. Pada tahun 2001 jumlah kelompok BKB sebanyak 910 kelompok menurun pada tahun 2005 menjadi 670 kelompok. Sedangkan Jumlah BKR pada tahun 2001 sebesar 449 kelompok mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 356 kelompok. Jumlah kelompok BKL juga mengalami penurunan pada tahun 2005. Pada tahun 2001 kelompok BKL sebanyak 449 kelompok mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 368 kelompok.

Prediksi

a. Keluarga Berencana

Pembangunan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2025 diharapkan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk. Prediksi capaian indikator pembangunan

keluarga berencana adalah sebagai berikut: persentase peserta KB baru terhadap Peserta KB aktif mencapai 83% pada tahun 2010, 85,6% tahun 2015, dan 90% tahun 2025. Sedangkan untuk persentase peserta KB Aktif terhadap PUS pada tahun 2010 adalah 82,5%, tahun 2015 sebanyak 85%, tahun 2020 adalah 88,5% dan tahun 2025 sebanyak 90%. Persentase peserta KB Mandiri terhadap Peserta KB Aktif diprediksikan pada tahun 2010 adalah 58,1%, tahun 2015 sebanyak 60,2, tahun 2020 sebanyak 62,1% dan tahun 2025 sebanyak 64,4%. Dalam rangka meningkatkan partisipasi laki-laki dalam ber KB maka kelompok Prio Utomo jumlah anggotanya meningkat setiap tahunnya 0,1% per tahun.

b. Keluarga Sejahtera

Jumlah penduduk miskin yang dilihat dari indikator keluarga prasejahtera dan sejahtera I diprediksikan pada tahun 2025 mengalami penurunan dengan prediksi penurunan setiap tahun sebesar 1,5%. Artinya prediksi keluarga prasejahtera diharapkan pada jumlah 57.642 pada tahun 2010, 53.447 pada tahun 2015, 49.557 pada tahun 2020 dan 45.949 pada tahun 2025. Sedangkan untuk keluarga sejahtera I diharapkan pada jumlah 39.352 pada tahun 2010, 36.488 pada tahun 2015, 33.832 pada tahun 2020 dan 31.369 pada tahun 2025. Dalam rangka menurunkan jumlah keluarga prasejahtera (Pra KS) dan sejahtera I (KS I) perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitas kelompok bina balita, bina remaja dan bina lansia.

4. Ketenagakerjaan

Menurut Kantor BPS Purworejo, pada tahun 2005 jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas adalah sebesar 615.438 jiwa, jumlah angkatan kerja sebesar 421.615 jiwa. Dengan demikian TPAK pada 2005 sebesar 68,50%. Sementara itu, jumlah kasus ketenagakerjaan (atau perselisihan kerja) selama kurun waktu 2002 – 2005 meningkat, dari satu kasus pada tahun 2002 meningkat menjadi sebanyak 22 kasus pada tahun 2005.

Jumlah pencari kerja selama kurun waktu 2001 - 2005 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2001 jumlah pencari kerja sebanyak 20.389 orang, meningkat pada tahun 2002 menjadi sebanyak 25.106 orang. Pencari kerja pada tahun 2003 turun dibandingkan tahun 2002 yaitu menjadi sebesar 24.546 orang, namun pada tahun 2004 meningkat menjadi 25.311 orang dan tahun 2005 turun lagi menjadi 24.747 orang. Banyaknya jumlah pencari kerja mencerminkan masih banyaknya pengangguran.

Selama tahun 2004 -2005 sebagian besar penduduk Kabupaten Purworejo bekerja di sektor pertanian sebesar 41%, diikuti oleh sektor industri (19%), perdagangan, hotel dan restoran (18%) dan jasa-jasa sebesar 10%. Secara nasional kecenderungan perkembangan sektor industri dan perdagangan semakin meningkat, yang diharapkan akan nbanyak menyerap tenaga kerja baru. Kondisi ini akan menurunkan proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas). Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor industri dan perdagangan menunjukkan pula semakin baiknya pendidikan dan keterampilan SDM yang memasuki pasar kerja.

Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan oleh Pemkab/ Pemprov selama ini masih lebih rendah dari kebutuhan hidup layak (KHL). Secara absolut memang nilai upah minimum meningkat terus, dari Rp 153.000,00 per bulan pada 1999 menjadi sebesar Rp 410.000,00 pada tahun 2005. Jumlah UMK rata-rata hanya 84,29% dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.

Kecelakaan kerja terjadi rata-rata 37 kali per tahun. Jumlahnya berfluktuasi dari tahun ke tahun, sehingga sulit untuk diprediksi situasi ke depan, yang tertinggi adalah pada 2004 (52 kali) dan yang terendah pada 2006 (22 kali). Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja yang tanpa mengalami kecelakaan kerja (zero accident) masih belum tercapai.

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah berusaha untuk memfasilitasi warganya untuk mencari kerja di tempat lain. Dari 2001 hingga 2005 rata-rata tiap tahunnya 6,33% dari pencari kerja yang bekerja dalam program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) ini. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui program AKAD pada tahun 2004 sebesar 1.542 orang, pada tahun 2005 turun menjadi sebesar 940 orang.

Tempat kerja di luar negeri juga penting untuk mensejahterakan rakyat. Dari 2003 hingga 2005 ada rata-rata 413 orang tiap tahun berangkat kerja ke luar negeri. Jumlah keberangkatan sangat fluktuatif, dari 22 orang pada 2005 hingga 1040 orang pada 2006. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sebagian besar ke Malaysia (93%), dan sisanya (7%) berturut-turut ke Taiwan, Singapura, Korea, Arab Saudi dan Hongkong.

TKI memberikan nafkah bagi keluarga-besarnya di rumah, kiriman mereka tiap tahun sangat berarti bagi keluarga masing-masing. Rata-rata tiap tahun ada Rp 17,68 milyar uang yang dikirim oleh TKI ke Purworejo. Jumlah uang yang dikirimkan TKI Purworejo ke daerahnya pada 2004 sebesar Rp 21,12 milyar, dan menurun pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp 20,13 milyar.

Prediksi

Dalam perencanaan di bidang ketenagakerjaan perlu memperhatikan banyak aspek pendukung yang terkait dengan SDM tenaga kerja dan lapangan usaha. Harapannya, tahun 2025 APAK bisa mencapai 90% atau bahkan 100%, artinya *full employment*. Jadi ada selisih 21,5% (yaitu 68,50% di tahun 2007) merupakan tantangan bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengelolanya. Perselisihan perburuhan sampai dengan tahun 2025 semakin menurun sejalan dengan meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban pekerja.

Kecelakaan kerja juga perlu diantisipasi hingga 2025, Pemkab perlu terus-menerus melakukan tindakan untuk mencapai *zero accident*. Banyaknya tenaga kerja juga berpotensi besar terhadap calon TKI. Harapan pada 2025 adalah, bahwa semakin banyak TKI yang berangkat melalui mekanisme AKAN secara legal dan aman. Dari segi jumlah, maka diharapkan ada 3.000-an orang per tahun bekerja ke luar negeri (AKAN) maka lebih banyak TKI yang berangkat, dan uang yang terkirim ke rumah bisa mencapai lebih kurang sebesar Rp. 100 milyar per tahun.

5. Kependudukan Catatan Sipil

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu tahun 2000-2005 sebesar 0,19%, termasuk kategori pertumbuhan penduduk rendah. Angka pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 0,43% dan angka pertumbuhan penduduk terendah pada tahun 2005 yaitu -0,49%.

Selanjutnya apabila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk perempuan selama kurun waktu 5 tahun lebih besar dibandingkan rata-rata jumlah penduduk laki-laki. Hasil perhitungan *sex ratio* atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan diperoleh angka rata-rata *sex ratio* tahun 2000- 2005 sebesar 96,87 angka tersebut

menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan yang cukup besar antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan.

Berdasarkan data jumlah penduduk usia produktif dan non produktif dapat diketahui bahwa rata-rata angka beban tanggungan atau rasio ketergantungan (*dependency ratio*) selama 5 tahun terakhir sebesar 40,56%. Artinya, bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Purworejo harus menanggung 41 orang penduduk non produktif. Angka tersebut menggambarkan bahwa beban tanggungan terhadap penduduk usia produktif relatif rendah, dengan kondisi tersebut diharapkan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun mendatang akan lebih baik.

Terkait dengan kesadaran penduduk untuk selalu tertib administrasi kependudukan antara lain setiap keluarga memiliki kartu keluarga menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, rata-rata pertumbuhan jumlah Kartu Keluarga (KK) selama kurun waktu 5 tahun sebesar 96,23%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan khususnya kepemilikan KK perlu ditingkatkan lagi baik sosialisasi maupun peningkatan pelayanan pengurusan KK. Sedangkan Jumlah penduduk yang mengurus KTP selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan yang sangat besar terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 799,00% jika dibandingkan dengan tahun 2002. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP perlu ditingkatkan dan perlu ada upaya-upaya proaktif dari dinas terkait untuk meningkatkan sosialisasi dan pelayanan administrasi kependudukan khususnya KTP.

Rata-rata pertumbuhan kepemilikan akte kelahiran selama 5 tahun (2000-2005) sebesar 18,37 angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 77,63. Disamping masyarakat tertib dalam mengurus akte kelahiran, pengurusan akte perkawinan rata-rata pertumbuhan selama sebesar 3,73% dengan angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 16,08% dan angka pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar -15,66%.

Upaya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di masa mendatang semakin ditingkatkan, hal ini sejalan dengan peningkatan pelayanan yang mengarah pada sistem pencacatan dokumen kependudukan secara terpadu (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/SIAK).

Prediksi

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo selama 10 tahun terakhir (1999-2008) yaitu sebesar 0,41%, maka dapat diprediksi angka pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2025. Perhitungan angka prediksi penduduk berangkat dari jumlah penduduk terakhir yaitu tahun 2008, jumlah penduduk tahun 2008 sebanyak 843.001 jiwa, dengan angka rata-rata pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir sebesar 0,41%, maka prediksi jumlah penduduk tahun 2010 diprediksi sebanyak 849.928 jiwa, selanjutnya jumlah penduduk pada tahun 2015 diprediksi sebanyak 894.610 jiwa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo diprediksi sebanyak 941.641 jiwa dengan dan tahun 2025 sebanyak 991.145 jiwa. Beberapa asumsi yang mendasari meningkatnya jumlah penduduk tersebut antara lain: meningkatnya pelayanan kesehatan memberikan dampak meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, dengan masyarakat sehat maka usia harapan hidup masyarakat semakin meningkat, disisi lain angka kelahiran dan penduduk yang datang dari daerah lain ke Kabupaten Purworejo tiap tahun bertambah. Fenomena tersebut memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun yang akan datang.

Dengan angka prediksi penduduk di Kabupaten Purworejo sampai dengan tahun 2025 tersebut dapat menjadi dasar/masukan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan masalah penduduk maupun masalah lain seperti kebijakan perluasan dan kesempatan kerja, kebijakan perumahan, transportasi, pendidikan dan sarana prasarana dasar bagi masyarakat.

6. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Purworejo dari tahun 2000–2005 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2000 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang tercatat di Kabupaten Purworejo adalah 8.333 orang meningkat pada tahun 2005 menjadi 75.203 orang . Pada tahun 2000 kategori PMKS yang tercatat hanya penyandang cacat, lanjut usia yang terlantar, tuna susila, pengemis dan gelandangan. Pada tahun 2000 jumlah penyandang cacat mencapai 5.723 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 2.432 orang, tuna susila sebanyak 70 orang, pengemis sebanyak 54 orang dan gelandangan sebanyak 54 orang. Sedangkan jumlah PMKS pada tahun 2005 semua kategori telah tercatat. Kategori PMKS terbanyak adalah fakir miskin sebanyak 53.226 orang.

Meningkatnya jumlah PMKS masih belum seimbang dengan meningkatnya sarana dan prasarana penyelesaian PMKS. Tetapi dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial Kabupaten Purworejo telah memiliki panti sosial sejumlah 7 unit pada tahun 2005. Jumlah PMKS yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2000 jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 539 orang, turun pada tahun 2005 menjadi 115 orang. Namun demikian pada tahun 2001 jumlah PMKS yang ditangani mencapai 1.290 orang.

Pemecahan permasalahan sosial kemasyarakatan cukup rumit, karena jumlahnya cukup besar dan saling tumpang tindih antara kemiskinan, kerentanan, cacat, penyakit kronis dan penyakit menular, serta korban NAPZA dan anak-anak terlantar. Masalah-masalah tersebut mengharuskan adanya fasilitasi penanganan secara terpadu, terintegrasi, berkelanjutan serta profesional. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan mengembalikan martabat kemanusiaan menjadi perhatian utama dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, antara lain dapat dilakukan melalui bantuan pemenuhan kebutuhan pokok, jaminan perlindungan dan fasilitasi penampungan bagi PMKS, dengan harapan kehidupan mereka dapat lebih baik dan bermartabat.

Prediksi

Departemen sosial telah menyusun standar pelayanan minimal dalam pembangunan bidang sosial melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008. Sehingga pembangunan bidang sosial harus mengacu pada capaian SPM tersebut. Begitu pula dengan pembangunan bidang sosial di Kabupaten Purworejo diprediksikan dengan melihat pada standar pelayanan yang ada. Berikut ini prediksi 20 tahun ke depan pembangunan bidang sosial:

- 1) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 80%;
- 2) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar 80%;
- 3) Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasana pelayanan kesejahteraan sosial 80%;

- 4) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial 60%;
- 5) Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 80%
- 6) Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana selama masa tanggap darurat sebesar 80%.
- 7) Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 40%;

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Purworejo sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan berwawasan gender tahun 2005 sebesar 60,2 (nilai terendah 40 dan tertinggi 80). IPG Kabupaten Purworejo masih lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah sebesar 63,7. Keberhasilan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender juga diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan skor antara 40 terendah dan tertinggi 80. Nilai IDG Kabupaten Purworejo tahun 2005 sebesar 54,8. Jika dibandingkan dengan rata-rata IDG Provinsi Jawa Tengah (tahun 2005) sebesar 56,9 maka IDG Kabupaten Purworejo lebih rendah. Meskipun perkembangan IDG selama dua tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang cukup baik, namun masih lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik dan kualitas angkatan kerja perempuan sehingga perlu ditingkatkan.

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan menunjukkan kecenderungan yang meningkat, yaitu pada tahun 2004 sebanyak 9 kasus dan tahun 2005 menjadi 17 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 14 kasus. Namun masalah kekerasan gender merupakan "*fenomena gunung es*", dimana kasus yang dilaporkan lebih kecil daripada yang terjadi. Sehingga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar dilaksanakan desiminasi tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga maupun tempat kerja semakin ditingkatkan.

Berdasarkan struktur kelompok umur, diketahui penduduk Kabupaten Purworejo termasuk kategori muda, banyaknya penduduk kelompok umur 0 -18 tahun (termasuk anak-anak) tahun 2005 cukup besar (30,47%) dari jumlah penduduk sebanyak 769.056 jiwa. Proporsi anak laki-laki lebih besar yaitu sebanyak 120.127 jiwa (50,64%) dan lainnya anak perempuan 117.114 jiwa (49,36%) yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan pendidikan dan kesehatan bagi peningkatan kualitas generasi mendatang.

Terdapat kecenderungan rata-rata pendidikan anak perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pada anak usia sekolah (7- 18 tahun) lama tahun sekolah anak laki-laki lebih baik daripada anak perempuan. Hal ini diketahui dari lama sekolah anak laki-laki sebesar 7 tahun dan perempuan selama 6 tahun. Hal ini dapat dimengerti karena budaya patriarki yang masih kuat mengakar dalam masyarakat, bahwa menyekolahkan anak laki-laki lebih diprioritaskan dibandingkan menyekolahkan anak perempuan.

Prediksi

Laporan Pelaksanaan Komisi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) tahun 2007 kepada PBB dari Indonesia yang mendapatkan pujian dari PBB karena prestasi peningkatan yang baik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meningkat secara signifikan. Berdasarkan laporan Pencapaian Target

MDGs terakhir tahun 2007 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dimasa semakin mendapatkan perhatian melalui program-program pembangunan daerah yang responsif gender. Dukungan kebijakan pengarusutamaan gender secara nasional sebagaimana diatur dengan Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat meningkatkan pula pendidikan, kesehatan dan partisipasi politik. dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak, sehingga kualitas sumberdaya manusia dan generasi muda lebih baik. Upaya meningkatkan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan dalam bidang politik sebesar 30% semakin diupayakan melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) dan kesadaran politik. Sehingga kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dicapai dalam waktu 20 tahun mendatang. Sistem sosial dalam masyarakat di masa mendatang semakin demokratis dan partisipasi masyarakat.

Upaya meningkatkan kualitas generasi muda dalam pembangunan, maka peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan tumbuh kembang dan perlindungan anak semakin diperhatikan sebagaimana amanat UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Fasilitas pemerintah dalam peningkatan tenaga kesehatan di perdesaan melalui Pos Kesehatan Desa dan Bidan Desa, Peningkatan Gerakan Sayang Ibu dan fasilitas Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Ramah Anak sangat mendukung bagi kebijakan peningkatan kualitas generasi muda di masa mendatang.

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Purworejo sebanyak 469 desa dan 25 kelurahan. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat maka di setiap desa/kelurahan dibentuk RT dan RW. Jumlah RT diseluruh Kabupaten adalah 4.687 buah dan jumlah RW/Dusun sebanyak 1.769 buah.

Pengembangan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan seperti LPMD/K dan PKK dimasa mendatang perlu ditingkatkan agar peran dan fungsinya lebih optimal. Demikian pula dengan upaya pengembangan kelompok-kelompok swadaya masyarakat baik yang dibentuk secara mandiri, dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat maupun dibentuk melalui program-program pembangunan, seperti : UPPKS (BKKBN), BKM (PNPM Mandiri) kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan PKK, Karang Taruna dan kelompok lain perlu direvitalisasi mengingat fungsinya yang sangat strategis bagi peningkatan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), kesehatan, pelestarian lingkungan dan usaha ekonomi produktif di perdesaan. Fasilitas dan pembinaan kelembagaan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan kalangan dunia usaha melalui program *corporate social responsibility (CSR)* baik BUMN/BUMD dan swasta. Jumlah LSM di Kabupaten Purworejo meningkat pesat sejak 2005, yakni menjadi 17 buah dari jumlah LSM tahun 2000 hanya 4 buah. Hal ini merupakan gejala yang baik dari pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Kondisi untuk menuju peningkatan demokrasi desa sebenarnya sudah tersedia, yakni adanya BPD yang relatif berkualitas. Sejak tahun 2005 sebanyak 766 orang

pengurus BPD yang bergelar sarjana, sementara lulusan SLTA dua sampai tiga orang (rata-rata 2,69 orang).

Sementara itu, pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan penguasaan teknologi tepat guna, keterampilan (*life skills*) terintegrasi dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing desa/kelurahan. Jumlah program-program pembangunan yang masuk ke perdesaan sejak tahun 2003 berjumlah 4 buah, meningkat menjadi 8 buah pada tahun 2005, baik yang berupa jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai, Beras Bagi Masyarakat Miskin, maupun dana stimulan bagi pengembangan kegiatan usaha produktif melalui PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan.

Prediksi

Pembangunan masyarakat dan desa, dimana mendatang akan semakin penting dan strategis, mengingat masalah kemiskinan, ketertinggalan dan kurangnya prasarana dan sarana masih banyak dialami masyarakat desa. Upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia di perdesaan akan mengurangi kesenjangan perkembangan desa-kota, sehingga urbanisasi ke kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa akan semakin berkurang.

Pembangunan perdesaan di masa mendatang akan semakin banyak bertumpu pada partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan secara swadaya. Wadah kelembagaan secara swadaya dalam pembangunan menjadi sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, penguasaan teknologi tepat guna, peningkatan akses modal dan sarana partisipasi politik dalam pembangunan di masa mendatang.

9. Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Purworejo, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2004 jumlah organisasi pemuda sebanyak 511 organisasi, tahun 2005 terdapat 513 organisasi pemuda. Sedangkan jumlah organisasi Karang Taruna tahun 2005 sebanyak 304 organisasi yang terbagi atas 166 organisasi yang tumbuh pasif, berkembang aktif sebanyak 86 organisasi, maju aktif sebesar 24 organisasi, dan aktif rekreatif mandiri sebesar 4 organisasi.

Tahun 2005 Kabupaten Purworejo mulai menunjukkan kemajuannya dalam bidang olahraga, Kabupaten Purworejo peringkat 21 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam pekan olahraga Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo berhasil meraih 8 emas 9 perak 13 perunggu. Jumlah prasarana dan sarana olah raga di Kabupaten Purworejo tahun 2005 sebanyak 124 unit sarana olahraga.

Pembangunan kepemudaan diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan manajemen, wawasan dan kreativitas pemuda, pengembangan kemitraan dan kewirausahaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keimanan ketaqwaan. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dengan memfasilitasi aktivitas kepemudaan baik lintas internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Upaya yang ada dengan mengadakan pertukaran pemuda antar kabupaten. Pembinaan dan pengawasan yang berupa koordinasi dilakukan meliputi antar dinas instansi terkait maupun dengan lembaga non pemerintah.

Kondisi keolahragaan di Kabupaten Purworejo relatif maju, terutama di bidang bulu tangkis dan atletik. Pembangunan bidang olah raga secara kuantitas kelembagaan organisasi olah raga menunjukkan peningkatan. Selama tahun 2000-2005 prestasi

olahraga di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan. Jumlah cabang olah raga bertambah sebanyak 15 cabang olah raga, dengan cabang olah raga unggulan sebanyak 7 cabang yaitu Sepak Bola, Senam, Atletik, Sepak Takraw, Catur, Wushu, dan Panjat Tebing.

Sesuai dengan tujuan pembinaan olahraga di Kabupaten Purworejo belum dapat diselenggarakan secara optimal terbukti masih sedikitnya atlet berprestasi yang berasal dari Kabupaten Purworejo dalam percaturan ti tingkat provinsi dan nasional. Peningkatan jumlah organisasi olah raga belum diimbangi dengan peningkatan prestasi yang dicapai. Kondisi ini dapat ditingkatkan melalui pembibitan, pembinaan, dan pemanduan bakat yang terarah dan berkesinambungan, yang disertai dengan penyediaan fasilitas sarana prasarana olahraga yang memadai yang dimiliki Kabupaten Purworejo. Selain itu peningkatan profesionalisme manajemen organisasi olah raga daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat juga terus dibina. Namun demikian masalah pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olah raga masih menghadapi permasalahan, antara lain minat masyarakat khususnya generasi muda untuk mengembangkan prestasi olah raga masih rendah, kualitas atlet masih rendah serta terbatasnya pemandu bakat olah raga.

Prediksi

Pada kurun waktu sampai dengan tahun 2025, kalau tidak ada akselerasi dalam pembinaan pemuda dan olahraga, maka kondisi kepemudaan dan olahraga semakin terpuruk. Diprediksikan sampai dengan kondisi kepemudaan dan olahraga akan stagnan. Prestasi yang diprediksikan akan meningkat adalah atletik (khususnya lari) dan sepakbola, yaitu masuk Divisi I PSSI. Sedangkan perkembangan kepemudaan akan mengalami penurunan khususnya yang bersifat non agamis dan politis. Banyak organisasi seperti karang taruna menjadi tidak aktif. Dibutuhkan upaya yang lebih keras pada tahun-tahun mendatang sampai dengan tahun 2025 untuk meningkatkan kegiatan kepemudaan. Sama halnya dibutuhkan upaya pembibitan dan pembinaan lebih serius dan mengarah pada prestasi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

10. Pariwisata

Berdasarkan data tahun 1999–2005 jumlah pengunjung obyek wisata di Kabupaten Purworejo menunjukkan penurunan rata-rata 15 % per tahun. Pada tahun 1999 jumlah pengunjung sebanyak 202.018 wisatawan nusantara, yang mengunjungi 8 obyek wisata di Kabupaten Purworejo. Pada tahun 2005 jumlah pengunjung obyek wisata sebanyak 116.815 orang. Pada tahun 2005 jumlah wisatawan Mancanegara mencapai 125 pengunjung. Menurunnya jumlah wisatawan di Kabupaten Purworejo disebabkan antara lain oleh adanya isu gangguan keamanan dan masih lemahnya pengelolaan pariwisata di Kabupaten Purworejo serta minimnya jumlah asosiasi pendukung kegiatan pariwisata. Pada tahun 2005 jumlah asosiasi dimaksud hanya 1 unit, kegiatan pameran wisata 1 kali dalam setahun dan promosi wisata hanya rata 3 kali dalam setahun.

Kabupaten Purworejo hingga tahun 2005 memiliki 8 obyek wisata, yang menjadi unggulan di Kabupaten Purworejo adalah Kawasan Geger Menjangan, merupakan kawasan wisata alam, obyek utama yang banyak dinikmati pengunjung adalah pemandangan keindahan Kota Purworejo dan Pantai Selatan dipandang dari ketinggian puncak bukit. Lokasi taman wisata Geger Menjangan terletak di timur laut Kota Purworejo termasuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo, berjarak hanya satu kilometer dari pusat kota.

Selain wisata pegunungan, Kabupaten Purworejo juga memiliki obyek wisata pantai yaitu pantai Pasir Puncu, Ketawang dan Pantai Jatimalang. Pantai Pasir Puncu, Ketawang dan Pantai Jatimalang berada pada dua puluh dua kilometer dari Kota Purworejo atau sebelas kilometer dari Kota Kecamatan Kutoarjo ke arah selatan, terletak di wilayah desa Hardjobinangun, Ketawang Kecamatan Grabag dan Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi. Kawasan ini memiliki pesona dengan panorama Pantai Laut Selatan yang menarik dan menawan. Wisatawan di Pantai Pasir Puncu di samping dapat menikmati keindahan pantai juga dapat menikmati wisata air, dengan naik perahu tempel ke muara sungai Jali. Sedangkan di Ketawang dapat menikmati Ikan bakar.

Selain itu wisata lain yang menjadi andalan adalah Museum Tosan Aji yang berada di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, museum ini merupakan salah satu sarana untuk melestarikan warisan budaya nenek moyang yang terdiri dari keris, pedang, kudi cundrik. Tosan Aji diartikan masyarakat sebagai senjata terbuat dari logam /besi yang mempunyai daya magis menurut sekelompok masyarakat terutama pada masa lampau.

Obyek wisata menarik lainnya adalah Bedug Kyai Bagelen yang terletak di Masjid Agung Kota Purworejo. Bedug ini sangat istimewa karena memiliki diameter sebesar 194 cm dan panjang 292 cm. Bedug ini merupakan peninggalan Bupati KRT Cokronegoro I, diperkirakan dibuat pada tahun 1834.

Dalam rangka menunjang pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo perlu didukung oleh sarana dan prasarana pariwisata salah satunya adalah hotel. Dari tahun 2002 – 2005 Kabupaten Purworejo hanya memiliki hotel dengan kelas Melati. Jumlah hotel melati dari tahun 1999 – 2005 sebanyak 11 unit dengan tingkat hunian yang mengalami peningkatan. Jumlah pengunjung hotel tersebut pada tahun 2002 sebanyak 40.145 orang meningkat pada tahun 2005 menjadi 43.639 orang.

Prediksi

Pada tahun 2025 perkembangan pariwisata diprediksikan meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pada masa mendatang perhatian Kabupaten Purworejo terhadap urusan pariwisata semakin besar. Pembangunan sarana dan prasarana semakin baik, sehingga banyak wisatawan domestik atau nusantara dan wisatawan mancanegara berkunjung ke Kabupaten Purworejo. Jumlah kunjungan wisata baik wisatawan nusantara dan mancanegara sejak tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2008. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan nusantara diprediksikan sebesar 160.000 orang dan wisatawan mancanegara sebesar 130 orang. Pada tahun 2020 wisatawan mancanegara nusantara meningkat menjadi sebesar 190.000 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 150 orang dan pada tahun 2025 diprediksikan menjadi sebesar 210.000 orang wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara sebesar 200 orang.

Pada tahun 2025 obyek wisata unggulan mengalami perbaikan sarana dan prasarana, dan daya tarik obyek wisata unggulan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan pendapatan daerah potensial adalah melalui peningkatan pendapatan sektor pariwisata dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain.

11. Kebudayaan

Kabupaten Purworejo memiliki banyak kekayaan seni dan budaya yang muncul dari karakteristik masyarakat yang beragam. Kesenian yang ada di Kabupaten Purworejo antara lain kesenian tradisional yaitu Kuda Kepang/Kuda Lumping, Prajurit/ Cingpoling, Rebana, Sholawatan, Campursari, Dholalak, Kethoprak dan Kubro Siswa. Kelompok kesenian antara lain Keroncong, Orkes Melayu, Madyo Pitutur, Ande-ande Lumut, Teater, dan Wayang orang serta Cekok Mondol. Selain kelompok seni tradisional dan kelompok

kesenian, di Kabupaten Purworejo juga terdapat sanggar musik dan seni antara lain Sanggar Musik, Sanggar Tari, Sanggar Rupa/ Lukis, Karawitan, Sanggar Sinden, Seni Pedalangan/Wayang Kulit, Kesenian tersebut merupakan aset budaya dan kekayaan Kabupaten Purworejo. Jumlah kelompok kesenian keseluruhan pada tahun 2005 sebanyak 261 kelompok yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo.

Selain itu terdapat peninggalan sejarah yang tersebar di masyarakat antara lain Lingga, Yoni, Stupa, Prasasti, Menhir, Lumpang batu, Batu dakon, Umpak batu, Batu bata, Tihang batu, Bedug Kyai Bagelen, Gamelan, Buku/Naskah Kuno, Gundukan Tanah/Punden Perundak, Goa, Tatah batu, Kapak batu, Kreweng, Sumur beji, Petilasan.

Kabupaten Purworejo juga memiliki keragaman budaya meliputi Sedekah Bumi/Merti Desa, Larungan, dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Purworejo. Untuk memperkaya dan memperkenalkan keragaman budaya Kabupaten Purworejo pernah mengirimkan duta-duta kebudayaan baik luar daerah, tingkat nasional, dan mancanegara.

Prediksi

Pembangunan kebudayaan pada tahun 2025 diprediksikan akan mengalami penguatan. Kebudayaan berupa kesenian tradisional semakin memperoleh perhatian baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Tradisi yang sudah menjadi budaya juga memperoleh perhatian pemerintah daerah. Kegiatan yang bersifat tradisi dan mengakar dalam masyarakat seperti : Hari jadi Kabupaten Purworejo tetap dipertahankan.

12.Ketransmigrasian

Dalam pengiriman transmigran ke luar Jawa, dari Kabupaten Purworejo dari tahun 1999-2005 rata-rata diberangkatkan sebanyak 33 keluarga per tahun dengan jumlah peserta sebanyak 122 jiwa. Pemberangkatan terbanyak terjadi pada tahun 2003, yakni mencapai sebanyak 177 keluarga. Pada 2005 diberangkatkan sebanyak 43 keluarga. Selama ini tidak pernah ada keluarga yang pulang karena tidak kerasan, kecuali pada pemberangkatan massal tahun 2003 itu, terdapat sebanyak 11 keluarga (6,21%) yang memilih untuk pulang kembali ke Purworejo.

Hal ini kiranya mengindikasikan bahwa pelatihan-pelatihan yang dipersiapkan untuk para calon transmigran cukup memadai dan memberikan bekal untuk berkarya di daerah baru. Motivasi mereka cukup tinggi (karena kemiskinan), dan persiapan serta penerimaan oleh pemerintah daerah tujuan juga cukup baik. Untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan, ada baiknya pelatihannya ditambah, dari yang selama ini berupa pelatihan tukang batu, kayu dan mebel serta pertanian, perlu ditambah dengan pelatihan seni dan bisnis.

Prediksi

Perkembangan transmigrasi dimasa mendatang tidak cukup pada kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan, tetapi lebih memiliki keterkaitan dengan perkembangan industri di daerah baru. Sehingga tenaga kerja yang dikirimkan harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industrialisasi.

Pelaksanaan transmigrasi di masa mendatang peran pemerintah daerah sebagai fasilitator yang mempertemukan dua kepentingan yaitu tenaga kerja terampil yang

membutuhkan pekerjaan dan perusahaan/ industri yang membutuhkan tenaga terampil dari Kabupaten Purworejo.

F. Kondisi Perekonomian

1. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berkembang dengan baik di Kabupaten Purworejo. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan terbesar ketiga dalam PDRB Kabupaten Purworejo, rata-rata sebesar 16,84% dari tahun 2000 – 2005. Perdagangan dibagi menjadi tiga (3) kategori yaitu perdagangan skala besar, perdagangan skala menengah dan perdagangan skala kecil. Jumlah pedagang di Kabupaten Purworejo tahun 2005 jumlah pedagang skala besar sebanyak 33 orang, pedagang skala menengah sebanyak 83 orang, dan pedagang skala kecil sebanyak 1.954 orang.

Jumlah prasarana dan sarana perekonomian daerah, antara lain pasar tradisional (tahun 2005) sebanyak 27 unit pasar secara merata tersebar di masing-masing kecamatan. Jumlah toko serba ada sebanyak 11 unit yang menyediakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, terdapat lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank. Bank umum yang terdapat di Kabupaten Purworejo adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Danamon, dan beberapa bank perkreditan rakyat (BPR) yang dikelola secara umum maupun secara syariah. Pasar tradisional sangat berperan dalam pengembangan perekonomian daerah, mengingat lebih dari 65% penduduk melakukan transaksi ekonomi di pasar-pasar tradisional di seluruh kecamatan.

Jumlah pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan baik perdagangan kecil maupun menengah secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang cukup baik, terutama pertumbuhan jumlah pedagang kecil meningkat dari tahun 2000 sebanyak 489 unit usaha meningkat menjadi sebanyak 1.954 unit usaha (berdasarkan SIUP), terutama pedagang di pasar-pasar tradisional. Meningkatnya jumlah aktivitas perdagangan menengah cukup baik, meningkat dari sebanyak 4 unit usaha tahun 2000 pada tahun 2005 meningkat menjadi sebanyak 83 unit usaha dan perdagangan besar dari sebanyak 3 unit tahun 2000 meningkat menjadi 33 unit pada tahun 2005, meningkat cukup baik. Meningkatnya kegiatan usaha perdagangan di Kabupaten Purworejo antara lain didukung oleh stabilitas politik nasional, menurunnya suku bunga kredit dan membaiknya nilai tukar rupiah dengan valuta asing (rata-rata dibawah Rp. 9.500 untuk US \$ 1,00).

Prediksi

Seiring dengan ketersediaan fasilitas pendukung perdagangan yang semakin meningkat, sampai dengan tahun 2025 diperkirakan aktivitas perdagangan akan semakin meningkat dimasa mendatang. Jumlah pedagang skala kecil sejumlah 2.875 pada tahun 2006 diprediksikan akan mencapai 6.560 pada tahun 2010, 11.165 pada tahun 2015, 15.771 pada tahun 2020 dan 20.376 pada tahun 2025. Pedagang skala menengah sebanyak 141 pada tahun 2006 diprediksikan akan menjadi 374 pada tahun 2010, 665 pada tahun 2015, 975 pada tahun 2020 dan 1.248 pada tahun 2025. Demikian juga untuk pedagang skala besar 58 pada tahun 2006 diprediksi akan menjadi 160 pada tahun 2010, 287 pada tahun 2015, 414 pada tahun 2020 dan 541 pada tahun 2025. Namun demikian perkembangan jumlah pedagang tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan peningkatan sektor ekonomi lainnya, sehingga perlu juga diantisipasi mengenai regulasi dan tata kelola yang baik dalam menyikapinya.

Perkembangan infrastruktur perdagangan khususnya pasar di Kabupaten Purworejo diprediksi relatif tetap sampai dengan tahun 2025. Jumlah pasar induk dan sentra perkulakan tetap, sedangkan jumlah pasar tradisional diprediksi akan bertambah dari 27 pasar pada tahun 2010 menjadi 29 pasar pada tahun 2025. Perkembangan relatif besar terjadi untuk jenis retail (pasar swalayan) yang diprediksi meningkat dari 11 pada tahun 2006 menjadi 21 pada tahun 2010, 33 pada tahun 2015, 45 pada tahun 2020 dan 58 pada tahun 2025.

Walaupun demikian, sektor perdagangan menghadapi beberapa tantangan diantaranya semakin meningkatnya persaingan global sejalan dengan berlakunya perdagangan bebas. Pada masa mendatang perekonomian Kabupaten Purworejo akan semakin terbuka, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh pada perkembangan perekonomian daerah, terutama masuknya komoditas pertanian (bahan pangan, buah-buahan dan sayur mayur) murah karena subsidi dan politik daumping. Pemerintah daerah harus melindungi komoditas lokal yang diproduksi oleh petani kecil dan produk lokal dari serbuan komoditas impor di pasar lokal. Produk-produk dari luar negeri akan sangat mudah masuk ke Indonesia dan bersaing dengan produk-produk buatan dalam negeri sesuai dengan kesepakatan dalam *AFTA*, *NAFTA* dan *World Trade Organization (WTO)*. Oleh karena itu, sektor perdagangan di Kabupaten Purworejo berkembang dengan baik diperlukan dukungan sektor industri dalam penciptaan produk-produk yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta fasilitasi pengembangan sarana perekonomian daerah.

2. Industri

Industri di Kabupaten Purworejo terdiri atas industri menengah dan industri kecil, yang dapat dikelompokkan menjadi industri pengolahan, industri logam, mesin, dan elektronika, industri kimia dan kertas, industri tekstil dan aneka, serta industri argo dan pengolahan hasil hutan. Banyaknya industri menengah untuk kelompok industri pengolahan dari tahun 2000-2005 sebanyak 16 unit dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 7.026 orang, atau rata-rata setiap unit menyerap 120 – 400 orang. Banyaknya industri kecil di Kabupaten Purworejo pada tahun 2005 sebanyak 15.979 unit dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 30.655 orang, atau rata-rata setiap unit menyerap 2 – 3 orang pekerja.

Untuk kelompok industri logam, mesin, dan elektronika terdapat 1 industri menengah dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 28 orang, dan untuk industri kecil dari tahun 1999-2006 terdapat 148 unit dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 635 orang, atau setiap unit rata-rata menyerap sebanyak 15 – 40 orang.

Untuk kelompok industri kertas dan kimia dari tahun 2000 - 2004 jumlah industri menengah sebanyak 2 industri dengan 40 orang pekerja, meningkat pada tahun 2005 menjadi 3 unit industri dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 90 orang. Untuk kelompok industri Tekstil dan Aneka Industri di Kabupaten Purworejo terdapat 2 unit industri menengah dengan jumlah pekerja 1.026 orang, atau rata-rata menyerap sebanyak 400 – 560 orang. Banyaknya industri kecil sebanyak 6.134 unit dengan jumlah tenaga kerja yang terserap rata-rata setiap unit sebanyak 3 – 10 orang.

Untuk kelompok agro industri dan pengolahan hasil hutan tahun 1999 - 2004 terdapat 6 unit industri menengah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.106 orang. Namun pada tahun 2005 menurun menjadi 5 unit industri dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 748 orang, atau rata-rata setiap unit mempekerjakan sebanyak 120 – 150 orang.

Jumlah industri kecil terbanyak di Kabupaten Purworejo adalah pengolahan makanan, pengolahan hasil pertanian, dan pembuatan batubata serta kerajinan. Banyaknya industri yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2000–2005 adalah industri anyaman bambu meningkat dari sebanyak 2.741 unit pada tahun 2002 dan meningkat menjadi 5.048 unit pada tahun 2005 yang dapat dijadikan sebagai industri andalan bagi Kabupaten Purworejo, karena banyak menyerap tenaga kerja terampil di perdesaan, bahan baku tersedia melimpah dan telah mendapatkan pembinaan dari SKPD terkait. Sedangkan industri terbesar kedua adalah pembuatan batu bata, yaitu dari sebanyak 1.036 unit pada tahun 2002 dan meningkat menjadi sebanyak 1.255 unit tahun 2005 yang rata-rata menyerap antara 3 – 10 orang tenaga kerja setiap unitnya. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah agar dalam pengelolaan usaha memperhatikan kelestarian lingkungan, mengingat usaha pembuatan batu bata dilakukan di lahan persawahan yang produktif dan subur.

Prediksi

Seiring dengan perkembangan perekonomian Kabupaten Purworejo dan kecenderungan meningkatnya perubahan struktur ekonomi secara nasional, sektor industri semakin memegang peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam hal produksi maupun penyerapan tenaga kerja. Dengan merujuk pada fenomena perkembangan industri pada berbagai skala usaha, terutama UMKM menunjukkan kecenderungan semakin meningkat.

Prediksi tersebut didasarkan pada pola pergerakan perkembangan UMKM meningkat dari tahun ke tahun. Terkait dengan jenis produksi yang akan berkembang pada masa yang akan datang adalah industri yang berbahan baku lokal dan padat karya yang mengolah hasil pertanian (dalam arti luas) akan memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB.

Perkembangan industri tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo agar ada kesinambungan pembangunan di sektor industri secara terpadu. Artinya dengan prediksi jumlah industri yang ada sampai dengan tahun 2025 diharapkan dapat ditata dengan arah kebijakan yang baik dan tepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang justru kontraproduktif bagi daerah.

3. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan bidang Koperasi dan UKM di Kabupaten Purworejo dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Jumlah koperasi primer dari tahun 2000 sebanyak 244 unit meningkat menjadi sebanyak 280 unit pada tahun 2005, meningkat sebanyak 36 unit atau rata-rata meningkat sebesar 2,3 %. Namun jumlah anggota koperasi menunjukkan perkembangan menurun dari tahun ke tahun cenderung menurun. Jumlah anggota koperasi sebanyak 95.784 orang tahun 2005 menurun sebesar 1,64% menjadi 71.617 pada tahun 2006, hal ini perlu mendapatkan perhatian.

Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Purworejo selama tahun 2000 – 2005 tetap yaitu sebanyak 18 unit. Jumlah modal dan asset usaha yang dimiliki menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp. 618 juta pada tahun 2002 menjadi sebesar Rp. 9.796 juta pada tahun 2005. Sedangkan untuk koperasi simpan pinjam sampai dengan tahun 2005 sebanyak 18 unit, dengan jumlah modal dan asset sebesar Rp. 11.628 juta.

Pengembangan koperasi dan UKM merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UKM di Kabupaten Purworejo baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Banyaknya UKM pada tahun 2000 sebanyak 2.036 unit meningkat menjadi sebanyak 2.252 unit pada tahun 2005, atau meningkat sebanyak 216 unit atau 10,60% selama tiga tahun. Rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,53%. Peran koperasi dan UKM dalam perkembangan perekonomian daerah bersifat strategis, terutama terkait dengan penggunaan bahan baku lokal dan penyerapan tenaga kerja setempat. Karena sebagian besar UKM merupakan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja (*labour intensif*).

Prediksi

Perkembangan koperasi dan UKM pada masa yang akan datang akan semakin meningkat sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat terhadap pengembangan koperasi dan UKM baik formal maupun informal. Peran koperasi dan UKM terhadap perekonomian daerah sangat strategis khususnya penggunaan bahan baku lokal dan penyerapan tenaga kerja akan lebih meningkat, karena itu fasilitasi pembinaan UKM sangat strategis bagi perkembangan perekonomian daerah.

Prediksi koperasi dan UKM di Kabupaten Purworejo meningkat cukup baik, diperkirakan jumlah koperasi pada tahun 2010 sebanyak 28, pada tahun 2015 sebanyak 55, pada tahun 2020 sebanyak 82 dan pada tahun 2025 menjadi sebanyak 108 unit dengan jumlah anggota berturut-turut meningkat dari 6.774, 12.784, 18.794 dan 24.803 pada tahun 2025. Jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Purworejo. Akan tetapi dari perkembangan koperasi yang ada tersebut diprediksi juga akan dapat menyerap tenaga kerja lokal mencapai 294 orang pada 2010, 553 orang pada tahun 2015, 811 orang pada tahun 2020 dan 1.069 orang pada tahun 2025.

Jumlah UKM diprediksi meningkat secara signifikan, menjadi sebanyak 4.792 unit pada tahun 2010 dan meningkat menjadi sebesar 8.521 unit pada tahun 2015, 12.251 unit pada tahun 2020 dan 15.980 unit pada tahun 2025. Jumlah tenaga kerja terserap dari sebesar 8.387 orang pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 15.698 orang pada tahun 2015, 23.009 orang pada tahun 2020 dan 30.320 orang pada tahun 2025. Dukungan kebijakan dan pembinaan UKM ke depan lebih mengarah pada pengembangan pasar, peningkatan kualitas dan standardisasi produk sesuai standar nasional. Banyaknya UKM yang dibina semakin meningkat mencapai 2.252 unit pada tahun 2010, 3.329 unit pada tahun 2015, 4.407 unit pada tahun 2020 dan 5.484 unit pada tahun 2025.

4. Penanaman Modal

Pelaksanaan otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan peningkatan daya saing daerah, baik pengembangan perekonomian daerah dan penanaman modal di daerah. Meningkatnya jumlah penanaman modal di Kabupaten Purworejo akan membuka peluang kerja dan memberikan efek berganda untuk berkembangnya sektor pendukung lainnya.

Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah, meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, stabilitas politik di daerah, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya mendukung penciptaan kebijakan pemerintah yang pro investasi dan dapat mendorong berkembangnya dunia usaha. Kebijakan tersebut adalah penciptaan

iklim kondusif bagi investor dalam dan luar negeri dalam segala hal, seperti meningkatnya jaminan kepastian hukum, promosi terpadu, intermediasi perbankan, pelatihan keterampilan tenaga kerja, penyediaan prasarana dan sarana dan kebijakan tata ruang daerah yang konsisten.

Dalam hal perijinan investasi, di Kabupaten Purworejo dilaksanakan Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Adapun bentuk kelembagaan adalah kantor pelayanan terpadu. Dalam rangka pelayanan perijinan terpadu tersebut telah menerima pendelegasian kewenangan perijinan untuk 14 jenis perijinan. Untuk menjamin kepastian hukum serta transparansi dalam proses perijinan investasi, telah dituangkan peraturan tentang tata cara, persyaratan, waktu dan besarnya biaya untuk setiap ijin yang diterbitkan.

Jumlah alokasi kredit perbankan, baik melalui bank umum maupun Bank Perkreditan rakyat (BPR) di Kabupaten Purworejo dari tahun 2003 sebesar Rp. 300.709 juta meningkat menjadi sebesar Rp. 529.384 juta tahun 2005, atau meningkat sebesar Rp. 228.675 juta atau 76,04% selama tiga tahun. Dengan demikian diketahui rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 25,34%.

Meskipun promosi investasi telah ditingkatkan, namun tidak secara otomatis investasi meningkat, jika tidak terdapat faktor-faktor pendukung lainnya (jaringan jalan, gudang, listrik, air bersih dan pelayanan perbankan). Beberapa hal yang dinilai mendukung investasi di Kabupaten Purworejo antara lain adanya potensi atau klaster pendukung (*supporting industries*) ketersediaan pusat perdagangan dan infrastruktur pendukung yang berkualitas. Faktor pendukung yang lain adalah kondisi sosial politik yang stabil di daerah, ketenteraman dan ketertiban yang kondusif serta sikap masyarakat yang toleran, upah tenaga kerja yang kompetitif, lokasi strategis, pangsa pasar luas dan relatif dekat dengan bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) dan Pelabuhan Cilacap.

Prediksi

Perkembangan penanaman modal sampai dengan tahun 2025, akan dipengaruhi oleh jenis-jenis potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan. Dalam hal pelayanan perijinan penanaman modal pada masa yang akan datang akan semakin ringkas dan mudah. Peningkatan pelayanan perijinan usaha sangat mendukung pertumbuhan penanaman modal. Namun demikian, tingkat persaingan antar kabupaten/kota dalam menarik investor juga semakin ketat. Dengan demikian, jika pengertian penanaman modal hanya dibatasi pada jenis penanaman modal besar, pada masa yang akan datang perkembangannya akan relatif rendah. Fluktuasi nilai penanaman modal akan terjadi pada saat telah ada investor yang merealisasikan investasinya untuk mengelola potensi investasi yang saat ini ditawarkan, yakni agrobisnis, perikanan tangkap dan budidaya dan pengelolaan bahan tambang.

Namun kedepan, pemerintah Kabupaten Purworejo perlu lebih memperhatikan investasi UMKM dan padat karya (*labour intensive*). Oleh karena itu, kemudahan perijinan dan iklim investasi yang semakin kondusif bagi penanaman modal yang dilakukan oleh pengusaha lokal dalam skala yang kecil perlu semakin diperhatikan. Oleh karena itu, fasilitasi dan revitaliasi pasar tradisional yang ada di setiap kecamatan sebanyak 25 unit dan dua unit pasar hewan perlu semakin ditingkatkan di masa mendatang.

5. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Purworejo memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari sebanyak 7,86 ton atau senilai Rp 31.636.000,00 pada tahun 2000, menjadi sebanyak 33,62 ton senilai 136.161.000,00 pada tahun 2002. Namun demikian pada tahun berikutnya jumlah produksi terus menurun menjadi 15,52 ton senilai Rp 74.044.000,00 pada tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh rusaknya habitat ikan, kondisi cuaca yang tidak menentu dan tingginya biaya operasional melaut nelayan, sehingga jumlah nelayan semakin berkurang. Jumlah nelayan ABK menunjukkan penurunan dari sebanyak 325 orang pada tahun 2002 menjadi hanya 182 orang pada tahun 2005. Nelayan ABK di Kabupaten Purworejo jumlahnya lebih banyak dibandingkan nelayan juragan/tekong, sehingga pendapatan dan tingkat kesejahteraannya sangat rendah.

Produksi perikanan tambak memiliki kecenderungan meningkat dari sebanyak 57,4 ton pada tahun 2000 menjadi sebanyak 249,10 ton pada tahun 2004. Nilai produksi perikanan dalam kurun waktu yang sama juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp 434.805.000,00 pada tahun 2000, menjadi Rp 1.928.044.000,00 pada tahun 2004, dan menurun menjadi Rp 1.829.086.000,00 pada tahun 2005. Peningkatan jumlah produksi perikanan ini disebabkan semakin intensifnya pengembangan budidaya perikanan, dan semakin luasnya tambak yang digunakan untuk budidaya perikanan dari sebanyak 70,00 ha di tahun 2000 menjadi 151,00 ha di tahun 2004 dan tahun 2005.

Dari semua jenis perikanan yang ada di Kabupaten Purworejo, produksi perikanan budidaya kolam memiliki produksi paling tinggi, dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,6% per tahun. Pada tahun 2000 produksi perikanan kolam hanya sebanyak 290,98 ton atau senilai Rp 2.000.487.000,00, dan terus meningkat menjadi 478,83 ton senilai Rp 3.559.102.000,00 pada tahun 2005. Peningkatan produksi perikanan budidaya di kolam ini antara lain disebabkan semakin intensifnya budidaya perikanan darat, meningkatnya luasan kolam, dan semakin tingginya permintaan ikan, baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah.

Produksi perikanan budidaya, baik di tambak maupun di kolam selama ini didukung oleh produksi benih ikan dari Balai Benih Ikan (BBI) maupun benih perikanan rakyat. Dalam kurun waktu tahun 2000-2005 selalu terjadi peningkatan produksi benih ikan BBI dari sebanyak 815.300 ekor pada tahun 2000, menjadi 879.700 ekor pada tahun 2005. Peningkatan ini disebabkan semakin tingginya permintaan akan benih unggul dari masyarakat. Sementara itu, produksi benih ikan perikanan rakyat justru cenderung menurun dari sebanyak 15.474.000 ekor pada tahun 2000 menjadi hanya 12.850.000 ekor pada tahun 2005. Rendahnya kualitas bibit menyebabkan permintaan terhadap benih perikanan rakyat menjadi berkurang. Walaupun demikian, permintaan benih perikanan rakyat ini masih cukup tinggi karena harganya lebih terjangkau dibandingkan benih dari BBI.

Produksi perikanan sungai di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu enam tahun terakhir cenderung menurun dari sebanyak 192,89 ton senilai Rp 583.492.000,00 (tahun 2000) menjadi hanya 171,79 ton senilai 515.394.000,00 (tahun 2005). Pada kurun waktu yang sama produksi perikanan rawa juga menunjukkan penurunan dari sebanyak 61.12 ton senilai Rp 247.536.000,00 (tahun 2000) menjadi 51,03 ton senilai Rp 229.657.000,00 (tahun 2005). Penurunan produksi perikanan sungai dan rawa ini disebabkan semakin berkurangnya kualitas perairan akibat pencemaran oleh limbah domestik maupun industri, dan penggunaan racun (insektisida) dalam praktek penangkapan ikan.

Sarana penangkapan ikan laut di Kabupaten Purworejo adalah perahu motor tempel. Dalam kurun waktu enam tahun jumlahnya meningkat dari sebanyak 10 unit pada tahun 2000 menjadi 70 unit pada tahun 2005. Jenis sarana penangkapan ikan berskala kecil tersebut hanya mampu menjangkau perairan dangkal, sehingga hasil perikanan yang diperoleh juga sangat sedikit. Untuk menunjang produksi perikanan yang lebih besar diperlukan pengembangan sarana penangkapan ikan berskala besar. Sementara itu, alat tangkap ikan yang paling banyak digunakan adalah jala/jaring hanyut. Jumlah jala/jaring terus meningkat dari sebanyak 30 unit pada tahun 2000 menjadi 210 unit pada tahun 2005. Terdapat pula trammel net yang jumlahnya meningkat dari sebanyak 10 unit pada tahun 2000 menjadi sebanyak 70 unit pada tahun 2005.

Prediksi

Produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di Kabupaten Purworejo diperkirakan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata berturut-turut sebesar 3,67% dan 6,89%. Jumlah produksi pada tahun 2010 diperkirakan sebanyak 37,37 ton (senilai Rp 385.457.000,00); dan diprediksikan terus meningkat menjadi sejumlah 44,22 ton (senilai Rp 518.247,000) pada tahun 2015, menjadi sejumlah 52,34 ton (senilai 696.783.000,00) pada tahun 2020, dan menjadi sebanyak 61,95 ton (senilai 936.824.900,00). Peningkatan produksi perikanan tangkap ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah kapal dan jumlah nelayan, dan masih tingginya potensi perikanan laut di perairan laut selatan.

Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Purworejo memang masih tinggi, namun dewasa ini perubahan iklim global sangat mempengaruhi dinamika lautan. Hal ini sangat mempengaruhi perekonomian para nelayan, terutama pada saat gelombang laut sangat tinggi, padahal sebagian besar nelayan sangat menggantungkan diri pada hasil laut. Oleh karena itu diperlukan penggalan mata pencaharian lain yang dapat menggantikan apabila nelayan tidak melaut. Kegiatan-kegiatan padat karya dapat juga meningkatkan pendapatan nelayan, untuk menyerap tenaga kerja nelayan-nelayan yang terpaksa berhenti melaut (terutama ABK). Kedepan, perlu diantisipasi membludaknya pengangguran pada sebagian nelayan akibat keterbatasan modal dan biaya operasional yang semakin tinggi. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah pencegahan, terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri nelayan dalam meningkatkan produksi perikanan.

Produksi perikanan tambak juga diprediksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan berturut-turut sebesar 2,20% menjadi sebanyak 272,97 ton (senilai 2.618.987.280,-) di tahun 2010, sejumlah 302,97 ton (senilai 3.201.711,950,-) di tahun 2015, sebanyak 336,28 ton (senilai 3.914.092,860,-) di tahun 2020, dan 373,24 ton (senilai 4.784.978.530,-) di tahun 2025. Peningkatan produksi perikanan budidaya tambak ini karena permintaan akan ikan semakin tinggi, dan budidaya perikanan semakin intensif, sehingga luas produksi perikanan semakin bertambah.

Perikanan budidaya air tawar Kolam di Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 15 tahun kedepan diperkirakan akan mengalami peningkatan luas kolam sebesar 3,32% menjadi sebanyak 179,39 ha pada tahun 2010 menjadi sebanyak 284,54 ha pada tahun 2025. Produksi perikanan juga diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya permintaan perikanan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Rata-rata pertumbuhan produksi diperkirakan sebesar 2,49% menjadi sebanyak 541.04 ton (senilai Rp 6.158.338.870,00) pada tahun 2010, sejumlah 608,39 ton (senilai Rp.8.085.898.940,00) pada tahun 2015, sebanyak 648,14 ton (senilai Rp.10.616.785.310,00) pada tahun 2020, dan mencapai 769,31 ton (senilai Rp.13.939.839.110,00) pada tahun 2025.

Peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya kolam ini juga didukung dengan produksi benih, baik yang dilakukan oleh Balai Benih Ikan (BBI) maupun dari usaha perikanan rakyat. Peningkatan produksi benih BBI diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 1,19% menjadi 916.410 ekor pada tahun 2010, sebanyak 970.950 ekor pada tahun 2015, sejumlah 1.028.740 ekor pada tahun 2020, dan mencapai 1.089.970 ekor pada tahun 2025. Produksi benih perikanan rakyat diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1,78% per tahun menjadi 15.393.670 ekor di tahun 2010, sebanyak 16762.36 ekor di tahun 2015, sejumlah 18.252.740 ekor di tahun 2020, dan mencapai 19.875.630 ekor di tahun 2025. Keberadaan benih yang cukup banyak ini menjadikan proses budidaya secara intensif di Kabupaten Purworejo semakin mudah, sehingga produksi akan terus meningkat.

Produksi perikanan tangkap di perairan umum dalam jangka waktu lima belas tahun kedepan diperkirakan akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan semakin tingginya beban pencemar pada perairan oleh limbah aktivitas domestik, penggunaan insectisida pada pertanian maupun limbah dari aktivitas industri. Produksi perikanan sungai di Kabupaten Purworejo diperkirakan akan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,22% menjadi 79,86 ton (senilai Rp 425.660,00) pada tahun 2010, sebanyak 67,00 ton (senilai Rp 377.140,00) pada tahun 2015, sejumlah 56,22 ton (Rp 334.140,00), dan hanya sebanyak 47,17 ton (senilai Rp 296.050,00) pada tahun 2025. Jumlah produksi perikanan rawa juga diperkirakan mengalami penurunan sebesar 2,33% per tahun menjadi 25,97 ton atau senilai Rp 161.947.910,00 pada tahun 2010, sebesar 22,95 ton atau senilai Rp.161.622.960,00 pada tahun 2015, sejumlah 20,27 ton atau senilai Rp 161.298.660,00 pada tahun 2020, dan hanya sebanyak 17,91 ton atau senilai Rp 160.975.010,00.

6. Pertanian

Kegiatan usaha pertanian dalam arti luas memberikan sumbangan terbesar bagi PDRB Kabupaten Purworejo, namun produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian masih perlu ditingkatkan, baik untuk tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Hasil produksi padi sawah dari tahun 2001 – 2004 mengalami penurunan yang cukup berarti, yaitu dari 289.787 ton pada tahun 2001 menjadi 257.918 ton pada tahun 2005. Pada tahun 2005 produksi padi meningkat lagi menjadi 280.699 ton. Sementara itu produktivitas sawah sedikit meningkat dari 5,212 ton/ha pada tahun 2001 menjadi 5,653 ton/ha pada tahun 2005.

Tanaman pangan lainnya, yaitu tanaman jagung dan kedelai, dari tahun 2001 sampai tahun 2005 menunjukkan perkembangan yang positif. Luas panen jagung pada tahun 2001 adalah sebesar 1.508 ha dengan jumlah produksi sebanyak 4.760. Pada tahun 2005 luas panen jagung meningkat menjadi 3.444 ha, dan jumlah produksinya meningkat menjadi 30.146 ton. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan produktivitas lahan jagung dari 3,156 ton/ha pada tahun 2001 menjadi 8,753 ton/ha pada tahun 2005. Produksi kedelai juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu dari 3.183 ton dengan luas lahan 2.351 ha pada tahun 2001, menjadi 3.157 ton dengan luas lahan 2.230 ha pada tahun 2005. Produktivitas lahan kedelai sedikit mengalami peningkatan dari 1.354 ton/ha pada tahun 2001 menjadi 1.411 ton/ha pada tahun 2005.

Industri pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Purworejo diantaranya minyak atsiri, kerupuk terung, sari buah, sapu ijuk jumlah unit usahanya cenderung mengalami peningkatan. Industri pengolahan sari buah tahun 2002 sebanyak 5 unit, tahun 2005 meningkat menjadi 7 unit. Industri pengolahan sapu ijuk tahun 2000-2005 sebanyak 45 unit. Industri lanting sebanyak 2 unit tahun 2002, meningkat menjadi 3 unit tahun 2005.

Sedangkan untuk Industri pengolahan lain yang tidak mengalami perkembangan dalam kurun waktu 2002-2005 adalah industri pengolahan kerupuk terung sebanyak 23 unit, industri pengolahan minyak atsiri sebanyak 13 unit, industri pengolahan kopi bubuk sebanyak 1 unit, industri pengolahan mihun sebanyak 5 industri, industri pengolahan kecap sebanyak 2 unit, industri pengolahan tahu sebanyak 13 unit, dan industri pengolahan susu sebanyak 1 unit.

Pada sektor peternakan, Kabupaten Purworejo juga memiliki potensi yang cukup besar, antara lain daging, telur dan susu. Pada tahun 2001 produksi daging sapi dan kambing/domba berturut-turut sebanyak 432.673 kg dan 288.008 kg. Pada tahun 2005 produksi daging sapi dan kambing/domba berturut-turut meningkat menjadi sebanyak 447.949 kg dan 332.328 kg.

Produksi telur ayam ras dalam kurun waktu tahun 2001-2005 mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu dari 568.335 kg menjadi sebanyak 202.421 kg. Sementara itu produksi telur unggas lainnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 produksi telur ayam buras sebanyak 1.108.143 butir, telur itik sebanyak 451.431 butir, dan telur puyuh sebanyak 51.372 kg. Pada tahun 2005 produksi telur ayam buras sebanyak 13.761.294 butir, telur itik sebanyak 8.587.786 butir, dan telur puyuh sebesar 622.566 kg.

Produksi susu sapi dan susu kambing di Kabupaten Purworejo dari tahun 2001 sampai 2005 mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 produksi susu sapi hanya sebanyak 228,926 liter, dan pada tahun 2005 produksi susu sapi telah mencapai 447.949 liter. Produksi susu kambing pada tahun 2001 sebanyak 260 liter, dan pada tahun 2005 menjadi sebanyak 70.527 liter.

Prediksi

Dimasa mendatang pemerintah Kabupaten Purworejo harus mendorong tumbuhnya potensi pertanian lokal, tanaman pangan, hortikultura, peternakan (baik unggas, tenak kecil dan ternak besar) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani/ petenak kecil .

Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mendukung kebijakan pelestarian lahan pertanian sebagaimana UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, agar tidak banyak terjadi alih fungsi menjadi lahan pemukiman dan kawasan industri. Dengan mengedepankan sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai lokomotif pembangunan daerah maka diharapkan mampu mempertahankan daya dukung pertanian di atas 30% pada tahun 2025.

7. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan suatu daerah adalah kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan produk-produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan secara kontinyu dan stabil bagi seluruh penduduknya, sehingga semua rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai dengan kebutuhannya. Ketahanan pangan yang baik memberi jaminan bagi seluruh penduduk wilayah tersebut untuk memperoleh pangan dan gizi yang cukup guna menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas.

Ketahanan pangan merupakan pondasi bagi suatu masyarakat untuk membangun sektor lainnya, karena apabila kebutuhan pangan tidak terpenuhi akan sangat mudah timbul kerawanan sosial. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat harus mendapat perhatian yang serius agar produktivitas masyarakat dan daya saing wilayah dapat meningkat dalam menghadapi era global seperti sekarang ini.

Komoditas pangan yang diproduksi di Kabupaten Purworejo terutama adalah beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. Jenis sayuran yang banyak diproduksi di Purworejo adalah cabai, kacang panjang, ketimun, terong, kangkung, bayam dan tomat. Sementara buah-buahan yang banyak diproduksi di Kabupaten Purworejo adalah nangka, mangga, rambutan, duku, sukun, durian, jeruk, jambu biji, sukun, sawo, pepaya, pisang, nanas, salak, manggis dan alpukat.

Luas dan jumlah produksi padi di Purworejo selama tahun 2004-2005 tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2004 luas areal produksi padi sebesar 48.999 ha, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 49.654 ha. Jumlah produksi padi juga meningkat dari sebanyak 257.918 ton pada tahun 2004 menjadi 289.699 ton pada tahun 2005.

Kebutuhan pangan berupa beras selalu meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Sementara ini produksi padi di Purworejo masih dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduk Purworejo, bahkan sampai dengan tahun 2005 Kabupaten Purworejo mengalami surplus produksi beras sebesar 173.819 ton.

Berkaitan dengan pola makan masyarakat Kabupaten Purworejo yang terbiasa makan nasi, dan jumlah penduduk yang terus meningkat dari waktu ke waktu, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam waktu 20 tahun mendatang. Pertama, adanya kecenderungan penurunan luas lahan sawah di Purworejo pada tahun-tahun mendatang, karena adanya konversi lahan sawah menjadi tanah kering untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan industri, sementara pencetakan sawah baru hampir tidak ada. Kedua, produktivitas lahan sawah di Purworejo relatif rendah, yaitu 5,5 ton gabah kering panen per hektar. Ketiga, adanya kemungkinan menurunnya kesuburan lahan sawah karena adanya ketidakseimbangan unsur hara sebagai akibat dari praktek pemupukan berat (berlebihan) dengan bahan pupuk anorganik. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya mempertahankan luas lahan sawah melalui kebijakan atau peraturan daerah, meningkatkan produktivitas lahan melalui peningkatan kesuburan lahan, penemuan *strain* padi baru dan pengembangan manajemen penanaman padi.

Tingkat produksi tanaman sayuran sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini sangat berkaitan dengan keberhasilan panen dan minat masyarakat dalam hal memilih jenis sayuran yang ditanam. Minat masyarakat terhadap jenis sayuran tertentu sering kali dipengaruhi oleh harga jual produk yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan jumlah produksi tanaman sayuran dari tahun ke tahun selalu berfluktuasi. Tidak adanya pola yang jelas dan teratur dalam penanaman sayuran, menyebabkan harga komoditas tersebut juga sangat berfluktuasi. Hal ini di satu sisi seringkali merugikan petani karena jatuhnya harga pada saat panen, dan di sisi lain memberatkan beban ekonomi konsumen karena kenaikan harga yang tajam pada saat paceklik. Seperti halnya tanaman sayur-sayuran, tingkat produksi buah-buahan dan tanaman perkebunan di Purworejo juga berfluktuasi. Hal ini sangat berkaitan dengan keadaan lingkungan (iklim dan cuaca).

Populasi ternak sapi potong dan kambing PE (Peranakan Ettawa) mengalami sedikit peningkatan, tetapi populasi ternak kerbau dan domba menurun tajam. Keadaan tersebut menjadi semakin sulit oleh meningkatnya tekanan terhadap penggunaan lahan pertanian untuk memenuhi segala macam kebutuhan akan tanah, yang menyebabkan lahan untuk produksi hijauan pakan ternak menjadi semakin menyempit, sehingga produksi hijauan pakan ternak juga semakin menurun. Keadaan ini cukup mengkhawatirkan, baik ditinjau dari kepentingan lokal Kabupaten Purworejo, kepentingan regional Provinsi Jawa Tengah maupun kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan baru untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak di Kabupaten Purworejo.

Konsumsi daging sapi dan kerbau menurun, sementara konsumsi daging ayam meningkat sangat tajam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemotongan komoditas ternak tersebut. Kecenderungan ini hampir sama dengan apa yang terjadi di daerah-daerah lain. Penyebab utamanya diduga adalah harga daging ayam yang jauh lebih murah daripada daging sapi dan kerbau, disamping itu ketersediaan daging ayam juga melimpah.

Ketersediaan Daging di Kabupaten Purworejo masih cukup tinggi pada tahun 2000 sebesar 1.814.511 kg. Paling besar produksi daging terbesar berasal dari ayam buras yaitu sebesar 543.602,80 kg, kemudian ayam ras sebesar 368.972,80 kg, dan sapi sebesar 341.382 kg. Sementara itu pada tahun 2005 terjadi peningkatan yaitu 2.150.895 kg, dengan produksi daging terbesar ayam ras sebesar 810.496 kg, kemudian sapi 447.949 kg. dan ayam buras sebesar 409.937 kg.

Di bidang perikanan, hasil tangkapan ikan laut di Purworejo mengalami fluktuasi yang cukup besar dari tahun ke tahun. Namun demikian, secara umum usaha penangkapan ikan di Kabupaten Purworejo belum banyak berkembang, karena kapal-kapal penangkap ikan pada umumnya adalah kapal-kapal kecil yang rata-rata melaut pada jalur penangkapan I (lima mil laut). Produksi perikanan budidaya tambak di Kabupaten Purworejo hingga tahun 2005 juga masih sangat kecil. Produksi perikanan yang cukup besar justru berasal dari aktivitas budidaya perikanan kolam, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.

Prediksi

Dalam pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, maka strategi pengembangan kawasan agropolitan yaitu pengembangan pusat perdagangan komoditas pertanian di Sub Terminal Agribisnis Kalianyar (Kutoarjo) dan Kawasan Agrobisnis Bagelan adalah dalam rangka mengembangkan produk unggulan dan andalan daerah yang berbasis pada hasil-hasil pertanian, baik tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan dimasa mendatang. Kebijakan ini memiliki dua tujuan penting yaitu peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan kegiatan usaha pertanian secara terpadu dan peningkatan sumberdaya manusia sebagai pelaku usaha.

Untuk meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan, maka perlu diambil langkah-langkah strategis, yaitu melalui (1) Penguatan infrastruktur pertanian, meliputi: irigasi, jaringan pemasaran, permodalan, dan transfer teknologi dan (2) Perlindungan menyeluruh terhadap pelesatarian lahan pertanian dari alih fungsi/ peruntukan lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan/pemukiman.

G. Tata Ruang

1. Penataan Ruang

Perencanaan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk mengarahkan sistem pusat-pusat permukiman (perkotaan - perdesaan) sesuai dengan hirarkhi dan fungsinya dalam konteks pengembangan wilayah yang terintegrasi, dengan memacu perkembangan kota-kota utama, kota kecil dan pusat perdesaan.

Kota-kota di Kabupaten Purworejo tumbuh sebagai akibat aktivitas ekonomi yang terspesialisasi pada masing-masing wilayah. Konsentrasi penduduk pada suatu wilayah dengan spesialisasi tertentu terjadi akibat pertimbangan akan produktivitas, menekan biaya (cost) serta meningkatkan jumlah produksi. Spesialisasi ini selanjutnya akan berakibat adanya transaksi ekonomi antar wilayah untuk mendapatkan produk lain

yang dibutuhkan. Mobilitas penduduk untuk melakukan transaksi ekonomi dan mobilitas geografis umumnya mengikuti jalur transportasi yang ada dengan intensitas yang semakin meningkat. Peningkatan mobilitas ini pada akhirnya akan membentuk simpul-simpul konsentrasi perekonomian yang baru di berbagai wilayah.

Hirarkhi kota dimaksudkan untuk dapat menentukan sistem jenjang pelayanan yang dikaitkan dengan pusat-pusat pelayanan (kota) yang ada. Upaya ini bertujuan untuk lebih memantapkan dan memperjelas hirarkhi berdasarkan kondisi nyata kawasan-kawasan perkotaan dan tetap memperhatikan tata jenjang pelayanan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan penataan yang terstruktur, maka tujuan pemerataan pembangunan serta pusat-pusat pelayanan dapat secara efektif berperan sampai di tingkat lokal (pusat perdesaan). Hirarkhi kota-kota di wilayah ini diharapkan akan mewujudkan perkembangan wilayah secara merata yang didukung dengan keterkaitan desa dan kota (*rural-urban linkage*) dan keterkaitan kota dengan pusat ekonomi nasional bahkan internasional.

Dalam proses pengembangan wilayah Kabupaten Purworejo pusat-pusat pelayanan dibagi menurut hirarkhi sebagai berikut :

a. Pusat Kegiatan Wilayah dan Lokal / Hirarkhi I

Dalam kategori hirarkhi I terdapat dua ibukota kecamatan dan salah satunya sekaligus sebagai ibukota kabupaten, yaitu Kota Purworejo dan Kota Kutoarjo. Kedua kota ini termasuk dalam kategori *outlayer data* karena memiliki nilai IKHK yang relatif tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya sehingga langsung masuk dalam kategori hirarkhi I.

Ditinjau dari hirarkhi kota-kota sebagai pusat kegiatan wilayah, maka dua wilayah node (simpul) tersebut sangat intensif perkembangannya yaitu Kota Purworejo di sisi timur sebagai ibukota Kabupaten dan Kota Kutoarjo sebagai penyeimbangannya yang berada di sisi barat. Bahkan saat ini telah terbentuk pola pengembangan perkotaan berupa *ribbon development* antara keduanya dan membentuk suatu kawasan aglomerasi perkotaan pada koridor Kecamatan Purworejo- Kecamatan Kutoarjo melewati wilayah Kecamatan Banyuurip dan Bayan. Dua kota ini masuk dalam kategori Hirarkhi I atau sebagai pusat kegiatan lokal. Namun terbuka peluang bagi Kota Purworejo untuk berkembang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam lingkup provinsi meskipun dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah masih masuk dalam kategori Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Salah satu pertimbangan dasarnya adalah prasarana pelayanan yang saat ini telah mempunyai jangkauan regional untuk fasilitas prasarana dasar khususnya kesehatan yaitu RSUD Saras Husada dan beberapa rumah sakit swasta lainnya dan prasarana pendidikan dengan keberadaan Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP).

Dari sisi pemenuhan terhadap berbagai parameter kekotaan, maka Kota Purworejo dan Kota Kutoarjo mempunyai karakter yang sangat jelas menunjukkan ciri fisik kota sehingga masuk dalam kategori hirarkhi I. Kota Purworejo mempunyai jangkauan pelayanan pada wilayah timur Kabupaten Purworejo dengan wilayah pengembangan (*hinterland*) meliputi Kecamatan Kaligesing, Loano, Bener, Gebang, Banyuurip, Purwodadi, Bagelen dan Kecamatan Ngombol. Sedangkan Kota Kutoarjo di bagian barat, mempunyai *hinterland* di wilayah Kecamatan Bayan, Butuh, Kemiri, Pituruh, Bruno dan Kecamatan Grabag.

b. Pusat Kegiatan Hirarkhi II

Pada hirarkhi II meliputi 3 kota kecamatan yaitu Kota Kecamatan Bayan, Kemiri, dan Kecamatan Bener

c. Pusat Kegiatan Hirarkhi III

Pada hirarkhi II terdapat 5 kota kecamatan meliputi Kota Kecamatan Purwodadi, Banyuurip, Pituruh, Grabag, dan Kecamatan Butuh.

d. Pusat Kegiatan Hirarkhi IV

Pada hirarkhi IV terdapat empat kota kecamatan meliputi Kota Kecamatan Gebang, Loano, Bagelen dan Kecamatan Bruno

e. Pusat Kegiatan Hirarkhi V

Dalam penentuan hirarkhi kota-kota di Kabupaten Purworejo, dua kota kecamatan ini termasuk dalam kategori *outlayer data* karena mempunyai indeks yang relatif kecil dibandingkan kota-kota kecamatan lainnya sehingga langsung masuk dalam kategori tersebut, yaitu Kota Kecamatan Ngombol dan Kota Kecamatan Kaligesing.

Apabila dipetakan dengan menggunakan tipologi klasen, wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Maju dengan Pertumbuhan Cepat

Wilayah yang dikategorikan sebagai maju dengan pertumbuhan cepat adalah yang memiliki karakteristik pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonominya tinggi. Ada 3 kecamatan di Kabupaten Purworejo yang masuk dalam kelompok ini yaitu Kecamatan Purwodadi, Banyuurip, dan Kecamatan Kutoarjo.

b. Berkembang Cepat

Wilayah yang dikategorikan sebagai berkembang cepat adalah yang memiliki karakteristik pendapatan perkapita rendah namun pertumbuhan ekonominya tinggi. Ada 3 kecamatan di Kabupaten Purworejo yang masuk dalam kelompok ini yaitu Kecamatan Bagelen, Kaligesing, dan Kecamatan Bayan.

c. Maju tetapi Tertekan

Wilayah yang dikategorikan sebagai maju tapi tertekan adalah wilayah yang memiliki karakteristik pendapatan per kapita tinggi namun pertumbuhan ekonominya rendah. Ada satu (1) kecamatan yaitu Kecamatan Purworejo.

d. Kurang Berkembang

Wilayah yang dikategorikan sebagai kurang berkembang adalah yang memiliki karakteristik pendapatan perkapita rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah pula. Ada 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Grabag, Ngombol, Butuh, Pituruh, Bruno, Gebang, Loano, dan Kecamatan Bener.

Berdasarkan struktur tiap-tiap wilayah, maka dapat dikelompokkan dalam 2 tipe besar yaitu agraris dan jasa.

a. Tipe agraris yaitu : Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno dan Kecamatan Bener.

b. Tipe jasa, yaitu : Kecamatan Bagelen, Purworejo, Bayan, Banyuurip, Kutoarjo, Gebang, dan Kecamatan Loano.

Kesenjangan antar wilayah kecamatan yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson (IW) tahun 2005 nilainya 0,476 menggambarkan bahwa pada tahun 2005 kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Purworejo cukup tinggi. Wilayah-wilayah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama dikarenakan beberapa sebab yaitu karakteristik yang berbeda-beda dari tiap wilayah, dan dapat pula perlakuan pembangunan yang belum menggunakan wilayah sebagai basis kebijakan.

Permasalahan kesenjangan secara indikatif dapat diatasi dengan melakukan 2 hal dasar, yaitu sebagai berikut :

a. Melakukan pengelolaan wilayah dengan memperhatikan kekuatan masing-masing wilayah tersebut, secara ekonomi dapat dengan memperhatikan sektor-sektor produksi utama atau sektor basis ($Location\ Quotient/LQ > 1$) untuk memacu pertumbuhan

ekonomi dan pendapatan perkapitanya. Disamping itu masing-masing wilayah harus memperdalam penguasaan permasalahan sektor-sektor produksi utamanya atau sektor basisnya masing-masing.

- Untuk wilayah yang maju dengan pertumbuhan cepat perlu upaya mempertahankan bahkan meningkatkan pendapatan per kapita serta pertumbuhannya, yaitu Kecamatan Purwodadi, Banyuurip, dan Kecamatan Kutoarjo.
 - Untuk wilayah berkembang cepat yaitu Kecamatan Bagelen, Kaligesing dan Kecamatan Bayan perlu upaya meningkatkan pendapatan perkapitanya yang bertumpu pada sektor pertanian secara luas.
 - Untuk wilayah maju tapi tertekan yaitu Kecamatan Purworejo perlu memacu pertumbuhan ekonominya yang bertumpu pada sektor industri, listrik dan air minum, bangunan, angkutan, keuangan/ persewaan dan jasa-jasa lainnya.
 - Untuk wilayah kurang berkembang yaitu Kecamatan Grabag, Ngombol, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano dan Kecamatan Bener masih harus memacu pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang sama-sama masih relatif rendah. Kesembilan wilayah tersebut bertumpu pada sektor pertanian.
- b. Memperbaiki pola alokasi anggaran dengan lebih memperhatikan dimensi kewilayahan, sehingga dapat membantu wilayah meningkatkan kapasitasnya untuk melakukan pembangunan yang secara keseluruhan akan berdampak positif bagi pembangunan se Kabupaten Purworejo.
- Untuk wilayah yang relatif maju dan cepat berkembang perlu untuk dipacu agar melakukan upaya-upaya menarik investasi serta promosi wilayahnya. Diantaranya Kecamatan Purworejo, Purwodadi, Banyuurip, Kutoarjo, Bagelen, Kaligesing, dan Kecamatan Bayan.
 - Untuk wilayah yang relatif kurang berkembang lebih ditekankan pada upaya-upaya membuka isolasi daerah, atau mempermudah akses pembangunan meliputi faktor produksi, pendidikan, kesehatan, dan perhubungan. Diantaranya Kecamatan Grabag, Ngombol, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano dan Kecamatan Bener.

Penataan ruang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo. Kondisi penegakan Perda Tata Ruang sampai dengan saat ini dirasakan masih kurang optimal. Pelanggaran tata ruang belum memperoleh sanksi yang tegas. Pemanfaatan ruang sampai dengan saat ini belum secara optimal mengacu pada rencana tata ruang sebagaimana tercantum dalam Perda.

Prediksi

Menghadapi kemajuan di banyak sektor, sampai dengan tahun 2025 akan banyak permasalahan tentang penataan ruang di daerah. Namun demikian pada tahun 2025 diprediksikan bahwa penegakan perda tata ruang dan pengaturan pemanfaatan ruang kabupaten semakin baik. Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, memungkinkan bagi kabupaten untuk melakukan penataan dan mengawasi pelaksanaan Perda tentang tata ruang dengan lebih baik.

Beberapa kawasan yang telah ditetapkan Kabupaten Purworejo dapat terus disinergikan dengan pola pembangunan kewilayahan di daerah seperti pembangunan kawasan aglomerasi (pertumbuhan) Purworejo-Kutoarjo, Kawasan Bahari Terpadu (KBT) untuk pengembangan Kawasan Pesisir, Kawasan Agropolitan, Kawasan Geger Menjangan dan lain sebagainya sesuai dengan rencana tata ruang di Kabupaten Purworejo yang baru.

2. Pertanahan

Bidang pertanahan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan daerah. Selain itu pertanahan juga memiliki fungsi ekonomis dan sosial. Karena mengandung fungsi ekonomis dan sosial maka kepemilikan tanah harus jelas dengan dibuktikan melalui sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas. Bukti kepemilikan tanah yang sudah umum di masyarakat antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP). Jumlah sertifikat HM meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2005 sertifikat HM sebanyak 25.103 buah tahun 2006 meningkat menjadi 42.389 buah. Untuk sertifikat HGB tahun 2005 sebanyak 298 buah, meningkat menjadi 485 buah tahun 2006.

Sedangkan untuk sertifikat hak pakai tahun 2005 sebesar 1.077 sertifikat meningkat tahun 2006 menjadi sebanyak 1.255 sertifikat. Peningkatan jenis-jenis tanah yang bersertifikat di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas formal kepemilikan tanah semakin meningkat. Hal ini diketahui dari semakin banyaknya jumlah tanah yang bersertifikat dan diharapkan dapat menurunkan terjadinya persengketaan tanah atau kasus-kasus perselisihan kepemilikan tanah.

Berdasarkan gambaran kondisi status tanah yang bersertifikat di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti legalitas atas status kepemilikannya semakin meningkat dan pelayanan pensertifikatan tanah semakin berkualitas sesuai harapan masyarakat, dengan meningkatnya status tanah yang bersertifikat berdampak pada menurunnya kasus sengketa tanah di Kabupaten Purworejo.

Penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah terutama penetapan untuk kawasan pemukiman, lahan pertanian maupun kawasan-kawasan lainnya. Hal ini terkait erat dengan daya dukung lingkungan. Sesuai dengan Kepres No. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, dimana kewenangan pemberian izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, tanah *absentee* dan lain-lain dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Penegakkan hukum dan peraturan dalam bidang pertanahan dimasa mendatang akan semakin penting dalam rangka mengurangi sengketa pertanahan dan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Purworejo.

Prediksi

Atas dasar gambaran kondisi status tanah yang bersertifikat di Kabupaten Purworejo selama lima tahun terakhir selalu meningkat tiap tahunnya, maka dapat diprediksi status tanah yang bersertifikat semakin meningkat, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti legalitas atas status kepemilikannya. Upaya peningkatan pelayanan pensertifikatan tanah semakin mudah dan lebih sederhana sesuai harapan masyarakat. Meningkatnya jumlah status tanah yang bersertifikat berdampak pada menurunnya kasus sengketa tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo.

H. Sarana dan Prasarana

1. Pekerjaan Umum

a. Jalan

Prasarana jalan di Kabupaten Purworejo terbagi menjadi jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2000 panjang jalan nasional 719,61 km, dengan kondisi baik sepanjang 298,14 km, rusak ringan sepanjang 207,40 km, dan rusak berat sepanjang 214,07 km. Pada tahun 2005 terjadi peningkatan panjang jalan menjadi 764,29 km, terdiri dari kondisi baik sepanjang 412,78 km, rusak ringan sepanjang 135,06 km, dan rusak berat sepanjang 216,45 km.

Panjang jalan provinsi di Kabupaten Purworejo pada tahun 2000 mencapai 83,09 km dengan kondisi baik sepanjang 51,29 km, kondisi rusak ringan sepanjang 31,20 km, dan kondisi rusak berat tidak ada. Pada tahun 2005 terjadi peningkatan panjang jalan berkondisi baik menjadi 61,59 km, sedangkan yang kondisinya rusak ringan berkurang menjadi 21,50 km.

Kabupaten Purworejo juga dilalui jalan nasional sepanjang 42,80 km. Kondisi jalan nasional tahun 2000 sepanjang 19,30 km dalam kondisi baik, dan sepanjang 23,50 km dalam kondisi rusak ringan. Sementara tahun 2005 kondisi jalan baik sepanjang 24,10 km, dan kondisi jalan rusak ringan sepanjang 18,70 km. Sampai dengan tahun 2005 tidak jalan nasional dalam kondisi rusak berat.

Prediksi

Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Purworejo untuk 10 tahun memiliki rata-rata pertumbuhan 0,50%. Sehingga untuk tahun 2010 kondisi jalan baik sebesar 538.53 km, tahun 2015 diperkirakan meningkat menjadi 551.99 km, tahun 2020 diperkirakan meningkat menjadi 579.93 km. Untuk kondisi jalan rusak ringan di Kabupaten Purworejo tahun 2010 diprediksikan semakin berkurang tahun 2010 jumlah jalan rusak ringan sebesar 100.46 km, tahun 2015 berkurang lagi menjadi 97.67 km, tahun 2020 berkurang lagi menjadi 94.88 km, tahun 2025 menjadi 92.08 km. Sementara untuk jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat tahun 2010 diprediksikan menjadi 125.30 km, tahun 2015 berkurang menjadi 114.63 km, tahun 2020 menjadi 103.62 km, dan tahun 2025 menjadi 92.27 km.

Jalan Provinsi yang dalam keadaan baik di Kabupaten Purworejo memiliki rata-rata pertumbuhan 0,99%. Tahun 2010 kondisi jalan baik sebesar 69,16 km, meningkat tahun 2015 menjadi sepanjang 72,52 km. Tahun 2020 kondisi jalan meningkat menjadi 75,88 km, tahun 2025 kondisi jalan baik diprediksikan meningkat menjadi 79,23 km. Sementara untuk kondisi jalan rusak ringan tahun 2010 sepanjang 13,93 km, tahun 2015 menurun menjadi 10,57 km. Tahun 2020 kondisi jalan rusak ringan mengalami penurunan menjadi 7,21 km dan tahun 2025 kondisi jalan rusak ringan menjadi 3,86 km

b. Jembatan

Panjang jembatan kabupaten di Kabupaten Purworejo pada tahun 2000 sebesar 3.387,70 m, dengan kondisi baik 2.630,00 m (78%), rusak ringan 408,80 m (12%), dan rusak berat 348,90 m (10%). Tahun 2005 panjang jembatan meningkat menjadi 3.656,70 m, dengan kondisi baik 2.082,20 (57%) m, rusak ringan 791,30 m (22%), dan rusak berat 782,60 m (21%).

Panjang jembatan provinsi dalam kurun waktu tahun 2000-2005 tidak mengalami perubahan yaitu sepanjang 810,25 m, semuanya dalam kondisi baik, tidak ada yang mengalami rusak ringan maupun rusak berat. Dalam kurun waktu yang sama panjang

jembatan nasional juga tidak mengalami perubahan, yaitu sepanjang 744,05 km, semuanya dalam kondisi baik.

Prediksi

Kondisi jembatan di Kabupaten Purworejo dalam keadaan baik tahun 2010 diprediksikan meningkat menjadi 2.159,55 km, tahun 2015 meningkat lagi menjadi 2.249,80 km, tahun 2020 kondisi jalan diprediksikan meningkat lagi menjadi 2.340,04 km, tahun 2025 meningkat menjadi 2.430,29 km. Sedangkan untuk jembatan rusak ringan memiliki kecenderungan meningkat. Tahun 2010 sebesar 684,57 km, tahun 2015 meningkat menjadi 708,86 km, tahun 2020 kondisi jembatan rusak ringan menjadi 733,16 km, dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 757,16. Sementara untuk kondisi jembatan rusak berat tahun 2010 sebesar 1001,88 km, menurun tahun 2015 menjadi 887,34 km, tahun 2020 menurun lagi menjadi 772,80 km. tahun 2025 kondisi jembatan rusak berat menurun menjadi 658,26 km.

Kondisi dan panjang jembatan kabupaten diprediksikan tidak mengalami pertumbuhan tahun 2010-2025 kondisi jembatan baik diprediksikan sebesar 810,25 km dan diprediksikan sampai dengan tahun 2025 tidak ada kerusakan pada jembatan kabupaten.

c. Sumber Daya Air

Kondisi sumber daya air di Kabupaten Purworejo, dalam kurun waktu tahun 2000-2005 tidak terjadi penambahan jumlah sumber air maupun jumlah sumber air yang dilindungi. Sementara potensi air Kabupaten Purworejo berasal dari air permukaan (sungai) dan air tanah. Terdapat beberapa sungai dan anak sungai yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu :

- 1) DAS Bogowonto terdiri dari 1 (satu) sungai induk sepanjang 57,750 km dan 33 anak sungai sepanjang 200,89 km, serta sebanyak 5 (lima) buah mata air.
- 2) DAS Cokroyasan terdiri dari 1 (satu) sungai induk sepanjang 40,740 km, 13 (tiga belas) anak sungai, 4 (empat) avour, dan 12 (dua belas) drainase alam sepanjang 158,15 km.
- 3) DAS Wawar terdiri dari 1 (satu) sungai induk sepanjang 51,050 km, 35 (tiga puluh lima) anak sungai, dan 12 (dua belas) drainase alam sepanjang 173,80 km.

Pada dasarnya ketersediaan air irigasi di bangunan pengambilan (bendung) masih dalam batas yang cukup, meskipun debit sungai dari DAS yang ada cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun demikian ketersediaan air irigasi di bendung tidak otomatis akan mencukupi kebutuhan di tingkat petak-petak tersier. Perlu diketahui bahwa infrastruktur irigasi di Kabupaten Purworejo rata-rata dalam kondisi sedang dan rusak, sehingga faktor kehilangan air di saluran pembawa cukup besar.

Di Kabupaten Purworejo pada tahun 2000 terdapat sebanyak 52 DAM, terdiri dari berkondisi baik sebanyak 2 DAM, berkondisi rusak berat sebanyak 5 DAM, dan berkondisi rusak ringan sebanyak 45 DAM. Sementara itu pada tahun 2005 DAM yang berkondisi baik meningkat menjadi sebanyak 5 DAM, sedangkan yang kondisinya rusak berat jumlahnya menurun menjadi 2 DAM, dan rusak ringan tetap sebanyak 45 DAM.

Prediksi

Untuk jumlah DAM diperkirakan tidak mengalami pertumbuhan sampai dengan tahun 2025. Jumlahnya tetap sebanyak 52 DAM. Sedangkan untuk jumlah DAM rusak berat tahun 2025 diperkirakan tidak ada DAM dalam kondisi rusak berat, sementara untuk

DAM dalam kondisi rusak ringan diperkirakan tahun 2010 sebanyak 35 DAM, tahun 2015 turun menjadi 20 DAM, tahun 2020 turun menjadi 10 DAM, dan tahun 2025 turun lagi menjadi 5 DAM.

d. Persampahan

Volume persampahan di Kabupaten Purworejo semakin meningkat, peningkatan ini di pengaruhi oleh adanya pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo. Volume sampah di Kabupaten Purworejo tahun 2000 sebanyak 167 ton/hari, sedangkan volume sampah yang terangkut hanya sebanyak 160 ton/hari, sehingga volume sampah tidak terangkut mencapai 7 ton/hari. Pada tahun 2003 volume sampah meningkat menjadi 238 ton/hari, dengan volume sampah terangkut sebanyak 221 ton/hari, dan volume sampah tidak terangkut sebanyak 17 ton/hari. Pada tahun 2005 volume sampah meningkat menjadi 194 ton/ hari, sedangkan volume sampah terangkut hanya sebanyak 174 ton/hari, sehingga volume sampah tidak terangkut mencapai 20 ton/hari.

Upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Purworejo dilakukan secara tradisional, yaitu dengan penumpukan atau penimbunan dan pembakaran sampah. Pengelolaan sampah dengan cara tradisional ini dapat dilakukan pada daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah. Seiring dengan pertambahan penduduk, jumlah volume sampah di Kabupaten Purworejo juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu perlu diantisipasi sehingga sampah yang ada dapat dikelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan.

Prediksi

Tahun 2007 volume sampah meningkat menjadi 197 ton/ hari, untuk volume sampah tidak terangkut sebesar 182 ton/hari dan volume sampah terangkut sebesar 15 ton/hari. Tahun 2008 volume sampah semakin meningkat mencapai 238 ton/hari, untuk volume sampah terangkut sebesar 195 ton/hari dan untuk volume sampah tidak terangkut sebesar 40 ton/hari.

Volume sampah di Kabupaten Purworejo diprediksikan akan mengalami peningkatan. Tahun 2010 volume sampah mencapai 237 ton/hari, untuk volume sampah terangkut 196,09 ton/hari dan volume sampah tidak terangkut 40,60 ton/hari. Tahun 2015 volume sampah sebesar 243 ton/hari, untuk volume sampah terangkut sebesar 198,82 ton/hari, dan volume sampah tidak terangkut sebesar 42,10 ton/hari. Tahun 2020 volume sampah meningkat menjadi 249 ton/ hari, untuk volume sampah terangkut sebesar 201,55 ton/hari dan volume sampah yang tidak terangkut sebesar 43,60 ton/hari. Tahun 2025 volume sampah meningkat sebesar 255 ton/hari, volume sampah terangkut sebesar 204,28 ton/hari, dan untuk sampah tidak terangkut sebesar 45,10 ton/hari. Maka upaya pengolahan sampah dari hulu harus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat melalui sistem 3R.

e. Saluran Irigasi

Kabupaten Purworejo memiliki 3 jenis saluran irigasi, yaitu saluran irigasi primer, sekunder dan tersier. Panjang saluran primer di Kabupaten Purworejo sebesar 188.701 m, pada tahun 2000 kondisi saluran primer yang dalam kondisi baik sepanjang 32.080 m, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 58.498 m. Saluran primer yang kondisinya rusak berat pada tahun 2000 sepanjang 69.819 m, sedangkan pada tahun 2005 turun menjadi 37.740 m. Saluran primer yang berkondisi rusak ringan pada tahun 2000 sepanjang 86.802 m, dan pada tahun 2005 panjangnyanya meningkat menjadi 92.463 m.

Panjang saluran sekunder di Kabupaten Purworejo adalah 313.647 m. Pada tahun 2000 saluran sekunder yang dalam kondisi baik sepanjang 53.320 m, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 97.231 m. Saluran sekunder yang kondisinya rusak berat pada tahun 2000 panjangnya 116.049 m, dan pada tahun 2005 menurun menjadi 62.729 m. Sementara itu saluran yang dalam kondisi rusak ringan pada tahun 2000 panjangnya 144.278 m, dan pada tahun 2005 panjangnya meningkat menjadi 153.678 m.

Untuk kondisi saluran tersier di Kabupaten Purworejo 33.550 m, tahun 2000 yang dalam keadaan baik sepanjang 5.703 m, tahun 2005 meningkat menjadi 10.400 m. Sementara untuk kondisi saluran tersier rusak berat tahun 2000 sepanjang 12.414 m, tahun 2005 sepanjang 6.710. Kondisi saluran rusak berat tahun 2000 sepanjang 15.433 m, tahun 2005 meningkat menjadi 16.440 m.

Prediksi

Kondisi saluran primer dalam kondisi baik tahun 2007 sebesar 73.594 m tahun 2008 naik menjadi 79.225 m. Untuk saluran primer rusak berat tahun 2007 sepanjang 22.644 m turun menjadi 15.402 m. sedangkan untuk saluran dalam kondisi rusak ringan tahun 2007 sepanjang 92.463 m, tahun 2008 saluran primer dalam kondisi rusak ringan naik menjadi 94.044 m.

Tahun 2010 diperkirakan saluran primer dalam kondisi baik meningkat menjadi 80.824 m, tahun 2015 meningkat menjadi 84.747 m, tahun 2020 meningkat lagi menjadi 88.670 m, tahun 2025 meningkat lagi menjadi 92.594 m. untuk saluran primer dalam kondisi rusak berat tahun 2010 15.116 m, tahun 2015 menurun menjadi 14.399 m, tahun 2020 menurun kembali menjadi 13.683 m, tahun 2025 menurun lagi menjadi 12.967 m.

Sementara untuk saluran sekunder dalam kondisi baik tahun 2008 sepanjang 130,376 m, diprediksi 2010 meningkat menjadi 132.957 m, tahun 2015 diprediksikan kembali meningkat menjadi 139.411 m, tahun 2020 saluran sekunder dalam kondisi baik diprediksikan meningkat lagi menjadi 145.865 m, dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 152.318 m. saluran sekunder dalam kondisi rusak berat tahun 2008 sepanjang 27.988 m. diprediksikan tahun 2010 menurun menjadi 27.434 m, tahun 2015 turun kembali 26.048 m, tahun 2020 diprediksikan menurun dari tahun sebelumnya menjadi 24.663 m. Tahun 2025 menurun kembali menjadi 23.278 m. untuk kondisi saluran dalam kondisi rusak ringan tahun 2008 155.283 m, tahun 2010 diprediksikan akan menurun menjadi 153.256 m. sampai dengan tahun 2025 diprediksikan kondisi jalan rusak ringan menurun menjadi 138.051 m

Untuk kondisi saluran tersier yang dalam keadaan baik tahun 2008 sepanjang 14.092, tahun 2015 diprediksikan meningkat menjadi 15.066 m. kondisi saluran ini terus meningkat sampai dengan tahun 2025 menjadi sepanjang 16.461 m. sementara untuk kondisi saluran tersier rusak berat tahun 2008 sepanjang 2.684 m. Tahun 2015 diprediksikan menurun menjadi 2.498 m. sampai dengan tahun 2025 kondisi ini terus berkurang menjadi 2.232 m. kondisi saluran rusak berat tahun 2008 sepanjang 16.776 m, tahun 2015 diprediksikan menurun menjadi 15.986 m. tahun 2025 diprediksikan akan terus menurun menjadi 14.856 m.

f. Air Minum

Kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Purworejo sebagian sudah dilayani oleh PDAM, sebuah perusahaan yang bertugas memberi layanan penyediaan air bersih sebagai salah satu sarana air bersih. Pada saat musim kemarau kinerja PDAM menurun karena debit turun sekitar 30 persen setiap musim kemarau.

Sumber air di Kabupaten Purworejo berasal dari mata air dan air permukaan. PDAM Purworejo menggunakan mata air Simbarjoyo Desa Mudalrejo Kecamatan Loano

(dengan kapasitas 60 liter/detik), Tuk Mudal di Desa Kalinongko Kecamatan Loano (60 liter/detik), sumber di Desa Medono Kecamatan Bener (15 liter/detik), mata air Ngrawu Desa Sedayu Kecamatan Loano (5 liter/detik). Selain itu, PDAM Purworejo memiliki instalasi pengolahan air sungai di Kecamatan Purwodadi. Jumlah pelanggan air minum Kabupaten Purworejo terbagi atas industri, niaga, dinas atau instansi, rumah tangga dan lain-lain. Jumlah pelanggan PDAM tahun 2002 sebanyak 26.767 pelanggan atau setara dengan 150 ribu jiwa dan tahun 2005 meningkat menjadi 34.196 pelanggan atau setara dengan 171 ribu jiwa.

Prediksi

Dengan pertumbuhan penduduk yang ada dimana diprediksikan bahwa pada tahun 2025 jumlah penduduk mencapai 991.145 jiwa, maka diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat dapat dipenuhi sebesar 100%, baik dari PDAM dan sumber air bersih tertutup yang memenuhi syarat kesehatan.

2. Perhubungan

Kondisi sarana perhubungan di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan wajib uji meningkat dari tahun 2000-2005. Pada tahun 2000 jumlah kendaraan wajib uji sebesar 2.709 unit dan pada tahun 2005 meningkat menjadi sebesar 3.505 unit. Jumlah kendaraan yang melakukan uji pada tahun 2000 sebanyak 4.868 unit dan meningkat pada tahun 2005 menjadi sebanyak 6.582 unit, (93,89%) hal ini menunjukkan kesadaran uji kendaraan perlu ditingkatkan melalui penyuluhan dan deseminasi.

Jumlah kendaraan umum angkutan pedesaan selama kurun waktu 2000-2005 cenderung meningkat. Jumlah kendaraan angkutan pedesaan (mobil penumpang umum) pada tahun 2000 sebesar 594 unit dengan jumlah kursi sebanyak 7.128 unit dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 663 unit dengan jumlah kursi sebanyak 7.956 kursi. Peningkatan jumlah kendaraan angkutan pedesaan tidak begitu besar selama kurun waktu tersebut, karena *load factor* selama kurun waktu lima tahun cenderung rendah atau turun. Dengan turunnya *load factor* setiap tahunnya menjadikan usaha angkutan tidak banyak diminati lagi oleh masyarakat.

Jumlah kendaraan umum berupa bus kecil atau sedang selama kurun waktu 5 tahun (2000-2005) menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan ini disebabkan oleh jumlah penumpang (*load factor*) yang semakin menurun, sehingga pengusaha angkutan khususnya bus kecil/średang cenderung merugi dan berhenti berusaha. Jumlah angkutan umum bus besar sejak tahun 2004 sampai dengan 2006 cenderung tetap, yaitu sebesar 260 unit.

Ijin trayek angkutan selama kurun waktu tahun 2000 – 2005 cenderung tetap, baik untuk trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Untuk AKAP pada tahun 2000 sebanyak 17 trayek, untuk AKDP sebanyak 5 trayek, dan untuk Angkutan pedesaan sebanyak 65 trayek. Tahun 2005 cenderung meningkat untuk AKAP sebanyak 28 trayek, untuk AKDP sebanyak 12 trayek, dan untuk Angkutan pedesaan sebanyak 65 trayek. Sementara untuk jumlah terminal tahun 2000 untuk Tipe A sebanyak 1 buah dan Tipe C sebanyak 4 buah. Sedangkan pada tahun 2005 terdapat penambahan 1 buah terminal Tipe C, sehingga jumlah terminal Tipe C menjadi 5 buah. Untuk jumlah *traffic light* tahun 2000 sebanyak 8 buah, dan jumlah *warning light* sebanyak 5 buah. Tahun 2005 jumlah *traffic light* sebanyak 13 buah, rambu jalan sebanyak 768 buah, panjang marka 1.194 m² dan jumlah *warning light* sebanyak 21 buah.

Prediksi

Rata-rata pertumbuhan sarana perhubungan selama 10 tahun sebesar 0,87 %. Tahun 2010 jumlah kendaraan yang melakukan wajib uji diprediksikan sebanyak 3.545 unit, tahun 2015 diprediksikan meningkat lagi menjadi 3.696 unit. Tahun 2020 jumlah kendaraan yang wajib uji meningkat menjadi 3.848 unit. Tahun 2025 jumlah kendaraan yang wajib uji mencapai 3.999 unit.

Diprediksikan tahun 2010 jumlah kendaraan yang melakukan wajib uji sebanyak 6.536 unit, tahun 2015 jumlah kendaraan yang melakukan wajib uji meningkat sebanyak 6.806 unit. Tahun 2020 meningkat lagi menjadi 7.076 unit dan tahun 2025 jumlah kendaraan yang melakukan wajib uji mencapai 7.346 unit.

Jumlah angkutan pedesaan mengalami penurunan *load factor* setiap tahunnya menjadikan usaha angkutan tidak banyak diminati oleh masyarakat. Diprediksikan sampai dengan tahun 2025, jumlah kendaraan angkutan pedesaan relatif meningkat. Hal ini juga berlaku bagi prediksi jumlah kendaraan bus kecil atau sedang, jumlah ijin trayek AKAP maupun AKDP dan jumlah terminal di Purworejo sampai tahun 2025 cenderung tetap.

3. Perumahan

Pembangunan sektor perumahan dan pemukiman memiliki tujuan memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menempati rumah yang layak, tersedia air bersih dengan prasarana dan sarana sanitasi yang memadai. Hal ini akan mengurangi kesenjangan pelayanan prasarana dan sarana antar kelompok pendapatan masyarakat; meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan dan permukiman; menyediakan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang serasi dan berkelanjutan dan mengelola pembangunan dan pemukiman secara efektif dan efisien. Status kepemilikan rumah di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan. Data tahun 2003 rumah status milik sendiri 195.995 sertifikat meningkat sebesar 0,17 % tahun 2004. Pada tahun 2005 jumlah sertifikat milik sendiri meningkat sebesar 0,04%, tahun 2006 meningkat lagi sebesar 0,08%.

Sedangkan untuk penyediaan perumahan KPR/BTN tahun 2003 sebanyak 593 unit meningkat tahun 2004-2007 sebanyak 680 unit. Rata-rata pertumbuhan perumahan yang disediakan oleh KPR/BTN sebesar 0,72%/tahun. Sedangkan untuk penyediaan rumah oleh perorangan meningkat dari tahun 2003 sebanyak 195.402 unit tahun 2004 meningkat menjadi 195.659 unit, tahun 2005 meningkat lagi menjadi 195.749 unit, tahun 2006 meningkat lagi menjadi 195.911 unit. Untuk kebutuhan rumah tahun 2003 sebanyak 550 unit, tahun 2004 meningkat menjadi 580, tahun 2005 dan 2006 meningkat lagi menjadi 610 unit. Rata pertumbuhan penyediaan rumah perorangan sebesar 0,94 %.

Untuk jenis rumah Tipe A (rumah permanen terbuat dari tembok dengan sarana air bersih dan sanitasi) di Kabupaten Purworejo, tahun 2000 sebanyak 76.394 unit, Tipe B (rumah semi permanen dengan sarana air bersih dan sanitasi) sebanyak 58.468 unit, dan untuk Tipe C (rumah semi permanen yang tidak memiliki sarana air bersih dan sanitasi) sebanyak 31.482 unit. Pada tahun 2004 rumah dengan Tipe A menurun menjadi 55.061 unit, Tipe B meningkat menjadi 75.591 unit, dan untuk Tipe C meningkat menjadi 55.268 unit.

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2005 sebesar 769.056 jiwa, dan jumlah rumah tangga sebesar 195.135 RT. Untuk jumlah rumah yang tersedia di Kabupaten Purworejo sebesar 195.749 unit, atau terdapat kelebihan 614 unit. Namun

demikian yang perlu diperhatikan adalah penyebaran rumah permanen tidak merata diseluruh wilayah kecamatan dan masih banyak rumah yang tidak dilengkapi dengan sanitasi sehat, terutama di wilayah pedesaan.

Prediksi

Isu ketersediaan perumahan akan semakin meningkat sampai dengan tahun 2025. Untuk tahun 2010 diprediksikan penyediaan rumah oleh BTN meningkat sebesar 694 unit. Tahun 2015 meningkat menjadi 718 unit. Tahun 2020 meningkat menjadi 742 unit dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 766 unit. Rata-rata pertumbuhan penyediaan rumah perorangan sebesar 0,94 %. Sehingga diprediksikan jumlah ini akan terus meningkat sampai dengan tahun 2025 mencapai 229.126 unit. Disisi lain rumah tipe C (kurang layak huni) pada tahun 2025 diharapkan semakin menurun sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan beberapa program di bidang perumahan seperti pembangunan rumah baru, peningkatan pelayanan air bersih dan penataan sanitasi melalui Program Saminas.

4. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan wajib komunikasi dan informatika terbagi dalam 2 sub bidang yaitu sub bidang pos dan telekomunikasi serta sub bidang sarana komunikasi dan deseminasi informasi.

Dalam era globalisasi perkembangan komunikasi dan media massa sangat cepat, baik radio, televisi dan media cetak. Kemajuan pembangunan bidang komunikasi dan informatika dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi. Salah satu kemajuan yang terlihat saat ini adalah ketersediaan telekomunikasi yang cukup memadai dan semakin banyak dimiliki oleh masyarakat secara luas.

Perkembangan kepemilikan telepon termasuk di dalamnya adalah pesawat telepon tetap (*fixed phone*) maupun telepon genggam (*handphone*) jumlahnya masih sedikit. Sementara itu terkait dengan pelayanan pos, di Kabupaten Purworejo terdapat 1 kantor pos induk yang melayani jasa pengiriman surat menyurat dan paket pos, sedangkan di setiap kecamatan terdapat 1 kantor pos yang berfungsi sebagai kantor pos pembantu. Selain melayani jasa pengiriman, saat ini kantor pos melebarkan usaha jasanya dalam bentuk jasa pembayaran telepon, listrik, air. Sementara itu dalam hal ketersediaan informasi, semakin mudah dan cepat informasi-informasi yang mampu diakses oleh masyarakat. Penyebarluasan informasi secara cepat sudah menjadi komitmen dari pemerintah daerah sehingga sudah semakin banyak satuan kerja pemerintah daerah yang memiliki *website* (<http://www.purworejokab.go.id>) sebagai media penyebarluasan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta menjadi media promosi daerah.

Terkait dengan penyebarluasan informasi, di Kabupaten Purworejo terdapat beberapa lembaga penyiaran publik milik pemerintah daerah dan swasta, sedangkan media massa yang beredar baik media massa nasional maupun regional, antara lain : Suara Merdeka, Wawasan, Kedaulatan Rakyat, Seputar Indonesia, Kompas, dan beberapa surat kabar lainnya.

Prediksi

Perkembangan pembangunan bidang komunikasi dan informatika diprediksi akan semakin meningkat terutama berkaitan dengan penyebarluasan informasi kepada publik.

Melihat perkembangan beberapa daerah di sekitarnya seperti kebumen, maka beberapa tahun mendatang diprediksi Pemerintah Purworejo akan memandang penting untuk membangun stasiun televisi lokal sebagai media komunikasi dan informasi pemerintah daerah, sedangkan untuk jumlah stasiun radio khususnya FM diprediksi akan semakin banyak. Dilihat berdasarkan keunggulannya, perkembangan informasi elektronik akan semakin pesat dan seiring dengan hal tersebut diprediksi 20 tahun mendatang transaksi elektronik juga semakin meningkat tajam sehingga pengaruh yang ditimbulkan oleh transaksi elektronik tersebut adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan sistem elektronik guna mendukung kelancaran berlangsungnya transaksi elektronik. Sekarang ini telah terbit Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi elektronik, sistem elektronik, transaksi elektronik, berlaku mulai tahun 2010 sehingga memiliki peranan yang sangat penting dan strategis.

Penyelenggaraan pemerintahan diharapkan juga akan berbasis pada kemajuan teknologi informasi sehingga konsep penerapan *e-government* yang telah terintegrasi dari berbagai aspek dapat diaplikasikan dengan matang pada tahun 2025. Terkait dengan telekomunikasi, seiring dengan semakin banyaknya provider penyedia jasa telekomunikasi maka layanan jasa telekomunikasi akan semakin beragam dan biayanya semakin murah. Sementara itu berhubungan dengan pelayanan pos khususnya jasa layanan pengiriman surat menyurat diprediksi sedikit mengalami penurunan, namun untuk jasa layanan pengiriman paket pos diprediksi tetap dapat bertahan walaupun semakin banyak jasa-jasa pengiriman paket yang dikelola oleh swasta.

I. Politik dan Tata Pemerintahan

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

a. Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Kabupaten Purworejo harus melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang telah dilimpahkan dari pemerintah pusat. Penyelenggaraan urusan tersebut tidak terlepas dari kapasitas daerah dalam menangani segenap urusan kewenangan. Kemampuan pembiayaan, sumberdaya manusia, kelembagaan daerah dan potensi lain yang dimiliki merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kapasitas daerah tersebut.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai acuan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sejak tahun 1999 – 2005 telah disusun Perda sebanyak 121 buah dan Perbup sebanyak 205 buah. Sedangkan jumlah kesepakatan (*memorandum of understanding*) kerjasama antar daerah, baik kerjasama dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maupun kalangan dunia usaha sejak tahun 2004 sebanyak 3 buah, tahun 2005 meningkat menjadi 10 buah.

Dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) agar dapat dicapai tata kelola organisasi secara efisien dan efektif. Kerjasama antar daerah dilakukan terkait dengan peningkatan promosi investasi, kerjasama antar kawasan perbatasan, pengembangan prasarana dan sarana serta upaya penanganan pencemaran lingkungan serta promosi daerah.

b. Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan umum mengacu pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelayanan publik dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah mencerminkan citra pemerintah yang semakin baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga ditujukan dalam penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan PP No. 70 tahun 2005 tentang Desa.

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah membentuk pelayanan perijinan dalam bentuk pelayanan satu atap atau pelayanan perijinan satu pintu dan pelaksanaan *e-government* (*e-gov*) semakin ditingkatkan. Berbagai bidang pelayanan publik dan pembangunan semakin ditingkatkan oleh segenap SKPD di Kabupaten Purworejo, antara lain pelayanan perijinan, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, pelayanan air bersih, pengelolaan persampahan dan lain sebagainya. Kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan pelayanan publik adalah terbatasnya prasarana dan sarana pendukung di setiap SKPD.

c. Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 1999 – 2005 menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo pada tahun 1999 sebesar Rp. 7.078.864.000 meningkat menjadi sebesar Rp 32.833.000.000 atau meningkat sebesar 463% selama lima tahun. Atau rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 92,76% per tahun, tumbuh hampir dua kali lipat setiap tahun. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik.

Pertumbuhan PAD yang tinggi tersebut, jika dibandingkan dengan besarnya APBD Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah. Besarnya proporsi PAD terhadap APBD dari tahun 1999 – 2005 diketahui berkisar antara 6,42% – 8,84%. Sehingga sebagian besar sumber keuangan daerah Kabupaten Purworejo berasal dari subsidi dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah pos retribusi daerah dari tahun 1999–2005 menunjukkan sumbangan sebesar 55% - 81% terhadap PAD. Sedangkan pajak daerah memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan kinerjanya dimasa mendatang. Besarnya sumbangan antara 14% - 19% dan hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah rata-rata memberikan kontribusi sebesar 3% - 12% dari PAD tahun 1999 - 2005.

d. Perangkat Daerah

Aparatur pemerintah daerah merupakan perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Melalui aparatur daerah semua urusan yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Purworejo dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan demokratisasi. Satuan kerja penyelenggaraan urusan di Kabupaten Purworejo dilaksanakan oleh segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 5 Badan, 11 Dinas, 5 Kantor, satu Inspektorat, satu Sekretariat Daerah, satu Sekretariat Dewan, tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 16 unit kecamatan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur daerah perlu disusun target pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan urusan kewenangan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing urusan dapat dilaksanakan secara maksimal dan semakin profesional. Sumberdaya manusia aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah pegawai negeri sipil (PNS). Kondisi saat ini jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Purworejo pada tahun 2005 berjumlah

12.547 orang yang terdiri dari 6.416 laki-laki (55,10%) dan 4.788 perempuan (44,9%). Apabila dilihat dari golongan pegawai, data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada Golongan III sebesar 41,95% dan Golongan IV sebesar 34,80%. Hal ini menunjukkan kualifikasi kepangkatan dan pengalaman kerja aparatur pemerintah daerah termasuk baik.

Kualifikasi PNS di Kabupaten Purworejo berdasarkan tingkat pendidikan sangat baik, karena sebagian besar berpendidikan tinggi baik Magister (S2) (0,84%), Sarjana (S-1) sebesar 25,38% dan Sarjana Muda/ sederajat. Kecenderungan meningkatnya pendidikan aparatur pemerintah daerah cukup baik, dengan fasilitasi pendidikan lanjut baik Sarjana maupun Magister (S-2). Sedangkan perbandingan penduduk dengan jumlah aparatur pemerintah daerah yaitu : 1 berbanding 65 orang penduduk, termasuk cukup baik. Perbandingan ideal jumlah PNS dengan penduduk adalah sebesar 1 berbanding 50 jiwa. Namun demikian perlu diperhatikan pula tentang tingkat pendidikan, profesionalisme aparatur dan sistem karir dengan sistem meritokrasi (merit system), sehingga penugasan pegawai berdasarkan pada bidang keahliannya.

e. Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu kewenangan untuk melakukan komunikasi secara vertikal antara pusat dengan provinsi dan provinsi dengan kabupaten/kota. Kabupaten Purworejo sudah memiliki subbag persandian yang merupakan bagian dari bagian umum. Bagian yang menangani persandian ini yaitu Bagian Umum Sekretariat Daerah, belum secara optimal dalam mengelola persandian karena sistem persandian belum sepenuhnya dipahami sebagai upaya mencapai efisiensi komunikasi pemerintahan, sehingga persandian masih dianggap sebagai sarana komunikasi antar instansi pemerintah sebagaimana biasanya.

Prediksi

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah percepatan pembangunan daerah yang akan dicapai dengan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan kelembagaan pemerintahan daerah yang mantap, aparatur pemerintah daerah yang profesional dan pelayanan publik perlu semakin ditingkatkan mengingat tantangan pembangunan daerah di masa mendatang semakin kompleks dan rumit.

Peningkatan kinerja pemerintahan daerah terutama diarahkan pada peningkatan daya saing daerah, baik sumber daya manusia, pelayanan publik dan kelembagaan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan dunia usaha. Demikian pula dengan pelaksanaan kerjasama antar daerah (misalnya : kerjasama antar kabupaten di wilayah eks Karesidenan Kedu/kedekatan geografis), baik antara pemerintah daerah, kalangan dunia usaha dan kerjasama dengan luas negeri semakin penting dalam rangka percepatan pembangunan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan penanaman modal. Pengelolaan prasarana dan sarana dapat saja dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui kerjasama operasi (*joint operation*), persewaan (*leasing*) dan *build, own and transfer (BOT)* dengan pihak lain agar dapat dicapai fektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purworejo mengatur regulasi dan penyelenggaraan fasilitasnya. Pada gilirannya nanti manfaat akan diterima oleh kalangan dunia usaha dan masyarakat umum. Prediksi pertumbuhan pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah berkembang cukup baik, dengan pertumbuhan bersifat moderat (antara 7,82 – 12,57 %).

2. Perencanaan Pembangunan

Penyusunan perencanaan pembangunan secara terpadu antara daerah dengan nasional telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 32 tahun 2004 juncto Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu selama 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu satu tahun.

Demikian pula penyusunan rencana pembangunan daerah berdasarkan urusan kewenangan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundangan sektoral, antara lain : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah, Rencana Pembangunan Sosial Budaya dan Perencanaan Prasarana Perwilayahan dan Sumber Daya Alam, Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Kawasan Pesisir sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada tahun 2006 Kabupaten Purworejo juga telah menyusun Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Purworejo.

Strategi Pengembangan Agropolitan bertujuan untuk mengembangkan kawasan tertentu di Kabupaten Purworejo (Bagelen) menjadi kawasan pusat kegiatan pertanian dengan berdasarkan pada studi kelayakan pengembangan ekonomi agropolitan dan pengembangan kawasan agropolitan serta pengembangan Sub Terminal Agribisnis.

Tuntutan perencanaan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks, karena perkembangan yang sangat dinamis lingkungan global dan regional, seperti pelaksanaan *Asian Free Trade Area (AFTA)* tahun 2010, *North American Free Trade Area (NAFTA)*, *World Trade Organization (WTO)* dan globalisasi informasi serta pasar modal perlu ditangani dengan baik dalam perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Demikian pula dengan perkembangan di dalam negeri, pelaksanaan otonomi daerah menjadikan masing-masing daerah untuk berlomba meningkatkan daya saing. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut kesiapan aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan transparansi, akuntabel dan responsibilitas pemerintah daerah.

Penyusunan rencana pembangunan daerah harus memperhatikan komitmen internasional dalam berbagai bidang pembangunan, baik berupa hasil konvensi maupun ratifikasi konvensi internasional, misalnya Konvensi Beijing (RRC) tahun 1995 tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, Deklarasi Hyogo (Kobe Jepang, 2005) tentang pengurangan resiko bencana, Kesepakatan Dakar (Senegal) tahun 2000 tentang Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), dan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) terutama tentang penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender, pendidikan dasar dan pelestarian lingkungan hidup.

Pada prinsipnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah merumuskan, menggambarkan perubahan dinamis yang berubah cepat sebagai implementasi dari liberalisasi perdagangan, keuangan dan moneter. Demikian pula dengan perubahan internal meliputi kondisi sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat setempat, agar tidak terjadi ketertinggalan budaya dan globalisasi. Demikian pula memperhitungkan pengaruh dari lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang harus diimplementasikan

dalam kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan rencana pembangunan daerah membutuhkan ketersediaan data komprehensif, mutakhir dan diharapkan dapat berupa data pilah gender sebanyak urusan kewenangan wajib dan urusan pilihan di Kabupaten Purworejo. Diharapkan penyusunan isu strategis, target kinerja dan indikator capaian hasil pembangunan dapat diperhitungkan secara kuantitatif dan menerapkan target capaian yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan kewenangan wajib, seperti pelayanan akte kependudukan, perumahan, lingkungan hidup dan lain-lain. Sedangkan untuk urusan pilihan dapat menggunakan perhitungan capaian kinerja dan indikator standar teknis yang ditetapkan pemerintah daerah sendiri.

Prediksi

Perencanaan pembangunan daerah dimana mendatang akan menjadi semakin kompleks dan rumit, karena banyak faktor yang saling mempengaruhi kebijakan. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo harus memperhitungkan kebijakan nasional dan komitmen Pemerintah Pusat terkait dengan kesepakatan internasional dan ratifikasi konvensi internasional, misalnya : Capaian Pendidikan Untuk Semua (*EFA*), Laporan *CEDAW*, Capaian Pembangunan Millenium yang ditargetkan tercapai pada tahun 2015, Laporan Pelaksanaan Hak Ekonomi dan Sosial (Ekosob). Demikian pula dengan amanat beberapa peraturan perundangan yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD), seperti : RAD Pengurangan Resiko Bencana (amanat UU No. 24 tahun 2008); RAD Pemberdayaan Perempuan (Permendagri No. 15 tahun 2008). RTRW dan Rencana Pengelolaan Kawasan Pantai.

Pada tahun 2025, diprediksikan kawasan Bagelen sudah menjadi kawasan agropolitan dan Sub Terminal Agribisnis Kalianyar berkembang menjadi terminal Agropolitan. Pengembangan kawasan Agropolitan direncanakan lebih lanjut menjadi pusat kegiatan pertanian dari berbagai wilayah termasuk dari wilayah Provinsi DIY.

Penyusunan perencanaan pembangunan dimasa mendatang memerlukan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam segenap tahap perencanaan. Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan daerah dimasa mendatang.

3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Perkembangan demokratisasi di daerah, sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah tahun 2000 meningkat cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 1999 dan 2004 yang lalu. Demikian pula dengan penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung yang pertama kali telah dapat terselenggara dengan baik, pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Purworejo secara langsung pada tahun 2005, telah terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan konflik horisontal dalam masyarakat.

Dari sebanyak 24 partai politik menjadi peserta Pemilu tahun 2004 diperoleh sembilan (9) partai politik memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo yang berjumlah 45 orang. Masing-masing dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (13 wakil); Partai Golongan Karya (Golkar) (12 wakil); Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (3 wakil); Partai Demokrat (PD) (6 kursi); Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (1 wakil); Partai Amanat Nasional (PAN) (2 wakil); Partai Keadilan (1 wakil); Partai Kebangkitan Bangsa (7 wakil). Lima partai politik yang

mendapatkan dukungan besar adalah PDI-P; Partai Golkar; PKB ; Partai Demokrat, dan PAN.

Pada Pilkada Bupati Purworejo tahun 2005 diketahui dari sebanyak 128.976 orang pemilih atau sebesar 52,22% tidak menggunakan hak pilih dan hanya sebanyak 47,77% menggunakan hak pilih. Maka pendidikan politik masyarakat terutama tentang pemahaman hak dan kewajiban warga negara, hukum dan hak asasi manusia, keterwakilan rakyat dalam politik perlu ditingkatkan dimasa mendatang.

Pengembangan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Purworejo menunjukkan perkembangan kelembagaan cukup baik. Jumlah organisasi kemasyarakatan (2005) berdasarkan profesi sebanyak 24 unit, ormas berdasarkan agama sebanyak 23 unit, ormas berdasarkan fungsi sebanyak 24 unit dan ormas berdasarkan kegiatan sebanyak 42 unit. Banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Purworejo sebanyak 15 unit dan kelompok-kelompok swadaya dalam masyarakat (KSM) terdapat di 27 kelurahan yang dibentuk berdasarkan keswadayaan masyarakat dan terkait dengan pelaksanaan program-program pembangunan.

Secara geografis Kabupaten Purworejo termasuk wilayah yang berpotensi mengalami bencana alam, antara lain tanah longsor di wilayah pegunungan, kebakaran hutan, banjir musim penghujan dan kekeringan di wilayah tertentu pada musim kemarau. Kejadian bencana alam yang pernah terjadi di 8 kecamatan pada tahun 2004 menurun menjadi sebanyak 4 kecamatan pada tahun 2005.

Korban bencana alam, antara lain korban jiwa sebanyak 16 orang pada tahun 2004 dan harta benda yang sangat merugikan masyarakat, termasuk rusaknya prasarana dan sarana umum (jalan, jembatan dan jaringan irigasi serta listrik) merugikan masyarakat. Kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan terutama kelompok rentan dan miskin, terutama perempuan dan anak-anak serta masyarakat di perdesaan terpencil. Kejadian kebakaran hutan pada tahun 2004 seluas 48 Ha dan menurun tahun 2005 seluas 46 Ha. Kebakaran hutan ini telah mengakibatkan kerugian material dan kerusakan tanaman pada hutan rakyat dan mengurangi ketertutupan lahan. Upaya penanggulangan resiko bencana menjadi hal penting dimasa mendatang sesuai amanat UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Prediksi

Kebijakan pembangunan kesatuan bangsa, menghadapi permasalahan menurunnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dirasakan semakin pentingnya dilaksanakan pendidikan kewargaan, pendidikan politik, dan menumbuhkan tertib hukum masyarakat dimasa mendatang, terutama (civic education), untuk meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban warga negara, penumbuhan partisipasi politik masyarakat, termasuk kaum perempuan dan generasi muda, sebagaimana amanat UU No 10 tahun 2008.

Terjadinya beberapa kali bencana alam, maka pemerintah Kabupaten Purworejo merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Resiko Bencana Daerah yang merupakan amanat dari UU No. 24 tahun 2008 tentang Pengurangan Resiko Bencana. Demikian pula Target Capaian Tujuan Pembangunan Millenium (*MDGs*) baik tentang peningkatan pendidikan, kesehatan, air bersih, penanggulangan kemiskinan dan lingkungan hidup sebagai komitmen secara global untuk mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan nasional. Potensi bencana alam yang sering terjadi, antara lain tanah longsor, banjir dan kekeringan maka diperlukan pendidikan penyadaran bagi masyarakat untuk

meningkatkan ketangguhan, daya tangkal dan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi resiko akibat bencana.

4. Statistik

Penyediaan data statistik di Kabupaten Purworejo berdasarkan kegunaannya terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo melalui metode sensus, survei, registrasi data dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya. Sementara itu, statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat, baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya. Dalam penyelenggaraan statistik, selama ini BPS melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bappeda, SKPD dan masyarakat.

Selama kurun waktu 1999-2005 Bappeda dan BPS Kabupaten Purworejo telah melaksanakan kegiatan penyusunan buku statistik, antara lain Kabupaten Purworejo Dalam Angka, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indikator Sosial Ekonomi, dan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi. Proses penyusunan tersebut melibatkan dinas atau instansi terkait, yang dilakukan melalui rapat koordinasi secara terpadu dan terprogram, sehingga diharapkan penyusunan buku-buku statistik tersebut dapat memberikan data yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menunjang perencanaan pembangunan perlu dikembangkan berbagai produk-produk statistik lain untuk melengkapi dokumen statistik yang telah ada. Data-data statistik yang lebih banyak masih sebatas informasi perlu dikembangkan agar dapat menyajikan indikator-indikator kunci keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, seluruh stakeholder terkait lebih mudah melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk keperluan pengambilan kebijakan di masa mendatang.

Statistik sektoral telah banyak diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah daerah, diantaranya dalam bentuk profil pendidikan, profil kesehatan, statistik perikanan dan peternakan, neraca lingkungan hidup, statistik pertanian, statistik industri dan sebagainya. Namun demikian masih banyak instansi pemerintah daerah yang belum menyelenggarakan statistik sektoral secara baik, seperti statistik ketenagakerjaan, statistik sosial, statistik pariwisata. Apabila dokumen statistik pada masing-masing sektor ini telah terintegrasi secara baik, akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan karena menggunakan data dan informasi yang akurat.

Saat ini pelayanan data statistik dilayani oleh Kantor BPS dan SKPD Kabupaten Purworejo. Masyarakat sebetulnya dapat mengakses dokumen statistik di kantor BPS tersebut, namun hal ini belum terinformasikan secara luas kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk menjamin kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat dari statistik, maka penyebaran informasi mengenai pelayanan statistik perlu terus dilaksanakan di masa mendatang serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan statistik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik pasal 17 yang menyebutkan bahwa :

- a. Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.
- b. Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

- c. Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik antara Badan, instansi pemerintah, dan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Prediksi

Perkembangan penyediaan data statistik dan informasi daerah hingga tahun 2025 diperkirakan akan meningkat sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan, dan dokumen statistik bagi kalangan dunia usaha dan masyarakat. Manajemen penyimpanan data secara elektronik semakin meningkat seiring dengan penggunaan sistem informasi manajemen di berbagai bidang pembangunan. Penyediaan data statistik juga mengalami kemajuan, tidak terbatas pada data manual, tapi juga dalam bentuk data digital, sehingga mempermudah proses akan memudahkan kalangan dunia usaha dan masyarakat semakin mudah mengakses data dan informasi tentang pembangunan daerah.

Dengan kemajuan tersebut, diperkirakan validitas dan kemutakhiran data semakin meningkat, sehingga dapat menjamin ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas. Jenis dokumen statistik yang tersusun di Kabupaten Purworejo diperkirakan juga akan semakin bervariasi, sesuai dengan keperluan pada masing-masing urusan kewenangan daerah.

5. Keperpustakaan

Pembangunan bidang perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan minat baca dan pengenalan Iptek bagi masyarakat. Karena perpustakaan menjadi pusat segala informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pembangunan di berbagai sektor. Kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan perpustakaan antara lain menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan, pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, pembinaan segala jenis perpustakaan di daerah serta kebijakan dalam penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah.

Terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan tampak fluktuatif, walaupun kadang mengalami peningkatan namun peningkatannya relatif kecil yaitu dibawah 1%, tetapi rata-rata tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan mengalami penurunan setiap tahunnya hingga mencapai 0,13% per tahun, sedangkan koleksi perpustakaan masih sangat minim sehingga hal tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Pada tahun 2005 jumlah koleksi buku perpustakaan untuk kategori buku fiksi sebanyak 5.870 eksemplar, non fiksi sebanyak 28.097 eksemplar dan khusus koleksi audio visual sebanyak 25 eksemplar.

Untuk mendukung pelayanan perpustakaan, ketersediaan tenaga perpustakaan menjadi penting karena juga dapat mempengaruhi terhadap tingkat kunjungan masyarakat. Selain itu tenaga pustakawan juga berperan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan. Secara umum jumlah tenaga perpustakaan yang tersedia cukup memadai, dari tahun 1999-2001 jumlahnya mencapai 17 orang dan memasuki tahun 2002-2003 bertambah menjadi 18 orang, namun beberapa tahun berikutnya mengalami penurunan, sampai dengan tahun 2005 berjumlah 14 orang, sedangkan tenaga pustakawan masih sangat terbatas, tahun 2000 berjumlah 7 orang, kemudian menurun pada tahun 2001 menjadi 5 orang, hingga tahun 2005 jumlahnya

menurun menjadi 5 orang. Jika dilihat trendnya menunjukkan penurunan rata-rata 0,3 per tahun.

Terkait dengan minat baca masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari sirkulasi peminjaman buku perpustakaan, secara umum menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2000 jumlah buku yang dipinjam sebanyak 7.094 eksemplar dan pada tahun 2001 menurun menjadi 5.877 eksemplar atau menurun sebesar 0,17%, namun memasuki tahun 2002 mampu meningkat menjadi 7.432 eksemplar atau sebesar 0,26% dan meningkat drastis pada tahun 2003 menjadi 22.747 eksemplar atau 2,06% namun 2 tahun berikutnya yaitu pada tahun 2005 menunjukkan penurunan mencapai 10.479 eksemplar. Secara umum arus peminjaman buku perpustakaan cukup baik, rata-rata setiap tahunnya menunjukkan peningkatan walaupun angkanya relatif kecil yaitu 0,30 % setiap tahun, sedangkan jumlah peminjamnya juga relatif baik, setiap tahunnya rata-rata meningkat 0,23%.

Untuk menjangkau masyarakat yang tidak pernah berkunjung ke perpustakaan daerah, serta untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan minat baca masyarakat, pemerintah mensiasati dengan cara meluncurkan perpustakaan keliling. Kondisi saat ini, pemerintah memiliki 2 perpustakaan keliling yang akan menjangkau masyarakat hingga ke daerah perdesaan dan daerah-daerah yang terpencil. Dengan adanya perpustakaan keliling tersebut cukup meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota perpustakaan keliling. Pada tahun 2002 jumlahnya sebanyak 704 orang dan meningkat pada tahun 2003 menjadi 1.075 orang, hingga tahun 2006 anggota perpustakaan keliling telah mencapai 3.639 orang.

Perkembangan jaman yang semakin maju menuntut tersedianya informasi yang serba cepat dan mudah diakses, sehingga keberadaan perpustakaan sebagai salah satu pusat informasi dan media belajar masyarakat akan memiliki peran yang sangat diperhitungkan terutama dalam pembangunan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus, sehingga untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, jumlah perpustakaan keliling bertambah karena dianggap sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Prediksi

Dilihat berdasarkan jumlahnya, pertumbuhan perpustakaan masyarakat dari tahun ke tahun sangat rendah, namun diprediksi masih dapat meningkat tetapi relatif sangat kecil, sedangkan keberadaan perpustakaan umum menunjukkan trend yang positif. Dilihat berdasarkan jumlah pengunjung diprediksi jumlahnya akan selalu meningkat, hal ini seiring dengan bertambahnya koleksi-koleksi perpustakaan yang diprediksi juga akan terus bertambah. Melihat kondisi wilayah, secara geografis masih ada wilayah-wilayah yang terpencil dan jauh dengan perpustakaan. Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat 3, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus, sehingga untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan diprediksi jumlah perpustakaan keliling akan semakin bertambah karena perpustakaan keliling dianggap sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, lebih-lebih masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan maka diprediksi pemerintah akan memberikan perhatian yang sangat serius terhadap perpustakaan dengan cara meningkatkan sarana prasarana perpustakaan antara lain penambahan jumlah koleksi perpustakaan tidak hanya koleksi yang berbentuk tekstual namun juga

visual. Untuk mengoptimalkan pelayanan perpustakaan, jumlah tenaga pustakawan akan semakin banyak, mengingat tuntutan terhadap pelayanan perpustakaan yang lebih profesional menjadi perhatian semua masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengelola perpustakaan, pemerintah akan semakin menggiatkan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi SDM perpustakaan sehingga semakin mendukung peran pustakawan dalam penyelenggaraan perpustakaan daerah. Jaringan kerjasama antar perpustakaan diprediksi akan dapat terwujud lebih optimal dengan melihat semakin banyaknya perkembangan jumlah perpustakaan baik perpustakaan masyarakat, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan milik badan/kantor/dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo.

6. Kearsipan

Urusan Kearsipan memiliki kewenangan dalam mendokumentasikan dan menyajikan dokumen-dokumen penting terkait dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dokumen-dokumen yang terjamin keamanan, kerahasiaan dan keasliannya dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pembuatan suatu kebijakan pembangunan daerah pada waktu yang akan datang.

Penyelenggaraan kearsipan dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan dua hal yang saling terkait. Kearsipan berkaitan erat dengan penyediaan informasi secara cepat dan akurat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mendukung dalam penyelenggaraan kearsipan, khususnya dalam pengelolaan dan penyelamatan dokumen/arsip daerah, pemerintah daerah telah memfasilitasi peningkatan sarana prasarana pendukung kearsipan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di semua satuan kerja, pemerintah melalui instansi terkait juga telah memberikan pembinaan terhadap SDM bidang kearsipan melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan tentang kearsipan. Demi menjaga hubungan kerjasama antar satuan kerja dalam pengelolaan dokumen/arsip daerah, maka secara rutin juga dilakukan penguatan jaringan dan koordinasi antar SKPD untuk tetap menjaga kualitas pemeliharaan dan pengelolaan dokumen/arsip daerah.

Akuisi arsip yang telah dilakukan pada tahun 2005-2006 mencapai 25%, sedangkan jumlah arsip dinamis inaktif yang berhasil dikelola dari mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 terus menunjukkan peningkatan, namun rata-rata peningkatannya kecil yaitu 1,04% per tahun. Dalam rangka menjaga kualitas arsip yang tersimpan, telah dilakukan upaya-upaya penyelamatan dan pelestarian terhadap arsip baik yang berbentuk tekstual, gambar, foto, film dan lain-lain. Upaya lain yang dilakukan untuk menyelamatkan arsip yang mengandung nilai sejarah dilakukan melalui reproduksi arsip, biasanya hal ini dilakukan terhadap foto-foto kuno dan memiliki nilai sejarah bagi Kabupaten Purworejo.

Melihat perkembangan pembangunan di berbagai sektor, serta sejalan dengan upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), penyelenggaraan urusan kearsipan semakin dituntut lebih profesional. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan, pemerintah daerah mendukung dalam hal penyempurnaan Sistem Administrasi Kearsipan, bentuk dukungannya antara lain dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dalam penyelenggaraan kearsipan. Era digital yang sudah sedemikian populer menjadi peluang yang strategis untuk dilakukan penduplikasian arsip statis menjadi arsip digital sehingga akan semakin banyak arsip yang dapat dilestarikan. Dalam rangka meningkatkan penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah, kualitas SDM bidang kearsipan dituntut harus semakin terampil dan profesional sehingga kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis akan semakin sering diselenggarakan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan kearsipan yang semakin berkualitas.

Prediksi

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kearsipan dimasa mendatang akan semakin penting dengan penggunaan teknologi digital, sehingga penyimpanan arsip baik surat, naskah, film dan foto serta berbagai bentuk arsip lainnya dimasa mendatang jumlahnya meningkat secara kuantitas dan kualitas. Ketersediaan prasarana dan sarana komputer sangat penting bagi penyelenggaraan dan pelayanan kearsipan. Era digital yang sudah sedemikian populer menjadi peluang yang strategis untuk dilakukan penduplikasian arsip statis menjadi arsip digital sehingga diprediksi akan semakin banyak arsip yang dapat dilestarikan.

Dalam rangka meningkatkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, kualitas SDM bidang kearsipan dituntut harus semakin terampil dan profesional sehingga 20 tahun mendatang kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis akan semakin sering diselenggarakan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan kearsipan yang semakin berkualitas.

J. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Lingkungan Hidup

Di kabupaten Purworejo potensi air berasal dari air permukaan dan air tanah. Wilayah Kabupaten Purworejo dialiri oleh lima sungai, yaitu Kali Bogowonto, Kali Kodil, Kali Jali, Kali Gebang, Kali Bedono, dan anak-anak sungainya. Sungai-sungai ini termasuk kedalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu-Luk Ulo, yang bermuara di Samudra Indonesia dan hulu sungai-sungai tersebut umumnya berada di bagian tengah dan utara kabupaten. Sumber air ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti irigasi, air minum, sanitasi, sumber tenaga, transportasi, dan industri. Potensi sumber air di Kabupaten Purworejo yang telah dikembangkan dengan baik, baru untuk air minum dan irigasi, sedang untuk keperluan lainnya belum digarap dengan maksimal.

Perkembangan wilayah, kegiatan industri dan pertanian masyarakat menyebabkan daya dukung lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) semakin berkurang. Kerusakan DAS akan berakibat pada menurunnya daya serap tanah terhadap air hujan, sehingga berpotensi menimbulkan bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan. Pada musim kemarau wilayah yang mengalami kekurangan air untuk pertanian dan kebutuhan rumah tangga semakin bertambah, sehingga banyak petani mengalami kegagalan panen (puso). Sementara itu, pencemaran sungai di Kabupaten Purworejo lebih banyak disebabkan oleh pencemaran dari limbah rumah tangga dan pemakaian pestisida di daerah pertanian.

Kabupaten Purworejo tidak memiliki hutan kawasan lindung, sehingga penyangga tata air di areal kawasan hutan produksi hanya mengandalkan kawasan lindung di luar kawasan hutan, kawasan hutan produksi dan hutan rakyat. Kawasan lindung diluar kawasan hutan luasnya hanya 25.241,12 ha (24,39%), sedangkan luas hutan produksi sebesar 6.843,76 ha (6,61%). Sementara itu kawasan budidaya luasnya mencapai 71.397,11 ha (68,99%). Dari luasan tersebut, kawasan lindung diluar kawasan hutan sebagian besar kondisinya agak kritis (54,57%), lainnya kritis (35,76%), potensial kritis (8,06%), sangat kritis (0,74%), dan tidak kritis (0,69%). Kawasan hutan produksi sebagian besar dalam kondisi potensial kritis (31,19%), lainnya agak kritis 28,65%), kritis

(27,11%), sangat kritis (12,06%), dan tidak kritis (0,99%). Sementara itu lahan budidaya pertanian di Kabupaten Purworejo sebagian besar kondisinya tidak kritis (64,50%), lainnya potensial kritis (12,97%), agak kritis (11,23%), kritis (10,75%), dan sangat kritis (0,55%).

Tingkat ketaatan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara pada kegiatan usaha/industri yang ada di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu enam tahun terakhir masih rendah. Penegakan aturan untuk menerapkan industri bersih juga masih menghadapi kendala, karena industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara sebagian besar adalah industri rumah tangga. Industri rumah tangga tersebut mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk memenuhi ketentuan teknis dan administrasi dalam pengolahan limbah.

Pada tahun 2005 jumlah industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran air mencapai 429 unit usaha, terdiri dari industri tekstil, percetakan, batik, tapioka, dan tahu. Sebagian besar dari industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran air tersebut berupa industri rumah tangga (95,10%), lainnya industri kecil (3,96%), industri sedang (0,70%), dan industri besar (0,23%). Sementara itu sumber tidak bergerak yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara, yaitu industri tekstil (1 buah), industri pembuatan batu bata (1.255 buah) dan industri batu kapur (17 buah). tersebut akan menghadapi kendala pembiayaan. Kondisi ini menggambarkan masih buruknya kepedulian para pelaku usaha terhadap pencegahan pencemaran air dan udara, dan belum bisa optimalnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun-tahun mendatang permasalahan lingkungan hidup akan lebih berat dan kompleks. Jumlah usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara akan semakin meningkat, baik dari sisi jenis maupun besarannya. Di sisi lain masyarakat akan semakin terbuka untuk menyuarkan keluhan atas ketidaknyamanan akibat pencemaran lingkungan. Bentuk, jenis dan intensitas kerusakan lahan juga akan meningkat, karena tekanan terhadap lahan oleh aktivitas masyarakat juga terus berkembang. Oleh karena itu pemerintah kabupaten dituntut untuk mampu memberikan akses informasi secara lebih cepat dan akurat terhadap kerusakan lahan yang terjadi.

Prediksi

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memiliki komitmen dan respons yang bagus terhadap keluhan masyarakat mengenai gangguan lingkungan. Namun demikian sampai dengan tahun 2025 yang akan datang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah, terutama terkait dengan menurunnya kualitas lingkungan, ancaman bencana alam (banjir, kekeringan dan longsor). Demikian pula semakin meningkatnya jumlah keluhan masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas penanganan, dari tahun 2001 sampai dengan 2009 tercatat sebanyak 50 buah, semua keluhan tersebut telah mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah. Keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebagian besar disebabkan oleh gangguan pencemaran air dan udara, dan kerusakan lahan. Gangguan pencemaran air diantaranya ditimbulkan oleh industri kecap, tahu, RPH; gangguan pencemaran udara (bau dan debu) diantaranya ditimbulkan oleh peternakan ayam dan penggilingan padi. Hal ini penting sekali untuk mendapatkan perhatian mengingat permasalahan tersebut terkait erat dengan kegiatan industri pengolahan dan usaha pertanian. Sedangkan kerusakan lahan dan kawasan diantaranya disebabkan oleh kegiatan pertambangan/galian C, terutama penambangan tanpa ijin (PETI).

Masalah gangguan lingkungan sampai dengan 2025 sangat berpotensi meningkat antara lain dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global (*global warming*) karena di satu sisi jenis dan jumlah kegiatan yang berpotensi menimbulkan

gangguan lingkungan, anomali musim terus bertambah dan semakin menurunnya daya dukung lingkungan. Hal ini akan berdampak pada hasil pertanian, kondisi lahan dan bencana alam. Disamping itu, kekritisian masyarakat terhadap juga akan selalu meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka dimasa mendatang penegakkan hukum lingkungan dan penerapan sanksi secara tegas sangat penting untuk dilaksanakan, penyelidikan oleh PPNS di bidang lingkungan perlu dilakukan, demikian pula upaya-upaya yang telah dilakukan harus terus dikembangkan di masa mendatang.

2. Kehutanan

Hutan merupakan sumberdaya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia, namun demikian masih sering diabaikan oleh berbagai kepentingan. Pertama, fungsi hutan sebagai penjaga iklim dan tata air bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30% dari total hamparan daratan (Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Berdasarkan fungsi utamanya, kawasan hutan di Kabupaten Purworejo terdiri dari hutan produksi seluas 8.430,80 ha dan hutan produksi terbatas seluas 606,80 ha. Keberadaan hutan produksi dan hutan produksi terbatas ini sangat berperan dalam penyerapan air hujan dan menjaga kualitas udara sesuai dengan fungsinya sebagai paru-paru kota. Oleh karena itu keberadaan hutan harus tetap dipertahankan melalui pengelolaan yang baik dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat secara partisipatif.

Fungsi hutan kedua, adalah hutan sebagai sumber bahan baku untuk mendukung industri daerah, baik hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan lainnya. Hasil hutan di Kabupaten Purworejo terdiri dari kayu jati, kayu mahoni kayu pinus, getah pinus, dan kayu bakar. Hasil hutan kayu jati menunjukkan penurunan dari sebanyak 563 m³ pada tahun 1999, menjadi 102,97 m³ pada tahun 2004. Hasil hutan kayu mahoni pada tahun 1999 mencapai 478 m³, namun menurun drastis menjadi 37,86 m³ pada tahun 2000. Sementara itu hasil hutan kayu pinus cenderung meningkat walaupun fluktuatif, yaitu dari sebanyak 1.929 m³ pada tahun 1999, menjadi 9.361 m³ pada tahun 2002, dan menjadi 4.063 m³ pada tahun 2005. Produksi getah pinus juga cenderung meningkat walaupun fluktuatif, dari sebanyak 1.642.677 kg pada tahun 1999, menjadi 2.845.444 kg pada tahun 2004 dan menjadi sebanyak 1.991.970 kg pada tahun 2005.

Fungsi hutan ketiga, adalah sebagai pusat konservasi kekayaan plasma nutfah (khususnya kawasan suaka alam, taman nasional dan taman hutan raya). Fungsi ketiga hutan selama ini belum memperoleh hasil yang optimal, karena semakin terdesak oleh berbagai kepentingan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada semakin menurunnya keanekaragaman hayati berbagai spesies flora dan fauna yang ada di Kabupaten Purworejo. Untuk mempertahankan fungsi hutan ketiga tersebut, diperlukan pengelolaan dan perlindungan hutan secara optimal agar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai media pendidikan sekaligus sebagai obyek wisata. Perlunya pemberdayaan masyarakat desa disekitar hutan, baik melalui LMDH maupun pengeluaran kelompok-kelompok masyarakat secara swadaya.

Prediksi

Pada tahun 2025 diprediksikan luas hutan produksi semakin berkurang, luasan hutan produksi mulai terdesak oleh kebutuhan permukiman dan pengembangan ekonomi lainnya. Luas hutan produksi turun menjadi kurang lebih 7.500 ha. Sedangkan hutan produksi terbatas sama dengan tahun 2025, diprediksikan tetap. Namun demikian apabila konservasi berjalan dengan baik, luasan hutan produksi bisa bertambah. Sedangkan luas hutan lindung pada tahun 2025 diperkirakan meningkat seiring dengan semakin

meningkatnya aktivitas konservasi hutan dan lahan kritis. Luas hutan lindung pada tahun 2025 diprediksikan sebesar 560 ha. Dengan demikian secara bertahap capaian kegiatan konservasi harus dilaksanakan dengan target bertahap yaitu pada tahun 2010 sebesar 461,50 ha, tahun 2015 menjadi seluas 491,4 ha, pada tahun 2020 menjadi sebesar 520 ha.

Jumlah hasil hutan pada tahun 2025 untuk hutan produksi mengalami penurunan walau tidak secara drastis. Kayu jati diprediksikan tidak banyak. Sedangkan produksi kayu pinus pada tahun 2025 fluktuatif namun cenderung meningkat. Produksi kayu pinus pada tahun 2025 meningkat menjadi 4.724 m³. Sedangkan produksi getah pinus pada tahun 2025 diprediksikan meningkat. Produksi getah pinus pada tahun 2025 sebesar 2.987.347 kg.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Penggunaan sumber daya listrik di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan. Sejak tahun 2004 jangkauan pelayanan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mencakup seluruh desa/kelurahan sehingga tingkat elektrifikasi desa telah mencapai 100%. Jumlah pelanggan listrik pada tahun 2004 sebanyak 139.539 pelanggan dengan daya tersambung sebesar 89.546.140 VA dan listrik terjual sebesar 130.670.379 *Kilo Watt Hours* (Kwh) meningkat pada tahun 2005 menjadi sebesar 142.901 pelanggan dengan daya tersambung sebesar 92.046.130 VA dan listrik terjual sebesar 137.147.054 Kwh. Sebagian besar pelanggan listrik adalah rumah tangga kecil (kategori pelanggan R-1 dengan daya tersambung sampai dengan 1.300 VA).

Besarnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Purworejo pada tahun 2004 - 2005 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, hal ini dapat dikerahui dari jumlah BBM yang disalurkan, meliputi minyak tanah, premium, minyak solar dan pertamax, secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: tahun 2004-2005 jumlah penyalur minyak tanah tidak mengalami peningkatan yaitu sebanyak 4 unit. Untuk jumlah minyak yang disalurkan pada tahun 2004 sebanyak 26.785 kiloliter, tahun 2005 jumlah minyak yang disalurkan menurun menjadi 25.090 kiloliter. Jumlah penyalur minyak solar dari tahun 2004-2005 mengalami peningkatan. Tahun 2004 jumlah pengecer sebanyak 6 unit dan tahun 2005 meningkat menjadi sebanyak 8 unit, namun untuk jumlah minyak solar yang disalurkan mengalami penurunan tahun 2004 jumlah minyak solar yang disalurkan sebanyak 16.898 kiloliter, tahun 2005 menurun menjadi 16.872 kiloliter. Sementara untuk jumlah penyalur minyak premium dari tahun 2004-2005 mengalami peningkatan. Tahun 2004 jumlah penyalur 6 unit dan tahun 2005 sebanyak 8 unit. Minyak premium yang disalurkan tahun 2004 sebanyak 29.992 kiloliter dan tahun 2005 meningkat menjadi 30.888 kiloliter, seiring dengan meningkatnya mekanisasi dari berbagai aktivitas masyarakat.

Kabupaten Purworejo memiliki potensi bahan tambang cukup banyak, antara lain penambangan Galian C (pasir, kerikil, pasir batu, pasir urug, tanah liat, dan tanah urug dan lain-lain). Banyaknya SIPD (Surat Ijin Pertambangan Daerah), pada usaha penggalian pasir dan batu di Kabupaten Purworejo (2005) sebanyak 13 unit usaha dengan luas areal penggalian sebesar 11,61 Ha dan tanah urug sebanyak 1 unit usaha dengan areal seluas 0,94 Ha, dengan hasil retribusi pertambangan sebesar Rp. 66.884.000,00. Kabupaten Purworejo juga memiliki potensi tambang yang lain seperti pasir besi, mangan, emas dan beberapa yang lain dengan cadangan deposit cukup besar.

Namun perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan lingkungan di kawasan pertambangan galian C adalah masih terdapat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat, tidak berijin dan pengelolaannya kurang memperhatikan kelestarian

lingkungan. Hal ini akan mengakibatkan kerusakan kawasan daerah aliran sungai, kawasan penambangan galian C yang tidak direklamasi menimbulkan degradasi lingkungan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan dan penggalian yang telah memiliki SIPD dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian dan upaya pelestarian lingkungan. Diharapkan eksploitasi dan eksplorasi kawasan pertambangan tidak akan menjadikan kerusakan lingkungan, sumber air tanah dan kelestarian hutan.

Prediksi

Pertumbuhan penggunaan listrik menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3% – 5% secara nasional (Bappenas, 2008) terutama meningkatnya penggunaan listrik untuk kebutuhan usaha kecil dan menengah. Peningkatan permintaan tenaga listrik dalam dua tahun terakhir terkendala oleh terbatasnya kemampuan pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN dalam hal ini PT (Persero) Indonesia Power. Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor di masa mendatang perlu mendapatkan perhatian untuk dikurangi, karena sejak Indonesia keluar dari anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) tahun 2002, kita telah menjadi pengimpor BBM (net importir) untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Maka dimasa mendatang upaya pengurangan perlu pengurangan penggunaan BBM dengan upaya menggunakan bahan bakar alternatif dan meningkatkan manajemen angkutan massal yang hemat bahan bakar minyak (seperti kereta api rel disel (KRD) dan KRL komuter/ antar kota).

Pengelolaan pertambangan dan galian C perlu dukungan penegakkan hukum lingkungan dan penertiban perijinan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) secara ketat agar kegiatan pertambangan lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengelolaan kawasan pertambangan dan penggalian Golongan C telah mengakibatkan kerusakan lahan, berkurangnya sumber air bersih, degradasi lahan dan hutan. Upaya pengawasan, penegakkan hukum, dan penerapan sanksi dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Peningkatan pengawasan sosial dapat dilakukan melalui Sistem Pengawasan Masyarakat (Siwasmas) secara swadaya dengan membentuk gugus tugas di tingkat desa/kelurahan di lokasi penambangan agar penegakkan hukum lingkungan semakin ditingkatkan. Karena masyarakat setempat yang akan mengalami kerugian kalau tidak dilakukan reklamasi dan konservasi lahan. Potensi pertambangan yang lain (pasir besi, mangan, emas, dll) juga perlu dikelola dengan baik agar nantinya dapat bermanfaat bagi kesejahteraan kabupaten secara menyeluruh. Beberapa program yang telah ada seperti Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT) di kawasan pesisir dengan salah satunya terdapat pertambangan pasir besi dapat menjadi daya ungkit ekonomi daerah melalui sektor pertambangan.

BAB III

ISU-ISU PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1. Masih Rendahnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk-Produk Pertanian dan Belum Optimalnya Penggunaan Sumberdaya Pertanian.

Kegiatan usaha pertanian dalam arti luas memberikan sumbangan terbesar PDRB Kabupaten Purworejo, namun produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian masih perlu ditingkatkan, baik untuk tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Hasil produksi padi sawah dari tahun 2001 – 2004 mengalami penurunan yang cukup berarti, yaitu dari 289.787 ton pada tahun 2001 menurun menjadi 257.918.787 ton pada tahun 2005. Pada tahun 2005 produksi padi menioingkat lagi menjadi 280.699 ton. Produktivitas sawah sedikit meningkat dari 5,212 ton/ha pada tahun 2001 menjadi 5,653 ton/ha pada tahun 2005.

Untuk tanaman bahan pangan yang lain, yaitu tanaman jagung dan kedelai, dari tahun 2001 sampai tahun 2005 menunjukkan perkembangan yang positif. Luas panen jagung pada tahun 2001 adalah 1.508 ha dengan jumlah produksi sebesar 4.760 ton, dan pada tahun 2005 luas panen dan jumlah produksinya berturut-turut meningkat menjadi 3.444 ha dan 30.146 ton. Hal ini juga menunjukkan terjadinya peningkatan produktivitas lahan jagung dari 3,156 ton/ha pada tahun 2001 menjadi 8,753 ton/ha pada tahun 2005.

Produksi kedelai menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu dari 3.183 ton dengan luas lahan 2.351 ha pada tahun 2001 menjadi 3.157 ton dengan luas lahan 2.230 ha pada tahun 2005. Produktivitas lahan kedelai sedikit mengalami peningkatan dari 1.354 ton/ha pada tahun 2001 menjadi 1.411 ton/ha pada tahun 2005.

Pada sektor peternakan, Kabupaten Purworejo juga memiliki potensi yang cukup besar, antara lain daging, telur dan susu. Pada tahun 2001 produksi daging sapi dan kambing/domba berturut-turut adalah 432.673 kg dan 288.008 kg. Pada tahun 2005 produksi daging sapi dan kambing/domba berturut-turut meningkat menjadi sebesar 447.949 kg dan 332.328 kg.

Produksi telur unggas di Kabupaten Purworejo dari tahun 2001 sampai tahun 2001 mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Produksi telur ayam ras dari tahun 2001 sampai tahun 2005 secara umum mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu dari 568.335 kg menjadi 202.421 kg, sedangkan telur unggas lainnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 produksi telur ayam buras 1.108.143 butir, telur itik 451.431 butir dan telur puyuh 51.372 kg. Pada tahun 2005 produksi telur ayam buras sebanyak 13.761.294 butir, telur itik sebanyak 8.587.786 butir, dan telur puyuh sebesar 622.566 kg.

Produksi susu sapi dan susu kambing di Kabupaten Purworejo dari tahun 2001 sampai 2005 mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 produksi susu sapi adalah sebesar 228.926 liter, sedang produksi susu kambing adalah sebesar 260 liter. Pada tahun 2005 produksi susu sapi sedikit meningkat menjadi 447.949 liter, sedangkan susu kambing meningkat menjadi 70.527 liter.

Kabupaten Purworejo memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari sebanyak 7,86 ton atau senilai Rp 31.636.000,00 pada tahun 2000, menjadi sebanyak 33,62 ton senilai 136.161.000,00 pada tahun 2002. Namun demikian pada tahun selanjutnya jumlah produksi terus

menurun menjadi 15,52 ton senilai Rp 74.044.000,00 pada tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh rusaknya habitat ikan, kondisi cuaca yang tidak menentu dan tingginya biaya operasional melaut nelayan, sehingga jumlah nelayan berkurang.

Produksi perikanan tambak memiliki kecenderungan meningkat dari sebanyak 57,4 ton pada tahun 2000 menjadi sebanyak 249,10 ton pada tahun 2004. Nilai produksi perikanan dalam kurun waktu yang sama juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp 434.805.000,00 pada tahun 2000, menjadi Rp 1.928.044.000,00 pada tahun 2004, dan menurun menjadi Rp 1.829.086.000,00 pada tahun 2005. Peningkatan jumlah produksi perikanan ini disebabkan semakin intensifnya pengembangan budidaya perikanan, dan semakin luasnya tambak yang digunakan untuk budidaya perikanan dari sebanyak 70,00 ha di tahun 2000 menjadi 151,00 ha di tahun 2004 dan tahun 2005.

Dari semua jenis perikanan yang ada di Kabupaten Purworejo, produksi perikanan budidaya kolam memiliki produksi paling tinggi, dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,6% per tahun. Pada tahun 2000 produksi perikanan kolam hanya sebanyak 290,98 ton atau senilai Rp 2.000.487.000,00, dan terus meningkat menjadi 478,83 ton senilai Rp 3.559.102.000,00 pada tahun 2005. Peningkatan produksi perikanan budidaya di kolam ini antara lain disebabkan semakin intensifnya budidaya perikanan darat, meningkatnya luasan kolam, dan semakin tingginya permintaan ikan, baik dari dalam maupun luar daerah.

Terhadap berbagai produksi hasil pertanian (dalam arti luas) di Kabupaten Purworejo belum banyak dilakukan pengolahan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi, upaya-upaya yang dilakukan di bidang pertanian ini lebih banyak mengarah pada peningkatan produktivitas (*on farm*). Sedangkan upaya *off farm* masih rendah, oleh karena itu nilai tambah atas produk-produk pertanian ini masih relatif rendah.

Pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya pertanian di Kabupaten Purworejo belum optimal. Dari tahun 2001 sampai 2005 tidak terdapat perubahan jumlah prasarana irigasi sawah di Kabupaten Purworejo. Dari 27.677,14 ha sawah yang ada, 20.921,34 ha (75,59%) memiliki irigasi teknis, 4.402,92 ha (15,91%) memiliki irigasi setengah teknis dan 2.352,88 ha (8,5%) memiliki irigasi sederhana. Irigasi teknis terdiri dari irigasi primer sepanjang 188,710 km, sekunder sepanjang 301,494 km, dan tertier sepanjang 50,750 km. Untuk irigasi nonteknis sepanjang 53,517 km.

Perbandingan luas tanah sawah dan tanah kering di Kabupaten Purworejo tahun 2001-2005 tidak berubah, yaitu tanah sawah 30.626,97 ha (29,6%) dan tanah kering 72.854,78 ha (70,4%).

2. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah ditunjukkan oleh tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Purworejo. Tahun 2004 penduduk di Kabupaten Purworejo masih didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD yaitu sebesar 36 %. Persentase penduduk tamat SLTP sebesar 19%, tamat SMU sebesar 8%, kemudian sebanyak 17 % masih belum tamat SD dan 11 % tidak/belum bersekolah. Penduduk berpendidikan perguruan tinggi hanya 1%. Sedangkan pada tahun 2006 persentase penduduk tamat SD menurun menjadi sebesar 33%, tamat SLTP meningkat menjadi 21%, tamat SMU sebesar 10 %, sebanyak 17 % belum tamat SD dan 9 % tidak/belum bersekolah. Sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan tamat perguruan tinggi meningkat menjadi sebesar 2 %. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM Kabupaten

Purworejo relatif rendah namun ada kecenderungan meningkat.

Selain pendidikan, kualitas SDM juga dilihat dari kualitas derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo. Isu pembangunan kesehatan di Kabupaten Purworejo adalah masih tingginya beberapa penyakit menular seperti malaria, DBD dan TB Paru. Kabupaten Purworejo merupakan daerah endemis malaria di Jawa Tengah. Jumlah kasus malaria pada tahun 2005 sebanyak 22.886 penderita. Selain itu juga penderita DBD pada tahun 2005 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2000. Jumlah penderita DBD pada tahun 2005 sebanyak 11 kasus. Sedangkan kasus TB Paru Pada tahun 2003 jumlah penderita positif TB Paru sebesar 221 orang meningkat pada tahun 2005 menjadi 243 orang. Pada tahun 2005 persentase kesembuhan TB Paru hanya mencapai 34%.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo pada tahun 2004 sebesar 68,7, jika dibandingkan tahun 2005 mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 69,1. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 68,9 pada tahun 2004 dan 69,8 pada tahun 2005.

Jika dilihat dari masing-masing komponen pembentukan IPM pada tahun 2005 adalah sebagai berikut : AHH sebesar 68,9 tahun; rata-rata lama sekolah 7,0 tahun; angka melek huruf sebesar 86,9 % dan rata-rata pengeluaran per kapita (per bulan) sebesar Rp. 623.000,00.

3. Belum Optimalnya Infrastruktur dan Masih Rendahnya Dukungan Stakeholder Dalam Kegiatan Penanaman Modal Daerah.

Prasarana jalan di Kabupaten Purworejo terbagi menjadi jalan kabupaten dan jalan provinsi. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo, Kondisi dan panjang jalan kabupaten dapat dijelaskan sebagai berikut : tahun 2000 panjang jalan 719,61 km, dengan kondisi jalan baik 298,14 km, rusak ringan 207,40 km, rusak berat 214,07 km. Tahun 2005 terjadi peningkatan panjang jalan menjadi 764,29 km, dengan kondisi jalan baik sepanjang 412,78 km, rusak ringan 135,06 km, dan rusak berat 216, 45 km.

Untuk kondisi dan panjang jembatan kabupaten tahun 2000 panjang jembatan 3.387,70 m, dengan kondisi baik 2.630,00 m (78%), rusak ringan 408,80 m (12%), dan rusak berat 348,90 m (10%). Tahun 2005 panjang jembatan meningkat menjadi 3.656,70 m, dengan kondisi baik 2.082,20 (57%) m, rusak ringan 791,30 m (22%), dan rusak berat 782,60 m (21%).

Dukungan stakeholder dalam kegiatan penanaman modal belum optimal. Stakeholder dalam penanaman modal antara lain pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta perbankan. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan langkah-langkah meningkatkan investasi dunia usaha dan berkembangnya sektor riil namun sampai dengan tahun 2005 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Belum banyak kebijakan yang mendukung iklim usaha yang kondusif. Diperlukan berbagai kebijakan, antara lain meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mendukung kebijakan pemerintah yang pro investasi dan mendorong berkembangnya sektor riil. Kebijakan tersebut adalah penciptaan kondisi sosial dan politik yang kondusif bagi investor baik melalui fasilitasi pelayanan perijinan secara terpadu, kepastian hukum, promosi investasi, intermediasi perbankan,

ketenagakerjaan, penyediaan infrastruktur yang memadai dan kebijakan tata ruang yang konsisten.

4. Masih Kurang Profesionalnya Aparatur Pemerintah Daerah, dan Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Asas Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Serta Belum Membudayanya *E-Government*.

PNS berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui sebagian besar aparatur berpendidikan tinggi, baik sarjana muda, sarjana maupun magister. Kondisi saat ini jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Purworejo pada tahun 2005 berjumlah 12.547 orang yang terdiri dari 6.416 laki-laki (55,10%) dan 4.788 perempuan (44,9%). Apabila dilihat dari golongan pegawai, data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada Golongan III sebesar 41,95% dan Golongan IV sebesar 34,80%. Hal ini menunjukkan kualifikasi kepangkatan dan pengalaman kerja aparatur pemerintah daerah termasuk baik.

Kualifikasi PNS di Kabupaten Purworejo berdasarkan tingkat pendidikan sangat baik, karena sebagian besar berpendidikan tinggi baik Magister (S2) (0,84%), Sarjana (S-1) sebesar 25,38% dan Sarjana Muda/ sederajat. Kecenderungan meningkatnya pendidikan aparatur pemerintah daerah cukup baik, dengan fasilitasi pendidikan lanjut baik Sarjana maupun Magister (S-2). Sedangkan perbandingan penduduk dengan jumlah aparatur pemerintah daerah yaitu : 1 berbanding 65 orang penduduk, termasuk cukup baik. Perbandingan ideal jumlah PNS dengan penduduk adalah sebesar 1 berbanding 50 jiwa. Namun demikian perlu diperhatikan pula tentang tingkat pendidikan, profesionalisme aparatur dan sistem karir dengan sistem meritokrasi (merit system), sehingga penugasan pegawai berdasarkan pada bidang keahliannya belum optimal. Daya tanggap (responsiveness) aparatur terhadap permasalahan yang dihadapi belum optimal.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang berlangsung sejak tahun 2000, pengembangan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan tertib hukum di daerah, peningkatan pelayanan publik dan demokratisasi di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan umum mengacu pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan mendasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik belum dilaksanakan secara optimal. Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan citra pemerintah yang semakin baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju terwujudnya *good governance* baik di tingkat Kabupaten Purworejo, kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.

Dimasa yang akan datang tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis informasi teknologi (IT) dalam bentuk electronic-governemnet (e-government) menjadi harapan semua pihak, namun kondisi saat ini di Kabupaten Purworejo e-government masih belum membudaya dikalangan aparat maupun masyarakat.

5. Belum Optimalnya Upaya-Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dari tahun ke tahun telah menunjukkan peningkatan. Tahun 1999 PAD Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 7.078,86 juta meningkat menjadi sebesar Rp. 32.833,00 juta pada tahun 2005, atau meningkat

sebesar Rp 25.754,14 juta selama enam tahun, atau meningkat sebesar 363,81%. Atau rata-rata meningkat sebesar 121,27% per tahun.

Namun demikian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut masih dirasakan belum memadai dibandingkan peningkatan APBD Kabupaten Purworejo. Sumbangan PAD terhadap APBD pada tahun 1999 sebesar 6,42%, dan pada tahun 2005 sebesar 9,71%. Walaupun proporsi PAD terhadap APBD sudah menunjukkan peningkatan, namun masih terlalu kecil sumbangannya terhadap APBD. Besarnya APBD Kabupaten Purworejo tahun 1999 sebesar Rp. 110.278,02 juta meningkat menjadi sebesar Rp. 388.140,00 juta pada tahun 2005. Atau meningkat sebesar Rp. 227.861,98 juta selama enam tahun. Hal ini mengingat tingginya kebutuhan dana pembangunan daerah dan menjalankan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purworejo. Masih rendahnya PAD ini menjadikan ketergantungan Kabupaten Purworejo pada sumber dana pembangunan yang berasal dari Pemerintah Pusat, melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih sangat tinggi.

6. Menurunnya Kesadaran dan Semangat Kebangsaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Salah satu masalah yang timbul dalam pembangunan politik di era otonomi daerah adalah menurunnya kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemahaman hak dan kewajiban warga negara serta kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah menurunnya penggunaan hak pilih yang dapat diketahui dari pelaksanaannya Pemilu 2004 sebesar 85,18%, pada Pilpres 2004 putaran pertama sebesar 82,56%, putaran kedua sebesar 80,47% dari jumlah pemilih. Menurunnya penggunaan hak pilih terjadi pula dalam Pilkada Bupati tahun 2005 sebesar 74,95% dan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah secara langsung yang pertama kali sebesar 62,46%. Menurunnya penggunaan hak pilih disebabkan oleh masih rendahnya pendidikan politik dan pendidikan kewargaan (*civic education*) dan keterwakilan politik masyarakat. Sebagaimana amanat UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Menurunnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara dapat berdampak pada menurunnya semangat kepahlawanan, ketahanan nasional dan menurunnya kualitas kehidupan berdemokrasi di daerah.

7. Kurang Terintegrasinya Pengelolaan Sumberdaya Lokal dan Lingkungan Hidup Guna Mendukung Pembangunan Berkelanjutan serta Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata.

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain sering mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut dan berbagai bentukan ruang terbuka lainnya. Kedua hal ini umumnya merugikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Di lain pihak, kemajuan alat dan pertambahan jalur transportasi dan sistem utilitas, sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan. Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan RTH sebagai suatu teknik *bioengineering* dan bentukan *biofilter* yang relatif lebih murah, aman, sehat, dan menyamankan.

Kabupaten Purworejo memiliki beberapa ruang terbuka hijau diantaranya hutan yang mencapai 32.738,75 Ha yang terbagi atas hutan rakyat 25.895,00 Ha dan Hutan Negara 6.843,75 Ha. Sebaran hutan sendiri terdapat di bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo seperti Kecamatan Bruno, Pituruh, Kemiri, Bener, Gebang, Kaligesing, dan Loano.

Kondisi saat ini banyak sumber mata air di Kabupaten Purworejo yang terancam mati, jika kondisi lingkungan seperti sekarang ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya usaha penyelamatan dengan cara konservasi lingkungan di sekitar sumber mata air. Jumlah mata air di Kabupaten Purworejo Tahun 2005 berjumlah 43 tempat. Sumber air itu 7 berada di wilayah unit pelaksana teknis (UPT) Pengairan Loano, 4 di wilayah UPT Purworejo, 1 di wilayah UPT Kutoarjo, 6 di wilayah UPT Kemiri, dan sisanya 25 di wilayah UPT Purwodadi. Sumber mata air itu sebagian ada yang dikelola desa untuk MCK tapi ada juga yang dikelola oleh PDAM. Pemkab Purworejo hanya mengelola sumber air yang ada di sungai untuk keperluan irigasi. Diperkirakan dalam jangka waktu 10 hingga 15 tahun sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Purworejo akan mati. Matinya sumber mata air itu, tidak lepas dari ulah manusia, seperti melakukan penggundulan pohon yang ada di sekitar sumber mata air. Padahal seperti diketahui, pohon menjadi penyimpan utama air.

Berdasarkan data sepuluh tahun terakhir jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Purworejo menunjukkan penurunan. Pada tahun 2000 merupakan puncak kunjungan wisata sebanyak 152.365 pengunjung nusantara, yang mengunjungi 7 obyek wisata di Kabupaten Purworejo. Mulai tahun 2000-2005 mengalami penurunan tiap tahunnya rata-rata mencapai 15%. Tetapi pada tahun 2006 mengalami peningkatan, menjadi sebanyak 184.848 pengunjung nusantara, dari tahun 2005 sebanyak 116.815 pengunjung. Sedangkan wisatawan mancanegara di tahun 2005 hanya 125 pengunjung, di tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2006 hanya sebesar 47 pengunjung. Hal ini disebabkan adanya isu gangguan keamanan dan masih lemahnya pengelolaan pariwisata di Kabupaten Purworejo, minimnya jumlah asosiasi pariwisata hanya 1 buah, pameran wisata 1 kali dalam setahun dan promosi wisata hanya rata 3 kali dalam setahun.

8. Terbatasnya Lapangan Kerja, Rendahnya Upah Kerja dan Masih Rendahnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penurunan Angka Kemiskinan.

Besarnya UMK Purworejo Tahun 2003 sebesar Rp.350.000,-, pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 410.000,- Sedangkan Besarnya KHL Purworejo Tahun 2003 sebesar Rp. 424.069,- tahun 2005 meningkat Rp. 473.967,87. Sementara jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2004 sebanyak 417.571 jiwa, pada tahun 2005 turun menjadi 413.799. Sedangkan untuk angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan tahun 2004 sebanyak 16.002 turun menjadi 7.816 jiwa tahun 2005.

Sementara untuk pencari kerja pemegang kartu kuning tahun 2001 sebesar 20.389 jiwa dan meningkat tahun 2005 menjadi 24.747 jiwa. Untuk pencari kerja yang sudah ditempatkan tahun 2001 sebanyak 1.950 jiwa, tahun 2005 turun menjadi 1.247 jiwa. Pencari kerja yang ditempatkan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang masih belum terserap. Tahun 2001 jumlah pencari kerja yang belum terserap sebanyak 5.376 jiwa meningkat tahun 2005 menjadi 34.518 jiwa.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purworejo, dari tahun 2002-2006 mengalami penurunan. Hal ini dapat diketahui dari jumlah penduduk miskin (2002)

sebesar 175.500 orang atau sebesar 22,81% menurun menjadi sebesar 162.300 orang atau sebesar 20,90% pada tahun 2006.

Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2005, jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Purworejo tahun 2005 sebanyak 157.100 RTM, tahun 2006 meningkat menjadi sebesar 162.300 RTM, 146.000 RTM atau sebesar 22,77%, dari jumlah penduduk Kabupaten Purworejo saat itu. Jumlah RTM terbanyak berada di Kecamatan Bruno.

9. Belum Terpenuhinya Kualitas Hidup yang Memadai (Kemudahan Akses Pelayanan Publik dan Jaminan Keamanan).

Pemerataan dan perluasan akses memperoleh kesempatan pendidikan diukur melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Transisi (AT). APK PAUD di Kabupaten Purworejo cenderung mengalami pertumbuhan. Tahun 2004 sebesar 30,12 % meningkat pada tahun 2005 menjadi 30,56% atau mengalami pertumbuhan 1,5 %. APK SD di Kabupaten Purworejo cenderung mengalami pertumbuhan tahun 2003 APK SD Sebesar 110,19%, meningkat tahun 2005 sebesar 112,30%. Sedangkan untuk APK jenjang pendidikan SLTP pada tahun 1999 APK sebesar 92,56%, tahun 2000 meningkat menjadi 95,98%. Tahun 2001 APK meningkat kembali menjadi 98,75% dan terus meningkat menjadi 99,75% pada tahun 2002. Tahun 2003 APK SLTP di kabupaten Purworejo meningkat lagi menjadi 99,89% dan meningkat lagi menjadi 103,45% tahun 2004. Mulai tahun 2004-2008 APK SLTP sudah diatas 100% yaitu tahun 2005 sebesar 102,12%. APK SLTA di Kabupaten Purworejo masih dibawah angka 100%. APK SLTA mengalami pertumbuhan yang fluktuaktif Tahun 2004 APK SLTA sebesar 58,65% menurun menjadi 57,79% pada tahun 2005.

Angka APM SD tahun 1999-2008 Menunjukkan pertumbuhan yang fluktuaktif. Tahun 2000 APM SD 78,79%. Tahun 2001 APM meningkat menjadi 80,45%, namun menurun pada tahun 2002 menjadi 79,76%. Tahun 2003 APM SD menurun kembali menjadi 78,67%. Tahun 2004 APM meningkat menjadi 81,23%, tahun 2005 meningkat lagi menjadi 82,21%. APM SLTP tahun 2003 sebesar 84,34%, tahun 2005 meningkat sebesar 85,35%.

Sementara untuk Usia Harapan Hidup di Kabupaten Purworejo tahun 2004 sebesar 68,40 tahun 2005 meningkat menjadi 69,10 tahun dan meningkat lagi tahun 2006 menjadi 70,20 tahun.

Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Purworejo tahun 2000 – 2005 cenderung fluktuatif. Kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2003, yaitu sebanyak 22 orang (217 per 100.000 kelahiran hidup). Jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2005 adalah 11 orang (108,8 per 100.000 kelahiran hidup). Sementara itu, jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga tahun 2005 mencapai 89,22%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil di seluruh wilayah termasuk perdesaan.

Jumlah kematian bayi dari tahun 2000 – 2005 mengalami penurunan. Pada tahun 2000 jumlah kematian bayi yang meninggal sebanyak 147 bayi (13,95 per 1.000 kelahiran hidup) menurun pada tahun 2005 menjadi 129 bayi (12,76 per 1.000 kelahiran). Menurunnya jumlah kematian bayi menunjukkan peningkatan pelayanan kesehatan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Kematian balita disebabkan antara lain oleh pertolongan persalinan yang kurang

baik, infeksi penyakit, dan status gizi yang tidak baik. Status gizi balita dalam tahun 2000-2005 di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan. Persentase gizi buruk pada tahun 2003 sebesar 2,83% mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 1,21%. Sedangkan persentase balita dengan BGM (Bawah Garis Merah) pada tahun 2000 – 2005 mengalami kenaikan. Pada tahun 2000 persentase BGM sebesar 0,88% meningkat pada tahun 2005 menjadi 1,07%.

10. Masih Kurangnya Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Masih Rendahnya Pemberdayaan Gender Serta Pelindungan Anak.

Tolok ukur untuk melihat keberhasilan peningkatan kesetaraan laki-laki perempuan adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator komposit hampir sama dengan IPM. Perbedaannya adalah IPG telah dipilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). IPG Kabupaten Purworejo menunjukkan angka rendah. Hal itu menunjukkan masih adanya kesenjangan gender (antara perempuan dan laki-laki) yang cukup besar pada indikator yang sama (melek huruf, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup dan pendapatan). Dibandingkan dengan angka nasional dan Jawa Tengah, IPG dan IDG Kabupaten Purworejo secara umum masih berada di bawah angka rata-rata nasional dan Jawa Tengah. Untuk ranking Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purworejo termasuk cukup baik, yaitu peringkat 164 untuk Nasional (dari 370 kabupaten/kota) dan untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah relatif rendah yaitu peringkat 21 (dari 35 kabupaten/kota).

IPG Kabupaten Purworejo sebesar 59,7 tahun 2004 meningkat menjadi 61,0 pada tahun 2006 angka ini menunjukkan kategori cukup. Dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, maka IPG Kabupaten Purworejo masih berada di bawah angka rata-rata Jawa Tengah. Sedangkan besarnya IDG Kabupaten Purworejo tahun 2005 sebesar 56,9 menurun menjadi 55,4 pada tahun 2006. Besarnya IDG tersebut termasuk kategori cukup rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah sebesar 59,3 pada tahun 2006. Rendahnya IDG Kabupaten Purworejo antara lain disebabkan faktor pendidikan perempuan, tenaga kerja perempuan bekerja profesional dan keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah.

Sementara untuk jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Purworejo yang sudah pernah ditangani tahun 2005 sebanyak 14 kasus, tahun 2006 meningkat menjadi 24 kasus. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap anak tahun 2005 sebanyak 18 kasus, meningkat tahun 2006 menjadi 22 kasus. Sementara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2005 sebanyak 8 kasus, tahun 2006 meningkat menjadi 17 kasus

BAB IV

VISI DAN MISI KABUPATEN PURWOREJO

A. Visi

Mendasarkan pada situasi kondisi, potensi dan peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Purworejo serta analisis atas isu-isu penting Kabupaten Purworejo dalam jangka panjang 20 tahun kedepan, maka dirumuskanlah visi jangka panjang Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

“Purworejo Daerah Agribisnis yang Maju, Berdaya Saing, Mandiri, Lestari dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut diatas terdiri dari enam frase pembentuk kalimat yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Daerah Agribisnis

Kabupaten Purworejo memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dalam arti luas, dan disadari sepenuhnya bahwa potensi yang besar ini belum tergarap secara optimal. Bermodalkan potensi pertanian yang sangat besar inilah Kabupaten Purworejo bercita-cita menjadi daerah agribisnis yang maju yaitu daerah dengan basis pertanian berteknologi maju, memiliki produktivitas komoditas pertanian yang tinggi dan berkembang kearah industri dan perdagangan berbasis pertanian. Nilai tambah yang tinggi dari aktivitas agrobisnis ini diharapkan menjadi penghela terwujudnya kesejahteraan masyarakat Purworejo di masa yang akan datang.

2. Maju

Maju, dicirikan adanya dukungan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengembangan agribisnis, dengan tingkat pelayanan publik yang memuaskan, didukung oleh sistem pemerintahan yang transparan dan partisipatif, akuntabel dan demokratis, ditopang oleh kondisi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, didukung teknologi komunikasi dan informasi yang memadai.

3. Berdaya Saing

Berdaya Saing, memiliki keunggulan, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah dan di Indonesia pada umumnya. Keunggulan ini ditunjukkan oleh berbagai hal meliputi kualitas sarana prasarana, kualitas pendidikan masyarakat yang tinggi atau lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya, memiliki daya tarik dan keunggulan kompetitif dalam menarik investasi, dan produktivitas dunia usaha dan produktivitas SDM yang tinggi atau lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Produk-produk yang dihasilkan oleh Purworejo memiliki keunggulan dari segi kualitas maupun harga yang dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional.

4. Mandiri.

Mandiri, Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan diharapkan Kabupaten Purworejo memiliki derajat ketergantungan yang rendah. Hal ini diperlihatkan oleh semakin besarnya proporsi PAD dalam struktur APBD Purworejo, ketahanan pangan, dan menurunnya kesenjangan wilayah. Dari sektor swasta ditunjukkan oleh pemakaian bahan baku lokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku impor dalam proses produksi.

5. Lestari.

Lestari, yang dimaksudkan adalah kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan tidak terjadi kerusakan, baik pada lingkungan alam maupun lingkungan binaan. Terjadinya konservasi sumberdaya alam sehingga dapat menjamin berlangsungnya kehidupan yang lebih baik, dengan tetap mendukung berkembangnya usaha dan investasi. Selain itu daerah memiliki daya tanggap dan kepekaan terhadap isu global yang terjadi misalnya tentang perubahan iklim (*climate change*). Dalam hal ini daerah memiliki upaya untuk ikut serta dalam berkontribusi dalam mengurangi resiko terjadinya perubahan iklim dan juga memiliki aksi untuk melakukan mitigasi atau mengurangi resiko terjadinya bencana.

6. Sejahtera.

Sejahtera, yang dimaksudkan adalah daerah yang dihuni oleh masyarakat yang bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagiaan lahir ditunjukkan oleh tingginya derajat kesehatan, tingginya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat pendapatan per kapita, kecukupan sandang, pangan dan papan (perumahan). Sedangkan kebahagiaan batin yang dimaksudkan adalah tingginya penghayatan terhadap agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketenteraman dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

B. Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas, melalui pendayagunaan, pengembangan, dan mengoptimalkan potensi pertanian, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri, perdagangan, dan jasa.** yaitu meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian melalui berbagai upaya budidaya dan intensifikasi sehingga dicapai tingkat produktivitas lahan yang optimal. Disisi lain kualitas hasil-hasil pertanian selalu ditingkatkan untuk memperoleh nilai tambah dan tingkat keuntungan yang semakin tinggi, dengan tetap memperhatikan peruntukan tata ruang dan mempertimbangan dampak penurunan produksi yang mungkin terjadi. Potensi pertanian dalam arti luas yang cukup tinggi di Kabupaten Purworejo ini perlu diupayakan pemanfaatannya secara optimal tidak terbatas pada sisi *on farm* (produksi) saja namun juga dari sisi pasca panen, yaitu industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa pertanian antara lain pengembangan wisata agro.

Produksi komoditi pertanian diupayakan untuk dilakukan pengolahan ataupun sentuhan tertentu sehingga memiliki nilai atau harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan adanya peningkatan nilai tambah pertanian ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Terkait dengan misi ini yang ingin diwujudkan adalah ketahanan pangan masyarakat. Ketahanan pangan memiliki arti jumlah yang memadai, keamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi dan adanya jaminan ketersediaan dan keterjangkauan. Untuk memenuhi unsur tersebut dikembangkan pemanfaatan sumberdaya (pangan) lokal sehingga tidak tergantung pada daerah lain.

- 2. Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah.** Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran. Kemudahan dalam perijinan investasi, insentif daerah penciptaan kondisi keamanan perlu terus diwujudkan. Upaya-upaya ini perlu pula didukung oleh upaya promosi yang sistematis dan terkonsep dengan baik untuk menarik investasi. Upaya ini dilakukan melalui desiminasi temuan-temuan teknologi terutama teknologi tepat guna dan mengembangkan sikap masyarakat untuk tidak resisten terhadap penggunaan tehnologi. Upaya ini perlu pula didorong oleh kegiatan penelitian dan pengembangan tehnologi untuk lebih memberikan ruang bagi berkembangnya kearifan-kearifan lokal dalam tehnologi.
- 3. Meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan.** Salah satu tolok untuk melihat kemandirian daerah adalah melalui peningkatan persentase pendapatan daerah dalam mendukung anggaran belanja daerah, oleh karena itu peningkatan pendapatan daerah ini perlu terus menerus diupayakan peningkatannya baik melalui pajak daerah, retribusi maupun pengembangan badan usaha milik daerah. Semua upaya yang dilakukan harus tetap memperhatikan aspek kemampuan bayar (*ability to pay*) masyarakat dan mempertimbangkan dampak buruk yang mungkin timbul yang bisa bersifat kontra produktif.
- 4. Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat yang tinggi.** Upaya mewujudkan *good and clean governance* merupakan hal yang mutlak harus dilakukan, demikian pula aspek keamanan dan keteriban umum, untuk lebih menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat. Disamping itu upaya ini sangat penting artinya bagi penciptaan citra derah yang aman dan tenteram, untuk memberikan daya tarik bagi Kabupaten Purworejo. Aparatur yang profesional menjamin terwujudnya pemerintahan efisien dan menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah perlu didukung oleh semangat

keterbukaan yang salah satunya dapat dicapai melalui implementasi e-government. Peningkatan partisipasi baik masyarakat umum sangat tinggi artinya dalam menopang suksesnya pembangunan daerah, karena sesungguhnya masyarakat umum memiliki potensi partisipasi yang tinggi untuk ikut mengembangkan daerah.

- 5. Mewujudkan masyarakat yang produktif, berpendidikan, dan memiliki kompetensi dengan pertumbuhan yang terkendali.** Disadari sepenuhnya bahwa jumlah penduduk yang tinggi memicu permasalahan-permasalahan kependudukan yang rumit, oleh sebab itu pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi perhatian utama dalam mewujudkan visi Kabupaten Purworejo. Upaya pengendalian jumlah penduduk tersebut dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia kearah yang lebih unggul dalam ketrampilan, kompetensi dan produktivitas.
- 6. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan.** Upaya-upaya ini diharapkan dapat lebih menjamin atau terjadinya percepatan terhadap perwujudan wilayah yang lestari dan perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera. Pelestarian budaya dengan memelihara kearifan-kearifan lokal yang dimiliki akan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap pengaruh negatif budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Demikian pula upaya-upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan penuh kesadaran segenap pemangku kepentingan akan lebih menjamin kelestarian dan pengembangan pariwisata serta keberlanjutan pembangunan daerah.
- 7. Mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera lahir batin, berakhlak mulia dengan penghayatan yang tinggi terhadap ideologi Pancasila, dan penghargaan yang tinggi terhadap agama, HAM, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak.** Ideologi Pancasila yang telah diyakini mengandung nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa perlu terus dikembangkan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik. Penghormatan yang tinggi terhadap agama dan HAM merupakan salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat sehat dan sejahtera demikian pula penghapusan terhadap diskriminasi dan upaya-upaya untuk menjamin kesejahteraan serta kehidupan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

BAB V

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2005 - 2025

A. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purworejo

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas, pendayagunaan potensi pertanian (*agrobisnis*) secara optimal, dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri, perdagangan, dan jasa.
2. Terwujudnya iklim yang kondusif untuk menarik investor dan mewujudkan industri, jasa, dan infrastruktur melalui upaya transformasi teknologi dan kelembagaan guna mendorong kemajuan daerah.
3. Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang optimal guna mendukung pembangunan.
4. Terwujudnya aparatur dan pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dan swasta yang tinggi.
5. Terwujudnya masyarakat yang memiliki tingkat penghormatan tinggi pada agamanya, berkepribadian, berakhlak mulia, produktif, berpendidikan, dan memiliki kompetensi dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali.
6. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.
7. Terwujudnya masyarakat yang sehat, sejahtera lahir dan batin, berpenghidupan layak, dengan penghayatan yang tinggi terhadap agama dan ideologi Pancasila, perlindungan HAM, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak

B. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purworejo

Misi 1 : Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas, melalui pendayagunaan, pengembangan, dan mengoptimalkan potensi pertanian, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri, perdagangan, dan jasa. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas.
2. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan peningkatan keamanan penyediaan dan distribusi pangan
3. Meningkatkan produksi perikanan dan daya saing produk-produk perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian sumberdaya kelautan.
4. Meningkatkan pelayanan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah
5. Mengoptimalkan Pengelolaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konservasi sumberdaya air untuk memelihara keberadaan, keberlanjutan sumberdaya air sehingga tersedia dalam kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik masa sekarang dan generasi mendatang

Misi 2 : Mewujudkan Iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi secara optimal terutama dalam rangka pengembangan industri dan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan industri kecil, menengah dan besar melalui pengembangan produk-produk lokal.
3. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan perdagangan produk unggulan daerah melalui peningkatan prasarana dan sarana perdagangan.

Misi 3 : Meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pungutan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada.
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru dengan tetap memperhatikan produktivitas masyarakat.

Misi 4: Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat yang tinggi. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penegakan hukum dan HAM untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan demokrasi di daerah.
3. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum, persandian dan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah.
6. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung bagi pengembangan sistem informasi manajemen data secara digital yang mudah diakses oleh SKPD.
7. Meningkatkan pelayanan penyediaan data/ informasi yang lengkap dan mutakhir bagi perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan usaha.

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang produktif, berpendidikan, dan memiliki kompetensi dengan pertumbuhan yang terkendali. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing melalui penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas
2. Mengoptimalkan pengembangan budaya membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis
3. Peningkatan pengelolaan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang handal, akuntabel dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan pembangunan
4. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana
5. Peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian

bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.

6. Mewujudkan pelayanan transmigrasi yang profesional dan peningkatan jumlah transmigran
7. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta mengoptimalkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.

Misi 6 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan listrik dan efisiensi penggunaan minyak, gas dan listrik serta pengelolaan pertambangan sesuai dengan kelestarian lingkungan.
2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkesinambungan.
3. Pemanfaatan produk-produk kehutanan dan jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya hutan.
4. Melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian serta peningkatan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestic serta lama tinggalnya
5. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya tradisional yang mantap yang mampu menjadi filter bagi masuknya budaya asing dan modern

Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera lahir batin, berakhlak mulia dengan penghayatan yang tinggi terhadap ideologi Pancasila, dan penghargaan yang tinggi terhadap agama, HAM, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak.

1. Mewujudkan derajat kesehatan melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan
2. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan dan penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
4. Mengoptimalkan pembangunan ideologi bangsa, pembangunan politik, peningkatan tertib hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) diarahkan untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang luhur berdasarkan dan nilai-nilai demokrasi berdasarkan dasar negara.
5. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak yang menjamin perkembangan generasi muda yang berkualitas

C. Tahapan Dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mengemban pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah, dirumuskanlah agenda pembangunan jangka panjang daerah yang disusun dengan berdasarkan atau mengacu pada substansi misi pembangunan jangka panjang daerah. Setiap agenda pembangunan jangka panjang daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Substansi visi, misi, agenda, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Mengingat akan pentingnya hal di atas, maka perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan jangka menengah daerah.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar itu, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

C.1 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah I (Tahun 2005-2009)

Misi 1 : Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas, melalui pendayagunaan, pengembangan, dan mengoptimalkan potensi pertanian, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri, perdagangan, dan jasa. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas.
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dan kapasitas sumberdaya manusia sektor pertanian.
 - b. Pengembangan diversifikasi usaha budidaya komoditas pertanian non beras yang diimbangi oleh kegiatan intensifikasi.
 - c. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
 - d. Pengembangan komoditas perkebunan unggulan dengan pola agribisnis menuju kawasan agropolitan
 - e. Pengembangan produk perkebunan melalui pengelolaan pasca panen.
 - f. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat veteriner dalam penguasaan alih teknologi peternakan
 - g. Peningkatan modal usaha, produktivitas dan kualitas hasil peternakan
 - h. Peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya pertanian dalam arti luas.
2. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan peningkatan keamanan penyediaan dan distribusi pangan
 - a. Pengembangan penyediaan pangan dan diversifikasi bahan pangan dengan fokus pada pengembangan penyediaan pangan ditingkat kabupaten.
 - b. Pengembangan sistem distribusi dan keterjangkauan pangan sampai ke pelosok desa.
 - c. Peningkatan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan.
3. Meningkatkan produksi perikanan dan daya saing produk-produk perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian sumberdaya kelautan.
 - a. Peningkatan kapasitas permodalan bagi pembudidaya perikanan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan.
 - b. Peningkatan kapasitas pembudidaya perikanan terhadap teknologi perikanan.
 - c. Peningkatan infrastruktur penunjang pembudidayaan perikanan.
 - d. Peningkatan usaha pengolahan produk perikanan dan suplai bahan bakunya.
 - e. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan.
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap.
 - g. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia rumah tangga nelayan.
4. Meningkatkan pelayanan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah
 - a. Peningkatan sistem transportasi yang berkualitas dan mendukung aktivitas ekonomi
 - b. Perbaikan kondisi jalan yang mengalami kerusakan
 - c. Peningkatan aksesibilitas melalui Perbaikan jaringan transportasi

- d. Peningkatan, penataan, dan pelayanan angkutan umum serta peningkatan keamanan keselamatan dan ketertiban lalu lintas
5. Mengoptimalkan Pengelolaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konservasi sumberdaya air untuk memelihara keberadaan, keberlanjutan sumberdaya air sehingga tersedia dalam kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik masa sekarang dan generasi mendatang
- a. Peningkatan Perlindungan dan pelestarian sumberdaya air
 - b. Peningkatan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
 - c. Peningkatan fungsi prasarana dan sarana sumberdaya air
 - d. Pengendalian erosi melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen daerah aliran sungai (DAS)

Misi 2 : Mewujudkan Iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi secara optimal terutama dalam rangka pengembangan industri dan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - a. Peningkatan proses perijinan daerah yang mendukung peningkatan penanaman modal.
 - b. Pengembangan informasi potensi dan peluang investasi daerah.
2. Pengembangan industri kecil, menengah dan besar melalui pengembangan produk-produk lokal.
 - a. Pengembangan potensi daerah menjadi bidang usaha yang lebih produktif dengan menumbuhkan usaha berbasis sumberdaya lokal.
 - b. Peningkatan SDM dan pengembangan teknologi usaha pengolahan.
 - c. Pengembangan unit usaha yang dikelola masyarakat.
 - d. Pengembangan sistem informasi industri.
3. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah secara berkelanjutan.
 - a. Pengembangan kualitas kelembagaan dan kegiatan/usaha koperasi dan UMKM.
 - b. Pengembangan struktur permodalan koperasi dan UMKM
 - c. Pemberdayaan potensi wirausaha baru.
4. Meningkatkan perdagangan produk unggulan daerah melalui peningkatan prasarana dan sarana perdagangan.
 - a. Peningkatan akses perdagangan
 - b. Peningkatan kontribusi pasar daerah terhadap PAD
 - c. Peningkatan usaha perdagangan dan jasa dengan memanfaatkan komoditas hasil pertanian
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai sampai ke pelosok desa

Misi 3 : Meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pungutan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada.

- a. Peningkatan tata kelola untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pemungutan.
 - b. Peningkatan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dalam membayar pajak.
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru dengan tetap memperhatikan produktivitas masyarakat.
- a. Peningkatan ketersediaan potensi pajak dan retribusi serta jenis pendapatan daerah lainnya.

Misi 4: Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat yang tinggi. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penegakan hukum dan HAM untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah.
 - a. Peningkatan peraturan perundangan di daerah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
 - b. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan daerah.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan demokorasi di daerah.
 - a. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis.
3. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum, persandian dan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah
 - a. Peningkatan pelayanan administrasi umum, persandian dan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - a. Peningkatan aparatur pemerintah desa/kelurahan dan meningkatnya peran kelembagaan desa/kelurahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah.
 - a. Penyediaan perangkat lunak sistem informasi manajemen data secara digital.
 - b. Peningkatan komitmen, tanggungjawab dan kapasitas aparat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
6. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung bagi pengembangan sistem informasi manajemen data secara digital yang mudah diakses oleh SKPD.
 - a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya sistem informasi manajemen data yang akurat dan akuntabel
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana jaringan sistem informasi antar SKPD
7. Meningkatkan pelayanan penyediaan data/ informasi yang lengkap dan mutakhir bagi perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan usaha.
 - a. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antar pihak-pihak SKPD dalam pelayanan data secara cepat dan akurat.

- b. Peningkatan kapasitas aparat dalam memberikan pelayanan data untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- c. Peningkatan komitmen dan tanggungjawab aparat dalam pelayanan data dan informasi secara cepat dan handal

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang produktif, berpendidikan, dan memiliki kompetensi dengan pertumbuhan yang terkendali. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing melalui penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas
 - a. Peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak pada jenjang pendidikan dasar dan non formal
 - b. Peningkatan mutu pendidikan dengan titik berat pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan non formal
 - c. Peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk dan peningkatan pendidikan kecakapan hidup dan keaksaraan fungsional.
 - d. Peningkatan daya saing pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan kejuruan
 - e. Tercapainya proporsi SMK : SMA 50:50
 - f. Terbinanya PAUD
 - g. Berkembangnya pendidikan tinggi
 - h. Meningkatnya kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan
2. Mengoptimalkan pengembangan budaya membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis
 - a. Peningkatan sarana prasarana perpustakaan
 - b. Peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
3. Peningkatan pengelolaan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang handal, akuntabel dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan pembangunan
 - a. Peningkatan kerjasama dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil antar SKPD
 - b. Peningkatan komitmen dan tanggungjawab aparat dalam penyediaan data kependudukan dan catatan sipil secara berkala
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil
4. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana
 - a. Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
5. Peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
 - a. Peningkatan kompetensi dan kemandirian generasi muda
 - b. Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang dengan titik berat pada cabang olahraga unggulan.
 - c. Peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan
 - d. peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga

6. Mewujudkan pelayanan transmigrasi yang profesional dan peningkatan jumlah transmigran
 - a. Peningkatan pelayanan ketransmigrasian dalam upaya peningkatan jumlah transmigran
 - b. Peningkatan kerjasama dengan daerah tujuan transmigran
7. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta mengoptimalkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
 - a. Peningkatan kesempatan kerja dan berkurangnya jumlah pengangguran.
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja
 - c. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
 - d. Peningkatan minat pencari kerja

Misi 6 Mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan listrik dan efisiensi penggunaan minyak, gas dan listrik serta pengelolaan pertambangan sesuai dengan kelestarian lingkungan.
 - a. Peningkatan pelayanan listrik dan sumber daya energi bagi kebutuhan rumah tangga dan kalangan dunia usaha
 - b. Peningkatan pengawasan dan perijinan pertambangan daerah secara terpadu.
2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkesinambungan.
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peningkatan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
 - c. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup ditingkat kabupaten untuk mengatasi tantangan penurunan daya dukung lingkungan.
3. Pemanfaatan produk-produk kehutanan dan jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya hutan.
 - a. Pengendalian kualitas hutan rakyat dengan fokus pada pembudidayaan kehutanan dan pengendalian kegiatan eksploitasi melalui peningkatan kesadaran masyarakat.
 - b. Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa sekitar hutan.
 - c. Penciptaan jejaring kerja yang kuat antar pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
 - d. Peningkatan pengusaha hasil hutan non kayu serta jasa lingkungannya
4. Melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian serta peningkatan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestic serta lama tinggalnya
 - a. Peningkatan kualitas obyek wisata dan daya tarik wisata berbasis keragaman budaya, pesona alam dan keunikan lokal.
 - b. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dibidang pariwisata.
 - c. Peningkatan promosi dan jejaring pariwisata dalam meningkatkan jumlah wisatawan.
5. Mewujudkan pelastarian nilai-nilai budaya tradisional yang mantap yang mampu menjadi filter bagi masuknya budaya asing dan modern
 - a. Peningkatan seni dan budaya daerah

- b. Peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya tradisional yang menjadi identitas daerah.
- c. Peningkatan ketahanan budaya yang mampu menjadi filter bagi masuknya budaya asing dan modern yang negatif

Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera lahir batin, berakhlak mulia dengan penghayatan yang tinggi terhadap ideologi Pancasila, dan penghargaan yang tinggi terhadap agama, HAM, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan derajat kesehatan melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan
 - a. Peningkatan pelayanan Puskesmas dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan pelayanan RSUD
 - b. Peningkatan dan pembinaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat
 - c. Pelayanan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin
 - d. Peningkatan kesehatan lingkungan
 - e. Penanganan gizi buruk pada masyarakat
 - f. Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit endemik menular dan tidak menular
2. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
 - a. Pengurangan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan dan penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan PMKS
 - b. Peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penanganan PMKS
 - c. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan PMKS dan Bencana
4. Mengoptimalkan pembangunan ideologi bangsa, pembangunan politik, peningkatan tertib hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) diarahkan untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang luhur berdasarkan dan nilai-nilai demokrasi berdasarkan dasar negara.
 - a. Penataan tata peraturan perundangan daerah dalam rangka peningkatan tertib hukum dan penghargaan HAM
 - b. Pendidikan karakter bangsa dan disiplin dalam masyarakat
 - c. Peningkatkan pendidikan politik masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi politik, peran lembaga perwakilan rakyat dan demokratisasi.
5. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak yang menjamin perkembangan generasi muda yang berkualitas
 - a. Peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kecakapan hidup (*life skill*) bagi perempuan.
 - b. Peningkatan perlindungan dan jaminan tumbuh kembang anak dalam bidang kesehatan.

C.2 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah II (Tahun 2010-2014)

Misi 1 : Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas, melalui pendayagunaan, pengembangan, dan mengoptimalkan potensi pertanian, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri, perdagangan, dan jasa. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas.
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan permodalan usaha pertanian dalam arti luas.
 - b. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dibidang pertanian.
 - c. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dengan fokus pada pengembangan produk unggulan daerah.
 - d. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil peternakan dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM dan penyediaan sarana dan prasarana peternakan.
2. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan peningkatan keamanan penyediaan dan distribusi pangan
 - a. Pengembangan penyediaan pangan dan diversifikasi bahan pangan dengan fokus pada pengembangan penyediaan pangan ditingkat kecamatan.
 - b. Peningkatan distribusi dan keterjangkauan pangan sampai ke pelosok desa.
 - c. Peningkatan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat dengan fokus pada pengembangan sistem jaminan perlindungan keamanan pangan.
3. Meningkatkan produksi perikanan dan daya saing produk-produk perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian sumberdaya kelautan.
 - a. Peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar dengan fokus pada peningkatan akses permodalan.
 - b. Peningkatan produksi perikanan budidaya air payau dengan fokus pada peningkatan akses permodalan dan penyediaan infrastruktur pembudidayaan perikanan.
 - c. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan pendapatan nelayan dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana produksi dan peningkatan akses permodalan.
 - d. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan dengan fokus pada peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah
 - a. Pengendalian dan pengaturan sistem transportasi
 - b. Mempertahankan kualitas dan kuantitas jalan
 - c. Peningkatan dan penataan pelayanan angkutan umum
 - d. Penataan sarana transportasi antar dan intermoda untuk memperlancar akses perekonomian.
5. Mengoptimalkan Pengelolaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konservasi sumberdaya air untuk memelihara keberadaan, keberlanjutan sumberdaya air sehingga tersedia dalam kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik masa sekarang dan generasi mendatang
 - a. Pemeliharaan fungsi resapan air
 - b. Pengembangan konservasi sumberdaya air dan perlindungan sumberdaya air
 - c. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan.

- d. Peningkatan dan Pengendalian erosi melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen daerah aliran sungai (DAS)

Misi 2 : Mewujudkan Iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi secara optimal terutama dalam rangka pengembangan industri dan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - a. Peningkatan iklim investasi melalui penataan regulasi tentang penanaman modal.
 - b. Peningkatan capaian target investasi melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi daerah.
 - c. Peningkatan kerjasama antar daerah dibidang investasi.
2. Pengembangan industri kecil, menengah dan besar melalui pengembangan produk-produk lokal.
 - a. Peningkatan nilai tambah produk industri melalui peningkatan kapasitas SDM dibidang industri
 - b. Pengembangan produk industri daerah melalui penggalian sumberdaya lokal, terutama hasil-hasil pertanian dan perkebunan.
 - c. Pengembangan industri daerah melalui penguatan kelembagaan masyarakat.
3. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah secara berkelanjutan.
 - a. Pengembangan usaha koperasi dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan.
 - b. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan usaha.
 - c. Diversifikasi produk hasil usaha mikro, kecil dan menengah dengan fokus pada penggalian potensi daerah
4. Meningkatkan perdagangan produk unggulan daerah melalui peningkatan prasarana dan sarana perdagangan.
 - a. Pengembangan perdagangan daerah dengan fokus pada peningkatan sarana prasarana perdagangan kecil (pasar) ditiap kecamatan.
 - b. Peningkatan akses dan perijinan usaha perdagangan kecil, menengah dan besar.
 - c. Peningkatan perlindungan konsumen dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen.
 - d. Peningkatan fasilitasi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat sampai pelosok desa.

Misi 3 : Meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pungutan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada.
 - a. Peningkatan tata kelola pendapatan daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah yang syah lainnya.
 - b. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru dengan tetap memperhatikan produktivitas masyarakat.
 - a. Pengkajian dan peningkatan penetapan jenis-jenis pajak dan retribusi baru serta jenis pendapatan daerah lainnya.

Misi 4: Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat yang tinggi. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penegakan hukum dan HAM untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah.
 - a. Pemantapan peraturan perundangan di daerah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan penegakan HAM di daerah.
 - b. Peningkatan partisipasi dan kesadaran dalam pembangunan daerah.
 - c. Peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui kerjasama masyarakat dengan polisi
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan demokorasi di daerah.
 - a. Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan serta penempatan aparatur sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi (merit system).
3. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum, persandian dan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah
 - a. Peningkatan pelayanan umum secara cepat dan mudah serta pelayanan perijinan secara terpadu/ OSS.
 - b. Peningkatan jumlah kesepakatan kerjasama antar daerah dalam peningkatan promosi dan investasi di daerah.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan desa/kelurahan dalam peningkatan kecakapan hidup untuk peningkatan kesejahteraan.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah.
 - a. Pengembangan sistem informasi manajemen data statistik pendukung perencanaan pembangunan secara digital.
 - b. Peningkatan pastispasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui pemanfaatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan
6. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung bagi pengembangan sistem informasi manajemen data secara digital yang mudah diakses oleh SKPD.
 - a. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk mewujudkan kualitas sistem informasi manajemen data yang akurat dan akuntabel
 - b. Peningkatan jaringan sistem pelayanan informasi data antar SKPD secara digital.

7. Meningkatkan pelayanan penyediaan data/ informasi yang lengkap dan mutakhir bagi perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan usaha.
 - a. Peningkatan pelayanan penyediaan data dan informasi yang lengkap dan mutakhir bagi perencanaan pembangunan daerah .
 - b. Menumbuhkan budaya tertib administrasi dalam pengolahan dan penyediaan data.
 - c. Peningkatan kerjasama multi pihak dalam pelayanan data/ informasi yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang produktif, berpendidikan, dan memiliki kompetensi dengan pertumbuhan yang terkendali. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing melalui penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas
 - a. Peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dengan titik berat pada pendidikan menengah dan non-formal
 - b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan titik berat pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan non formal
 - c. Peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk dan peningkatan pendidikan kecakapan hidup dan keaksaraan fungsional.
 - d. Peningkatan daya saing pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan kejuruan
 - e. Tercapainya proporsi SMK : SMA 60:40
2. Mengoptimalkan pengembangan budaya membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis
 - a. Peningkatan sarana prasarana serta pengelolaan perpustakaan
 - b. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
3. Peningkatan pengelolaan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang handal, akuntabel dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan pembangunan
 - a. Optimalisasi kerjasama dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil antar SKPD
 - b. Peningkatan kapasitas aparat dalam pengelolaan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil
 - c. Penerapan sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
 - d. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil
4. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana
 - a. Pengembangan pelayanan KB bagi peserta KB Baru dan KB Aktif
 - b. Peningkatan peran laki-laki dalam partisipasi KB
5. Peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
 - a. Pengembangan kompetensi dan kemandirian generasi muda
 - b. Pengembangan prestasi olahraga secara berjenjang dengan titik berat pada cabang olahraga unggulan
 - c. Pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan

- d. Pengembangan organisasi pemuda dan olahraga
- 6. Mewujudkan pelayanan transmigrasi yang profesional dan peningkatan jumlah transmigran
 - a. Pengembangan pelayanan ketransmigrasian
 - b. Pengembangan kerjasama dengan daerah tujuan transmigran
- 7. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta mengoptimalkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
 - a. Peningkatan sistem informasi ketenagakerjaan
 - b. Peningkatan ketrampilan tenaga kerja
 - c. Pengembangan produktifitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja
 - d. Peningkatan kualitas hubungan industrial

Misi 6 Mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan listrik dan efisiensi penggunaan minyak, gas dan listrik serta pengelolaan pertambangan sesuai dengan kelestarian lingkungan.
 - a. Peningkatan fasilitas pelayanan listrik bagi kebutuhan rumah tangga dan kalangan dunia usaha dan penerangan jalan umum.
 - b. Peningkatan fasilitas perijinan pertambangan dan penegakkan hukum lingkungan dalam pengelolaan pertambangan secara terpadu.
2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkesinambungan.
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan fokus pada pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan cadangan sumberdaya alam dengan fokus pada penguatan peran kelembagaan masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
 - c. Pengelolaan lingkungan hidup dalam mengatasi tantangan penurunan daya dukung lingkungan dengan fokus pada perbaikan manajemen pengelolaan lingkungan.
3. Pemanfaatan produk-produk kehutanan dan jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya hutan.
 - a. Pelestarian dan pengelolaan hutan dan lahan dengan fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembudidayaan kehutanan.
 - b. Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa sekitar hutan dengan fokus pada pengembangan kapasitas SDM.
 - c. Penguatan jejaring kerja antar pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan fokus pada peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan.
 - d. Peningkatan pemanfaatan hasil hutan dengan fokus pada pengembangan produk-produk kehutanan non kayu.
4. Melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian serta peningkatan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestic serta lama tinggalnya
 - a. Pengembangan obyek wisata dengan fokus pengembangan potensi wisata budaya, pesona alam dan keunikan lokal.

- b. Penguatan kelompok masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata
 - c. Penguatan promosi dan jaringan kerja sama pariwisata
5. Mewujudkan pelastarian nilai-nilai budaya tradisional yang mantap yang mampu menjadi filter bagi masuknya budaya asing dan modern
- a. Pengembangan nilai-nilai budaya tradisional yang menjadi identitas daerah.
 - b. Peningkatan peran masyarakat dalam mendukung pengembangan nilai-nilai budaya tradisional.

Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera lahir batin, berakhlak mulia dengan penghayatan yang tinggi terhadap ideologi Pancasila, dan penghargaan yang tinggi terhadap agama, HAM, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan derajat kesehatan melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan
 - b. Peningkatan promosi kesehatan dan peran kelembagaan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat
 - c. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat
 - d. Peningkatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan
 - e. Peningkatan gizi pada balita, remaja, ibu hamil dan WUS
 - f. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
 - g. Pengembangan Sistem manajemen kesehatan daerah
2. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
 - a. Peningkatan ekonomi keluarga dalam rangka pengurangan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan dan penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS melalui pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
 - b. Penguatan sistem penanganan Korban Bencana
 - c. Peningkatan rasa kesetiakawanan sosial dalam penanganan permasalahan sosial
4. Mengoptimalkan pembangunan ideologi bangsa, pembangunan politik, peningkatan tertib hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) diarahkan untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang luhur berdasarkan dan nilai-nilai demokrasi berdasarkan dasar negara.
 - a. Peningkatan peraturan perundangan daerah dalam rangka peningkatan tertib hukum dan penghargaan HAM melalui perwujudan kelembagaan
 - b. Penguatan nilai-nilai ideologi dan disiplin melalui pendidikan masyarakat.
 - c. Peningkatkan pendidikan kewargaan (civic education) dalam rangka meningkatkan partisipasi politik, peran lembaga perwakilan rakyat dan peningkatan kelembagaan demokrasi di daerah
5. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak yang menjamin perkembangan generasi muda yang berkualitas
 - a. Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan sosial budaya bagi perempuan.

- b. Peningkatan peran PUG dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
- c. Pemberdayaan dan jaminan tumbuh kembang anak. Dalam bidang sosial budaya

C.3 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah III (Tahun 2015-2019)

Misi 1 : Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas, melalui pendayagunaan, pengembangan, dan mengoptimalkan potensi pertanian, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri, perdagangan, dan jasa. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas.
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dengan fokus pada pengembangan pasar dan jaringan kerjasama dengan industri.
 - b. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura dengan fokus dengan fokus pada peningkatan prasarana dan sarana pertanian.
 - c. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dengan fokus pada penguatan kawasan sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan.
 - d. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil peternakan dengan fokus pada pengembangan teknologi hasil peternakan.
2. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan peningkatan keamanan penyediaan dan distribusi pangan
 - a. Penguatan penyediaan pangan dan diversifikasi bahan pangan dengan fokus pada pengembangan penyediaan pangan ditingkat desa.
 - b. Penguatan distribusi dan keterjangkauan pangan sampai ke pelosok desa.
 - c. Peningkatan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat dengan fokus pada fasilitasi kelembagaan perlindungan pangan.
3. Meningkatkan produksi perikanan dan daya saing produk-produk perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian sumberdaya kelautan.
 - a. Peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar dan pemasaran hasil perikanan dengan fokus pada peningkatan kapasitas pembudidaya perikanan.
 - b. Peningkatan produksi perikanan budidaya air payau dan pemasaran hasil perikanan dengan fokus pada peningkatan kapasitas pembudidaya perikanan.
 - c. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan pendapatan nelayan dengan fokus pada peningkatan pemasaran dan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia rumah tangga nelayan.
 - d. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan dengan fokus pada peningkatan peran kelembagaan masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah
 - a. Pengembangan sistem transportasi
 - b. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan
 - c. Peningkatan pemerataan interkoneksi antar daerah.
 - d. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan sarana dan prasarana terminal.
 - e. Peningkatan Pembangunan sarana transportasi antar dan intermoda untuk memperlancar akses perekonomian.
5. Mengoptimalkan Pengelolaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konservasi

sumberdaya air untuk memelihara keberadaan, keberlanjutan sumberdaya air sehingga tersedia dalam kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik masa sekarang dan generasi mendatang

- a. Peningkatan pengendalian pemanfaatan air
- b. Pengembangan konservasi sumberdaya air dan perlindungan sumberdaya air
- c. Pendayagunaan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi domestik dan industri).
- d. Pengendalian erosi melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen daerah aliran sungai (DAS)
- e. Pelestarian hutan lindung dan kawasan suaka alam
- f. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air.

Misi 2 : Mewujudkan Iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi secara optimal terutama dalam rangka pengembangan industri dan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - a. Peningkatan iklim investasi melalui pengembangan pelayanan perijinan secara terpadu.
 - b. Peningkatan capaian target investasi melalui pengembangan sistem informasi potensi dan peluang investasi daerah.
 - c. Penguatan kerjasama antar daerah dibidang investasi.
2. Pengembangan industri kecil, menengah dan besar melalui pengembangan produk-produk lokal.
 - a. Peningkatan nilai tambah produk industri melalui penerapan teknologi dalam pengolahan produk.
 - b. Peningkatan diversifikasi produk industri daerah melalui pemanfaatan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk final.
 - c. Pengembangan industri daerah melalui pengembangan klaster industri.
3. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah secara berkelanjutan.
 - a. Pengembangan usaha koperasi dengan fokus pada pengembangan kegiatan usaha koperasi.
 - b. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pengembangan cluster usaha dan penerapan teknologi.
 - c. Diversifikasi produk hasil usaha mikro, kecil dan menengah dengan fokus pada pengembangan teknologi dalam pemanfaatan potensi daerah.
4. Meningkatkan perdagangan produk unggulan daerah melalui peningkatan prasarana dan sarana perdagangan.
 - a. Pengembangan perdagangan daerah dengan fokus pada peningkatan sarana prasarana perdagangan skala menengah
 - b. Pengembangan jaringan kerjasama perdagangan kecil, menengah dan besar.
 - c. Peningkatan perlindungan konsumen dengan fokus pada penguatan kelembagaan perlindungan konsumen.
 - d. Pemantapan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dan terjangkau harganya di tingkat desa.

Misi 3 : Meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pungutan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada.
 - a. Pengembangan tata kelola pendapatan daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang syah berfokus pada peningkatan keterampilan pegawai.
 - b. Pengembangan pendapatan melalui penetapan sumber-sumber pendapatan baru, baik pajak, retribusi maupun pendapatan daerah lainnya.
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru dengan tetap memperhatikan produktivitas masyarakat.
 - a. Pengkajian jenis-jenis pajak dan retribusi baru serta jenis pendapatan daerah lainnya

Misi 4: Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat yang tinggi. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penegakan hukum dan HAM untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah.
 - a. Penegakkan tata peraturan perundangan di daerah dalam rangka penegakkan hukum dan HAM, dengan fokus pada pelebagaan kesadaran hukum dalam masyarakat.
 - b. Penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat dala pembangunan daerah.
 - c. Penguatan jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui penguatan kelembagaan didesa/kelurahan.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan demokorasi di daerah.
 - a. Pemantapan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan lajnut serta penempatan pejabat fungsional di SKPD tertentu.
3. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahahan umum, persandian dan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah
 - a. Penguatan pelayanan perijinan secara terpadu/ OSS dan optimalisasi pelayanan umum secara cepat dan mudah di setiap SKPD.
 - b. Pemantapan bentuk kerjasama antar daerah dan dunia usaha dalam rangka peningkatan pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan wilayah strategis.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - a. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan desa/kelurahan dan peningkatan kesejahteraan.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah.
 - a. Pemantapan dan penyempurnaan sistem informasi data perencanaan secara digital mendukung perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Pemantapan kelembagaan desa/kelurahan dan swadaya dalam pembangunan.

6. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung bagi pengembangan sistem informasi manajemen data secara digital yang mudah diakses oleh SKPD.
 - a. Optimalisasi jaringan sistem informasi data antar SKPD secara digital untuk pelayanan data statistik dan perencanaan pembangunan.
 - b. Peningkatan prasarana dan sarana penyediaan data secara digital untuk data perencanaan dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Meningkatkan pelayanan penyediaan data/ informasi yang lengkap dan mutakhir bagi perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan usaha.
 - a. Peningkatan kualitas data dan informasi untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan.
 - b. Peningkatan pelayanan dalam mengakses data/informasi secara mudah dan cepat.
 - c. Pengembangan budaya tertib administrasi dalam penyediaan, pengolahan dan penyajian data dan informasi dari tingkat desa sampai kabupaten

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang produktif, berpendidikan, dan memiliki kompetensi dengan pertumbuhan yang terkendali. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing melalui penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas
 - a. Pemantapan pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak pada semua jenjang pendidikan dan pendidikan non formal
 - b. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan pendidikan non formal
 - c. Mantapnya rata-rata lama sekolah penduduk
 - d. Peningkatan daya saing pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan kejuruan
 - e. Tercapainya proporsi SMK : SMA 70:30
2. Mengoptimalkan pengembangan budaya membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis
 - a. Peningkatan sarana prasarana perpustakaan serta pengelolaan perpustakaan yang lebih optimal
 - b. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang berkualitas.
3. Peningkatan pengelolaan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang handal, akuntabel dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan pembangunan
 - a. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengolahan data antar SKPD
 - b. Pengembangan sistem pengolahan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lebih handal.
 - c. Penguatan kelembagaan sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
4. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana
 - a. Peningkatan pelayanan KB aktif dan mandiri
 - b. Peningkatan KIP/K (Komunikasi Inter Personal/Konseling) dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
 - c. Penguatan kelompok prio utomo dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dalam berKB
5. Peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian

bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.

- a. Penguatan kompetensi dan kemandirian generasi muda
 - b. Penguatan prestasi olahraga pada semua cabang olah raga yang ada
 - c. Pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan
 - d. Penguatan organisasi pemuda dan olah raga
 - e. peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
6. Mewujudkan pelayanan transmigrasi yang profesional dan peningkatan jumlah transmigran
- a. Penguatan pelayanan ketransmigrasian
 - b. Penguatan kerjasama dengan daerah tujuan transmigran
7. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta mengoptimalkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
- a. Pengoptimalan sistem informasi ketenagakerjaan
 - b. Pengembangan kualitas, kompetensi daya saing tenaga kerja
 - c. Peningkatan perlindungan pekerja
 - d. Penguatan hubungan industrial yang harmonis

Misi 6 Mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan listrik dan efisiensi penggunaan minyak, gas dan listrik serta pengelolaan pertambangan sesuai dengan kelestarian lingkungan.
 - a. Pemerataan distribusi listrik bagi kebutuhan rumah tangga dan kalangan dunia usaha dan jalan umum
 - b. Penegakkan hukum bagi usaha pertambangan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertambangan
2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkesinambungan.
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan fokus pada perlindungan daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai.
 - b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan cadangan sumberdaya alam dengan fokus pada peningkatan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan.
 - c. Pengelolaan lingkungan hidup dalam mengatasi tantangan penurunan daya dukung lingkungan dengan fokus pada peningkatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
3. Pemanfaatan produk-produk kehutanan dan jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya hutan.
 - a. Pelestarian dan pengelolaan hutan dan lahan dengan fokus pada pengendalian eksploitasi hasil hutan kayu.
 - b. Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa sekitar hutan dengan fokus pada fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat.
 - c. Penguatan jejaring kerja antar pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan fokus pada pengembangan CSR dunia usaha dalam pengelolaan dan pelestarian hutan.
 - d. Peningkatan pemanfaatan hasil hutan dengan fokus pada pengolahan produk-produk kehutanan non kayu dengan teknologi modern.

4. Melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian serta peningkatan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestic serta lama tinggalnya
 - a. Pengembangan potensi wisata dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana aksesibilitas dan penunjang pariwisata
 - b. Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata.
 - c. Peningkatan peran swasta dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Purworejo.
5. Mewujudkan pelastarian nilai-nilai budaya tradisional yang mantap yang mampu menjadi filter bagi masuknya budaya asing dan modern
 - a. Pelestarian nilai-nilai budaya tradisional yang menjadi identitas daerah.
 - b. Penguatan ketahanan budaya yang mampu menjadi filter bagi masuknya budaya asing dan modern yang negatif

Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera lahir batin, berakhlak mulia dengan penghayatan yang tinggi terhadap ideologi Pancasila, dan penghargaan yang tinggi terhadap agama, HAM, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan derajat kesehatan melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
 - b. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
 - c. Pemantapan sistem jaminan kesehatan daerah
 - d. Peningkatan mutu tenaga kesehatan
 - e. Penguatan program peningkatan gizi masyarakat
 - f. Percepatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
 - g. Penguatan Sistem manajemen kesehatan daerah
2. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
 - a. Penguatan lembaga masyarakat dalam pengurangan pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan dan penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - a. Peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS
 - b. Pemantapan sistem penanganan Korban Bencana yang lebih baik
 - c. Pemantapan rasa kesetiakawanan sosial dalam permasalahan sosial
4. Mengoptimalkan pembangunan ideologi bangsa, pembangunan politik, peningkatan tertib hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) diarahkan untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang luhur berdasarkan dan nilai-nilai demokrasi berdasarkan dasar negara.
 - a. Pemantapan tata peraturan perundangan daerah dalam rangka peningkatan tertib hukum dan penghargaan HAM melalui peningkatan peran kelembagaan dalam masyarakat
 - b. Pemantapan nilai jati diri bangsa, pendidikan politik dan pengembangan kelembagaan dan kader disiplin dalam masyarakat
 - c. Pemantapan pendidikan kewargaan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, fasilitasi peningkatan peran partai politik dan peran lembaga perwakilan rakyat dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik

5. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak yang menjamin perkembangan generasi muda yang berkualitas
 - a. Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan hukum dan politik bagi perempuan.
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam PUG
 - c. Pemantapan kelembagaan dalam perlindungan anak dalam bidang hukum.

C.4 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah IV (Tahun 2020-2024)

Misi 1 : Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas, melalui pendayagunaan, pengembangan, dan mengoptimalkan potensi pertanian, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri, perdagangan, dan jasa. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas.
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dengan fokus pada peningkatan mutu produk pertanian dalam arti luas.
 - b. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura dengan fokus pada pengembangan manajemen pertanian.
 - c. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dengan fokus pada pengolahan hasil pertanian melalui transformasi teknologi.
 - d. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil peternakan dengan fokus pada pengolahan hasil peternakan.
2. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan peningkatan keamanan penyediaan dan distribusi pangan
 - a. Penguatan penyediaan pangan dan diversifikasi bahan pangan dengan fokus pada pengembangan penyediaan pangan ditingkat keluarga.
 - b. Pemantapan distribusi dan keterjangkauan pangan sampai ke pelosok desa.
 - c. Peningkatan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat dengan fokus pada peningkatan jaminan keamanan pangan
3. Meningkatkan produksi perikanan dan daya saing produk-produk perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian sumberdaya kelautan.
 - a. Peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar dan pemasaran hasil perikanan dengan fokus pada pengembangan pengolahan produk perikanan menggunakan teknologi modern.
 - b. Peningkatan produksi perikanan budidaya air payau dan pemasaran hasil perikanan dengan dengan fokus pada pengembangan pengolahan produk perikanan menggunakan teknologi modern.
 - c. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan pendapatan nelayan dengan fokus pada peningkatan pengolahan produk perikanan menggunakan teknologi modern.
 - d. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan dengan fokus pada peningkatan pengawasan secara partisipatif dan penegakan hukum
4. Meningkatkan pelayanan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah
 - a. Optimalisasi sistem transportasi yang berkualitas dan mendukung aktivitas ekonomi
 - b. Optimalisasi kualitas jalan yang tinggi untuk kelancaran aksesibilitas
 - c. Optimalisasi pelayanan dan perbaikan jaringan transportasi

- d. Optimalisasi Penataan dan peningkatan pelayanan angkutan umum serta peningkatan keamanan keselamatan dan ketertiban lalu lintas
5. Mengoptimalkan Pengelolaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konservasi sumberdaya air untuk memelihara keberadaan, keberlanjutan sumberdaya air sehingga tersedia dalam kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik masa sekarang dan generasi mendatang
- a. Optimalisasi Perlindungan dan pelestarian sumberdaya air
 - b. Optimalisasi konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
 - c. Optimalisasi fungsi prasarana dan sarana sumberdaya air secara optimal
 - d. Optimalisasi kondisi infrastruktur pengairan yang baik
 - e. Optimalisasi Pengendalian erosi melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen daerah aliran sungai (DAS)

Misi 2 : Mewujudkan Iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi secara optimal terutama dalam rangka pengembangan industri dan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - a. Peningkatan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan investasi.
 - b. Peningkatan capaian target investasi melalui promosi potensi dan peluang investasi daerah.
 - c. Pemantapan kerjasama antar daerah dibidang investasi.
2. Pengembangan industri kecil, menengah dan besar melalui pengembangan produk-produk lokal.
 - a. Peningkatan nilai tambah produk industri melalui perluasan jaringan pemasaran.
 - b. Peningkatan diversifikasi produk industri daerah melalui pengembangan kerjasama antara industri kecil, menengah dan besar.
 - c. Pengembangan industri daerah melalui penguatan jaringan pasar.
3. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah secara berkelanjutan.
 - a. Pengembangan usaha koperasi dengan fokus pada pengembangan kerjasama antara koperasi dengan industri.
 - b. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui perluasan pasar.
 - c. Diversifikasi produk hasil usaha mikro, kecil dan menengah melalui aplikasi teknologi dalam pemanfaatan potensi daerah.
4. Meningkatkan perdagangan produk unggulan daerah melalui peningkatan prasarana dan sarana perdagangan.
 - a. Pengembangan perdagangan daerah dengan fokus pada peningkatan sarana prasarana perdagangan skala besar (grosir).
 - b. Peningkatan ekspor produk unggulan daerah melalui promosi produk.
 - c. Peningkatan perlindungan konsumen dengan fokus pada peningkatan kemandirian kelembagaan perlindungan konsumen.
 - d. Peningkatan jaminan penyediaan kebutuhan pokok secara aman dan terjangkau bagi masyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pungutan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada.
 - a. Penguatan tata kelola pendapatan daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang syah (pinjaman daerah dan obligasi daerah) berfokus pada peningkatan keterampilan pegawai.
 - b. Pengembangan pendapatan melalui penetapan sumber-sumber pendapatan baru, baik pajak, retribusi maupun pendapatan daerah lainnya
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru dengan tetap memperhatikan produktivitas masyarakat.
 - a. Pemantapan dan evaluasi terhadap penetapan sumber-sumber pendapatan baru dan dampaknya terhadap produktivitas masyarakat.

Misi 4: Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat yang tinggi. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penegakan hukum dan HAM untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah.
 - a. Penegakkan tertib hukum dengan fasilitasi perlindungan hukum dan HAM bagi masyarakat kurang mampu.
 - b. Pemantapan kelembagaan partisipasi dan swadaya masyarakat serta kalangan dunia usaha dalam pembangunan daerah.
 - c. Penguatan kelembagaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat guna menekan kriminalitas dan kejahatan di tingkat desa/kelurahan.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan demokorasi di daerah.
 - a. Pemantapan keahlian SDM aparatur di setiap SKPD dan penempatan aparat sesuai bidang keahlian.
3. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum, persandian dan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah
 - a. Pemantapan pelayanan publik secara terpadu/ OSS dan optimalisasi pelayanan pemerintah desa/kelurahan.
 - b. Pemantapan kerjasama antar daerah dan dunia usaha untuk pelayanan publik, pembangunan pengembangan wilayah perbatasan untuk menjamin pembangunan wilayah.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - a. Pemantapan aparatur pemerintah dan kelembagaan desa/kelurahan dalam peningkatan kesejahteraan.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah.
 - a. Meningkatkan pelayanan data digital secara terintegrasi sampai desa/kelurahan.

- b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, swadaya dan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah.
6. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung bagi pengembangan sistem informasi manajemen data secara digital yang mudah diakses oleh SKPD.
 - a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mendukung terwujudnya sistem informasi manajemen data yang akurat dan akuntabel bagi perencanaan pembangunan dan pelayanan umum.
 - b. Pemantapan prasarana jaringan sistem informasi data secara digital yang lebih berkualitas
 7. Meningkatkan pelayanan penyediaan data/ informasi yang lengkap dan mutakhir bagi perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan usaha.
 - a. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antar pihak-pihak SKPD dalam pelayanan data secara digital.
 - b. Penguatan kapasitas aparat dalam memberikan pelayanan data untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Pemantapan komitmen dan tanggungjawab aparat dalam pelayanan data dan informasi secara cepat dan handal.

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang produktif, berpendidikan, dan memiliki kompetensi dengan pertumbuhan yang terkendali. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing melalui penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas
 - a. Terwujudnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak pada jenjang pendidikan dasar dan non formal
 - b. Terwujudnya mutu pendidikan dengan titik berat pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan non formal
 - c. Terwujudnya peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk dan peningkatan pendidikan kecakapan hidup dan keaksaraan fungsional.
 - d. Terwujudnya dayaasaing pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan kejuruan
 - e. Tercapainya proporsi SMK : SMA 70:30
2. Mengoptimalkan pengembangan budaya membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis
 - a. Terwujudnya sarana prasarana perpustakaan yang berkualitas
 - b. Terwujudnya budaya baca di kalangan masyarakat
3. Peningkatan pengelolaan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang handal, akuntabel dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan pembangunan
 - a. Optimalisasi jaringan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil antar SKPD terkait
 - b. Pengembangan sistem online data kependudukan dan catatan sipil ditngkat kecamatan dan kabupaten
 - c. Optimalisasi kelembagaan sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
 - d. Optimalisasi jaringan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil antar SKPD terkait

4. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana
 - a. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam ber KB
 - b. Pemantapan KIP/K (Komunikasi Inter Personal/Konseling) dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
 - c. Pemantapan kelompok prio utomo
5. Peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
 - a. Pemantapan kompetensi dan kemandirian generasi muda
 - b. Pemantapan prestasi olahraga pada semua cabang olah raga yang ada
 - c. Pemantapan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan
 - d. Pemantapan organisasi pemuda dan olah raga
 - e. peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
6. Mewujudkan pelayanan transmigrasi yang profesional dan peningkatan jumlah transmigran
 - a. Terwujudnya peningkatan jumlah transmigran berkualitas
 - b. Terwujudnya kerjasama dengan daerah tujuan transmigran
7. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta mengoptimalkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
 - a. Pemantapan sistem informasi tenaga kerja
 - b. Peningkatan kualitas tenaga kerja
 - c. Pemantapan sistem perlindungan tenaga kerja
 - d. Pemantapan hubungan industrial.

Misi 6 Mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan listrik dan efisiensi penggunaan minyak, gas dan listrik serta pengelolaan pertambangan sesuai dengan kelestarian lingkungan.
 - a. Pengawasan pelayanan listrik rumah tangga dan kalangan dunia usaha dan jalan umum
 - b. Pengawasan dan pengelolaan pertambangan daerah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan
2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkesinambungan.
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan fokus pada pengembangan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan dan pengujian emisi gas kendaraan.
 - b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan cadangan sumberdaya alam dengan fokus pada penegakan hukum terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
 - c. Pengelolaan lingkungan hidup dalam mengatasi tantangan penurunan daya dukung lingkungan dengan fokus pada pengembangan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan

3. Pemanfaatan produk-produk kehutanan dan jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya hutan.
 - a. Pelestarian dan pengelolaan hutan dan lahan dengan fokus pada pengembangan penerapan jasa lingkungan.
 - b. Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa sekitar hutan dengan fokus pada pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.
 - c. Penguatan jejaring kerja antar pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan fokus peningkatan CSR dunia usaha dalam pengelolaan dan pelestarian hutan.
 - d. Peningkatan pemanfaatan hasil hutan dengan fokus pada pengembangan pemasaran produk-produk kehutanan non kayu.
4. Melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian serta peningkatan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestic serta lama tinggalnya
 - a. Pengembangan paket kunjungan wisata daerah dengan Memperhatikan Konteks Regional Jawa Tengah.
 - b. Permantapan kelembagaan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata.
 - c. Peningkatan investor dalam bidang pariwisata
5. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya tradisional yang mantap yang mampu menjadi filter bagi masuknya budaya asing dan modern
 - a. Penguatan pelestarian nilai-nilai budaya tradisional yang menjadi identitas daerah.
 - b. Terwujudnya ketahanan budaya yang mampu menjadi filter bagi masuknya budaya asing dan modern yang negatif

Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera lahir batin, berakhlak mulia dengan penghayatan yang tinggi terhadap ideologi Pancasila, dan penghargaan yang tinggi terhadap agama, HAM, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan derajat kesehatan melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan
 - a. Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan terjangkau
 - b. Pemantapan peran kelembagaan yang lebih mandiri dalam melaksanakan promosi kesehatan
 - c. Penguatan sistem jaminan kesehatan pra bayar pada masyar
 - d. Perwujudan tenaga kesehatan yang lebih berkualitas
 - e. Pemantapan status gizi masyarakat secara menyeluruh
 - f. Pemantapan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
 - g. Perwujudan Sistem Penguatan manajemen kesehatan daerah
2. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
 - a. Peningkatan peran lembaga swasta dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan dan penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - a. Pemantapan kesejahteraan sosial bagi PMKS
 - b. Pengurangan resiko bencana

- c. Perwujudan rasa kesetiakawanan sosial dalam permasalahan sosial
4. Mengoptimalkan pembangunan ideologi bangsa, pembangunan politik, peningkatan tertib hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) diarahkan untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang luhur berdasarkan dan nilai-nilai demokrasi berdasarkan dasar negara.
 - a. Peningkatan kesadaran hukum dan HAM demi terwujudnya tertib hukum dan penghargaan yang tinggi terhadap HAM bagi seluruh masyarakat.
 - b. Penerapan nilai-nilai jati diri bangsa, keterwakilan politik masyarakat sejalan dengan meningkatnya peran masyarakat sipil dan demokratisasi.
 - c. Pemantapan pendidikan kewargaan (civic education) dalam rangka meningkatkan partisipasi politik,
 - d. pemantapan peran partai politik dan lembaga perwakilan rakyat bagi pengembangan demokratisasi yang lebih mantap di daerah.
 5. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak yang menjamin perkembangan generasi muda yang berkualitas
 - a. Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan politik dan keterwakilan politik perempuan.
 - b. Pengendalian kekerasan pada perempuan demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender
 - c. Pemantapan jaringan kerja kemitraan dalam perlindungan anak.

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Purworejo selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. Meskipun RPJPD Purworejo ini disusun dan ditetapkan pada tahun 2010, namun kurun waktu (time frame) nya ditetapkan tahun 2005-2025, hal ini dilakukan untuk memenuhi konsistensi bahwa RPJP-D Kabupaten Purworejo merupakan sub sistem RPJP-D Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 dan juga merupakan sub sistem RPJP Nasional 2005-2025.

RPJPD ini ditetapkan untuk menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas pada saat mencalonkan diri menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati, dimana visi, misi dan program prioritas tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo yang berdimensi waktu lima tahunan dan RPJP-D ini juga menjadi acuan juga dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan visi **“Menjadi Daerah Agrobisnis yang Maju, Berdaya Saing, Mandiri, Lestari dan Sejahtera”** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat, bersih dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat (pro rakyat) ; dan (4) peran serta aktif segenap *stakeholder* pembangunan daerah (masyarakat, kalangan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi di Kabupaten Purworejo.